



KETUA MAJELIS WALI AMANAT

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437
Telepon: (021) 7490147, ext 1372, Faksimile : (021) 7490147,
E-mail: mwa-ut@ecampus.ut.ac.id, Laman: www.ut.ac.id

PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAJELIS WALI AMANAT UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Terbuka 2025-2045, Universitas Terbuka telah mempunyai dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang;
- b. bahwa dokumen perencanaan pengembangan jangka panjang sebagaimana disebut pada huruf a di atas perlu dijabarkan dalam dokumen rencana strategis guna kebutuhan organisasi untuk merespon dinamika lingkungan eksternal dan internal, menjamin kesinambungan arah organisasi, serta meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas dalam mencapai tujuan jangka panjang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Majelis Wali Amanat tentang Rencana Strategis Universitas Terbuka Tahun 2025-2029;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 200, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6821);
4. Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
5. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 75343/MPK.A/KP.08.06/2022 tentang Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Tahun 2022-2027;
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 1 Tahun 2024 tentang Sistem Perencanaan Universitas Terbuka;

7. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Terbuka Tahun 2025-2045;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT TENTANG RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2025-2029.

Pasal 1

1. Universitas Terbuka yang selanjutnya disingkat UT adalah perguruan tinggi negeri badan hukum yang melaksanakan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh.
2. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ UT yang menyusun, merumuskan, dan menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
3. Rektor adalah pemimpin UT yang menyelenggarakan dan mengelola UT.
4. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan UT untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari rencana jangka panjang.

Pasal 2

- (1) Renstra adalah Renstra UT Tahun 2025-2029.
- (2) Renstra UT Tahun 2025-2029 sebagaimana pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan MWA ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, peraturan dan keputusan yang mengatur mengenai arah kebijakan strategis, sasaran strategis, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, reformasi birokrasi, kerangka penyelenggaraan bidang akademik dan nonakademik, manajemen risiko, target kinerja, serta kerangka pendanaan dan belanja dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan MWA ini.

Pasal 4

Pada saat Peraturan MWA ini mulai berlaku, Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 9 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Terbuka Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis Antara Universitas Terbuka Tahun 2024-2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan MWA ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan
pada tanggal : 16 September 2025



KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA,

AINUN NA'IM

LAMPIRAN
PERATURAN MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA
NOMOR : 4 TAHUN 2025
TANGGAL : 16 SEPTEMBER 2025

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2025-2029

KETUA MAJELIS WALI AMANAT
UNIVERSITAS TERBUKA,



AINUN NA'IM



UNIVERSITAS TERBUKA

RENSTRA UT

RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TERBUKA 2025–2029

Menjadi PTJJ berkualitas dunia melalui
Ekosistem Pembelajaran Digital yang Kuat



UNIVERSITAS TERBUKA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI



RENSTRA UT **RENCANA STRATEGIS** UNIVERSITAS TERBUKA **2025–2029**

Menjadi PTJJ berkualitas dunia melalui
Ekosistem Pembelajaran Digital yang Kuat

UNIVERSITAS TERBUKA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
UNIVERSITAS TERBUKA 2025-2029
Tangerang Selatan, 24 Juli 2025

Ketua MWA,
Universitas Terbuka



Rector,
Universitas Terbuka



Ketua Senat Akademik,
Universitas Terbuka



TIM PENYUSUN RENSTRA UT 2025-2029

Penasehat

Prof. Ainun Na'im, Ph.D.
Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.
Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si

Pengarah

Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D.
Rahmat Budiman, S.S., M.Hum., Ph.D.
Prof. Dr. Paken Pandiangan, S.Si., M.Si.

Penanggung Jawab

Prof. Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si

Ketua

Prof. Dra. Dewi Artati Padmo Putri, M.A., Ph.D.

Wakil Ketua

Fauzy Rahman Kosasih, S.S., M.Pd.

Anggota

Adisthy Shabrina N.Q.B.A.(Hons.), M.Sc.
Adrian Sutawijaya, S.E., M.Si.
Alpin Herman Saputra, S.Pd., M.Pd.
Antonio Vivaldi, S.E., MBA.
Arif Purnomo Muji Basuki, S.Kom.
Astri Dwi Jayanti Suhandoko, M.Ed., Ph.D.
Bambang Hariyanto, S.E.
Dr. Agus Joko Purwanto, M.Si.
Dr. Ake Wihadanto, S.E., M.T.
Dr. Endi Rekart, S.E., M.S.M.
Dr. Heni Safitri, S.Pd., M.Si.
Dr. Kartono, S.Pd., M.Si.
Dr. Maya Maria, S.E., M.M.
Dr. Muhammad Rif'an, S.T., M.T.
Dr. Shine Pintor Siolemba Patiro, S.T., M.M.
Dr. Sofjan Aripin, M.Si.
Dr. Sri Sedyaningsih, M.Si.
Dr. Sri Tatminingsih, M.Pd.
Dr. Tuti Purwoningsih, S.Pd., M.Sc.
Dr. Vivi Indra Amelia Nst, S.I.P., M.A.
Dra. Ace Sriati Rachman, M.Si.
Dra. Any Meilani, M.Si.
Drs. Tedjo Djatmiko, M.Pd.
Erika Pradana Putri, S.T., M.Sc.
Fawzi Rahmadiyan Zuhairi, S.Si., M.Sc.
Firmansyah, S.Kom., M.M.
Hendrawan Bayu Wicaksono, S.E., M.Ak.
Olivia Idrus, S.E., M.Sc.
Prof. Daryono, S.H., M.A., Ph.D.
Prof. Dr. Dewi Julia Ratnaningsih, S.Si., M.Si.
Prof. Dr. Ernuk Yuliana, S.Pi., M.T.
Prof. Dr. Etty Puji Lestari, S.E., M.Si.
Prof. Dr. Mohammad Imam Farisi, M.Pd.

Prof. Dr. Paulina Pannen, M.Ls
Prof. Dr. Sardjijo, M.Si.
Prof. Dr. Sugilar, M.Pd.
Tiara Syaepul S.E.
Yanti Hermawati, S.Sos.I., M.Si.
Yonarisman Muhammad Akbar, S.Ikom., M.A.
Zakirman, S.Pd., M.Pd.

Penelaah

Prof. Ir. Tian Belawati, M.Ed., Ph.D.
Prof. Dr. Maximus Gorky Sembiring, M.Sc.
Prof. Aminudin Zuhairi, Ph.D.
Prof. Dr. Ucu Rahayu, M.Sc.
Dr. Meita Istianda, S.IP., M.Si.
Dr. Subekti Nurmawati, M.Si.
Dr. Mery Noviyanti, S.Si., M.Pd.
Dr. Meirani Harsasi, S.E., M.Si.
Dr. Irsanti Widuri Asih S.Sos. M.Si
Dr. Hendrian S.E. M.Si.
Dr. Mukti Amini M.Pd.
Dr. Tora Akadira, S.T., M.Si.
Dr. Heriani, S.IP., M.A.
Drs. Timbul Pardede, M.Si.
Dra. Isti Rokhiyah, M.A., Ph.D.
Dra. Inggit Winarni, M.Si.
Ir. Kristanti Ambar Puspitasari, .Ed., Ph.D.
Yeni Widiastuti S.E. M.Si.
Anto Hidayat S.IP. M.Si.
Kurnia Endah Riana S.E. M.Com.
Dimas Agung Prasetyo, S.Kom., M.Sc.

Desain Cover, Grafis dan Layouter

Bangun Asmo Darmanto, S.Des., M.Ds.
Faisal Basri, A.Md. I.Kom.

Dilarang mengutip sebagian ataupun seluruh buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin dari penerbit.

Hak Cipta pada Penulis dan dilindungi Undang-undang Hak Penerbitan pada Penerbitan Universitas Terbuka Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi - Republik Indonesia

Copyright Notice Universitas Terbuka 2025

UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan -
15437, Banten - Indonesia Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id, Halo UT. 1500024

FOLLOW US ON



@universitasterbuka | @univterbuka

Kata Sambutan

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya, Rencana Strategis Universitas Terbuka (Renstra UT) Tahun 2025-2029 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik. Seiring dengan perubahan status UT menjadi PTN-BH melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2022, UT semakin memperkuat komitmennya dalam mengembangkan ekosistem pembelajaran digital yang tangguh, inovatif, dan inklusif. Langkah strategis ini diwujudkan melalui penyusunan Rencana Strategis Antara (Renstra Antara) Tahun 2024-2025 dan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) UT Tahun 2025-2045 sebagai landasan perencanaan jangka panjang untuk 20 tahun ke depan.

Renstra UT Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam RPJP 2025-2045 untuk mencapai visi UT yaitu "Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh Berkualitas Dunia". Renstra UT Tahun 2025-2029 disusun untuk mendukung tonggak pertama RPJP UT, yaitu "Menjadi PTJJ Berkualitas Dunia melalui Ekosistem Pembelajaran Digital yang Kuat". Kami berharap Renstra ini dapat menjadi pijakan strategis dalam mengakselerasi transformasi digital, meningkatkan akses pendidikan, dan memperkuat kualitas akademik yang berdaya saing global. Kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada Tim Penyusun Renstra UT Tahun 2025-2029. Akhir kata semoga Allah SWT selalu meridhoi seluruh upaya kita dalam mewujudkan Making Higher Education Open to All.



Ketua MWA,
Universitas Terbuka

Prof. Ainun Na'im, Ph.D
NIP. 19601204 1986 01



Rektor,
Universitas Terbuka

Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A.
NIP. 19651110 198903 1 001



Ketua Senat Akademik,
Universitas Terbuka

Prof. Dr. Chanif Nurcholis, M.Si.
NIP. 19590202 199203 1 002

DAFTAR ISI

KATA SAMBUTAN	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR GRAFIK	vi
DAFTAR LAMPIRAN	vi
 BAB I PENDAHULUAN	 1
1.1 Kondisi Umum Universitas Terbuka	1
1.2 Potensi dan Permasalahan	9
a. Analisis Potensi	9
b. Analisis Permasalahan	11
c. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal	22
 BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN	 23
2.1 Visi	23
2.2 Misi	23
2.3 Tujuan	23
 BAB III ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN	 25
3.1 Arah Kebijakan Strategis	25
3.2 Penguatan Sasaran Strategis	26
3.3 Kerangka Regulasi	37
3.4 Kerangka Kelembagaan	41
3.5 Reformasi Birokrasi	41
3.6 Kerangka Penyelenggaraan Bidang Akademik dan Nonakademik	40
3.7 Manajemen Risiko	46
 BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	 47
4.1 Target Kinerja	47
4.2 Kerangka Pendanaan dan Belanja	83
 BAB V PENUTUP	 87
 LAMPIRAN	 88
Lampiran 1 Pohon Kinerja Universitas Terbuka	88
Lampiran 2 Definisi Operasional, Kriteria, dan Rumus Perhitungan IKSS	88
Lampiran 3 Definisi Operasional, Kriteria, dan Rumus Perhitungan IKPS	120

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Lulusan Mahasiswa Tahun 2024	3
Tabel 1.2 Data IPK Mahasiswa Lulusan Tahun 2024	3
Tabel 1.3 Komposisi SDM UT	6
Tabel 1.4 Komposisi Dosen UT Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin	7
Tabel 1.5 Komposisi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional Dosen per Tahun 2024	7
Tabel 1.6 Komposisi PNS yang Memasuki Masa Pensiun pada Periode 2025-2029	8
Tabel 1.7 Total Dokumen Kerja Sama UT	21
Tabel 2.1 Tujuan UT dan Tujuan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi.....	24
Tabel 3.1 Tonggak Capaian Utama Tahap 1 untuk Tiap Bidang Strategis	26
Tabel 3.2 Keselarasan Tujuan dan Penguatan Sasaran Strategis Universitas Terbuka	27
Tabel 3.3 Keterkaitan antara Isu Strategis dengan Arah Kebijakan UT dan Arah Kebijakan Kemendiktisaintek	31
Tabel 3.4 Proyeksi Penerimaan UT	34
Tabel 3.5 Regulasi yang Perlu Disusun dan Direvisi	38
Tabel 3.6 Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kondisi yang Ingin Dicapai	42
Tabel 3.7 Kerangka Penyelenggaraan	45
Tabel 4.1 Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program Strategis (IKPS) UT	47
Tabel 4.2 <i>Key Success Indicators</i>	81
Tabel 4.3 Proyeksi Pendapatan	83
Tabel 4.4 Indikasi Kebutuhan Pendanaan	84

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Akreditasi Institusi dan Program Studi	4
Gambar 1.2 Rekognisi dan Sertifikasi	5
Gambar 1.3 <i>Culture Roadmap</i> UT 2022-2035.....	15
Gambar 1.4 Skema Strategi Sustainable Alumni <i>Connection</i>	20
Gambar 1.5 <i>Matriks Internal-External Factor Evaluation</i> (IFE-EFE)-Universitas Terbuka	22
Gambar 3.1 Tonggak Capaian Utama RPJP UT Tahun 2025-2045	25
Gambar 3.2 Peta Proses Bisnis UT	44

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Lulusan UT Tahun 2019 – 2024	19
Grafik 3.1 Pendapatan UT Tahun 2020-2024	36
Grafik 3.2 Tabel Belanja UT Tahun 2020-2024	37

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pohon Kinerja Universitas Terbuka	88
Lampiran 2 Definisi Operasional, Kriteria, dan Rumus Perhitungan IKSS	89
Lampiran 3 Definisi Operasional, Kriteria, dan Rumus Perhitungan IKPS	120

BAB I PENDAHULUAN

Universitas Terbuka (UT) merupakan Perguruan Tinggi Negeri yang menjadi pelopor Pendidikan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) dan memiliki karakteristik yang berbeda dengan pendidikan tinggi konvensional. UT didirikan dengan Keputusan Presiden Nomor 41 Tahun 1984. Pada saat diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 September 1984, UT mengemban beberapa mandat yang meliputi: (1) menampung calon mahasiswa yang tidak lulus sistem penerimaan mahasiswa baru, (2) meneruskan Proyek Pendidikan Guru melalui belajar jarak jauh, serta (3) memberikan kesempatan lebih luas kepada masyarakat yang telah bekerja untuk meneruskan pendidikan di jenjang pendidikan tinggi.

UT telah ditetapkan sebagai PTNBH berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2022, tertanggal 20 Oktober 2022. Sebagai PTNBH, UT memiliki otonomi yang cukup luas dalam hal tata kelola melalui tiga (3) organ utama, yaitu: Rektor, Majelis Wali Amanat (MWA), dan Senat Akademik Universitas (SAU). SAU memiliki kewenangan tertinggi untuk membuat kebijakan dalam bidang akademik dan MWA memiliki kewenangan tertinggi untuk membuat kebijakan dalam bidang nonakademik. Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA yang di dalamnya termasuk Menteri Pendidikan Tinggi, Riset, Sains, dan Teknologi (Kemendikristek) sebagai wakil pemerintah. Laporan tahunan UT, yang mencakup aspek akademik dan non akademik, harus disampaikan oleh Rektor kepada MWA dalam waktu tiga bulan setelah akhir tahun buku. Di samping itu, Rektor menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada MWA. Audit laporan keuangan tahunan dilakukan oleh akuntan publik yang ditetapkan oleh Komite Audit (KA), dan hasilnya diumumkan kepada publik.

Sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (PTTJJ), UT memiliki keunikan yang berbeda dari perguruan tinggi tatap muka konvensional. Karakteristik utama dari PTTJJ terletak pada adanya pemisahan fisik antara dosen dan mahasiswa selama proses pembelajaran. Namun terpisahnya fisik ini dijumpai melalui pendekatan manajemen yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Hal ini mengakibatkan tantangan yang spesifik dan berbeda dalam tata kelola maupun kegiatan operasional. Hal ini menghadirkan berbagai tantangan dan peluang tersendiri khususnya dalam memperluas akses layanan pendidikan bagi masyarakat dengan memanfaatkan teknologi terkini.

1.1 Kondisi Umum Universitas Terbuka

Universitas terbuka di dunia menghadapi permasalahan yang serupa yaitu suatu ketidakpastian. Perubahan cepat di bidang teknologi, terutama munculnya kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta tekanan finansial dan tantangan kualitas pendidikan menjadi isu utama yang memengaruhi tiga misi utama pendidikan terbuka secara global yaitu ISS (*inclusive, scalability, and sustainability*) (ICDE, 2024). Di tengah tantangan tersebut, diperlukan *leadership strategy* yang mendorong budaya 3C (*care, curiosity, and challenges*) untuk mewujudkan transformasi pendidikan yang memiliki dampak pada pencapaian misi pendidikan terbuka ke depan.

Menghadapi tantangan ini, kolaborasi Internasional semakin diperlukan sebagai solusi strategis dan kerja sama antar universitas terbuka yang memberikan nilai tambah melalui pertukaran praktik terbaik, pengembangan alat jaminan mutu, dan proyek strategis bersama. Inisiatif seperti *Technology Innovation Network* (TIN) menjadi contoh bagaimana platform global dapat memperkuat inovasi dan kapasitas institusi dalam menghadapi perubahan dinamis di dunia pendidikan terbuka (ICDE, 2024).

Universitas terbuka sebagai suatu konsep pendidikan terbuka berfokus pada prinsip *inclusivity, scalability, and sustainability* menjadi semakin relevan meskipun banyak universitas konvensional beralih ke model pembelajaran *online*. Namun, perlu adanya penguatan advokasi dan komunikasi yang lebih efektif untuk menegaskan kontribusi UT dalam mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) 4 (OEGlobal, 2024) dan Asta Cita 4 (Bappenas, 2024). Dengan menyuarakan pencapaian dan inovasi pendidikan terbuka secara lebih luas, UT bisa memperkuat posisi strategisnya melalui pencapaian visi untuk mendorong transformasi pendidikan tinggi terbuka global maupun nasional yang inklusif.

UT memiliki 4 (empat) Fakultas dan 1 (satu) Sekolah Pascasarjana. Fakultas terdiri dari Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik (FHISIP), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), dan Fakultas Sains dan Teknologi (FST). Pada tahun 2024, UT memiliki 48 program studi (prodi) dengan jenjang Diploma sebanyak 2 prodi, Sarjana sebanyak 35 prodi, Magister sebanyak 9 prodi, dan 2 Program Doktor.

Jumlah mahasiswa aktif UT per tahun 2024 sebanyak 671.967 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan 54 negara. Untuk memperluas daya jangkauan dan akses layanan, UT memiliki 39 UT daerah, UT Luar Negeri, 669 Sentra Layanan UT (SALUT) yang tersebar di seluruh Indonesia termasuk 3 di luar negeri.

Dengan jejaring yang luas dan jumlah mahasiswa yang besar, UT juga telah menghasilkan banyak alumni sebagai lulusan. Pada aspek lulusan, UT telah menghasilkan lulusan Program Diploma, Sarjana, Pascasarjana (Magister dan Doktor), dan Profesi. Secara akumulatif, Jumlah lulusan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) sebanyak 1.872.071 alumni, diikuti oleh Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FHISIP) dengan 165.530 alumni, Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) dengan 95.001 alumni, Fakultas Sains dan Teknologi (FST) sebanyak 16.827 alumni, dan Sekolah Pascasarjana (SPs) dengan 6.675 alumni. Pada penutupan tahun 2024, jumlah total alumni UT telah mencapai angka 2.156.104 lulusan, dengan proporsi lulusan dari FKIP sebesar 87%.

Pada tahun 2024, mahasiswa yang dinyatakan lulus berdasarkan SK Yudisium pada tahun 2024 sebanyak 77.762 mahasiswa. Rincian jumlah mahasiswa lulusan dan keberhasilan indeks prestasi kumulatif mahasiswa dapat dilihat masing-masing pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Jumlah Lulusan Mahasiswa Tahun 2024

No.	Program Pendidikan	Jumlah Lulusan	Rata-Rata Masa Studi (Tahun)	Rata-Rata IPK
1.	Doktoral (S-3)	4	3,75	3,94
2.	Magister (S-2)	647	4,12	3,91
3.	Sarjana (S-1)	74.897	4,05	3,30
4.	Diploma Empat (D-IV)	334	4,43	3,22
5.	Diploma Tiga (D-III)	1.880	2,62	3,36
Total		77.762		

Data per tanggal 22/01/2025

Terkait dengan capaian IPK mahasiswa lulusan pada tahun 2024 memberikan gambaran yang cukup baik yaitu lulusan S1 dengan IPK 3.01 - 3.50 mencapai 51,18% dan lulusan dengan IPK ≥ 3.51 mencapai 31,65% seperti terlihat pada Tabel 1.2.

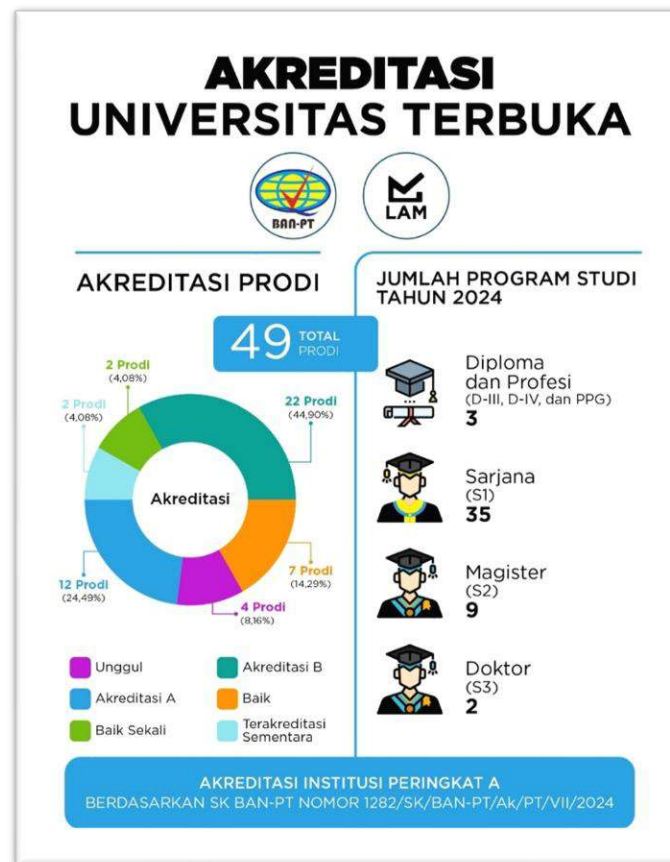
Tabel 1.2
Data IPK Mahasiswa Lulusan Tahun 2024

No.	Data IPK Mahasiswa	Diploma (D-II & D-III)	(%)	Sarjana (D-IV & S-1)	(%)	Pascasarjana (S-2 & S-3)	(%)
1.	≤ 2.50	16	0,85%	3.259	4,33%	-	-
2.	2.51 - 2.75	39	2,07%	3.176	4,22%	-	-
3.	2.76 - 3.00	115	6,12%	6.481	8,61%	-	-
4.	3.01 - 3.50	1.130	60,11%	38.501	51,18%	15	2%
5.	≥ 3.51	580	30,85%	23.814	31,65%	636	98%
Jumlah		1.880	100,00%	75.231	100,00%	651	100%
Total Mahasiswa				77.762			

Data per tanggal 22/01/2025

Untuk mempertahankan perolehan pengakuan kualitas dari berbagai lembaga akreditasi dan sertifikasi, baik nasional maupun internasional, UT memiliki Kantor Penjaminan Mutu (KPM) yang bertugas sebagai pelaksana penjaminan mutu di lingkungan UT. Sistem penjaminan mutu yang diterapkan UT berupa Sistem Manajemen Mutu (SMM) telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan manajemen yang lebih berkualitas. Pengakuan terhadap kualitas UT diperoleh dari lembaga akreditasi nasional maupun internasional, seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT), Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM), *International Organization for Standardization* (ISO), serta perolehan sertifikat sebagai penyelenggara Pendidikan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) dari *International Council for Open and Distance Education* (ICDE). Terkait dengan akreditasi, prodi yang memperoleh akreditasi A sebanyak 14 prodi (29%), Unggul sebanyak 4 (8%), B sebanyak 22 Prodi (46%), Baik sebanyak 6 (13%), dan Terakreditasi Sementara sebanyak 2

(4%). Selain itu, UT juga memperoleh Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dengan peringkat A berdasarkan Surat Keputusan BAN-PT Nomor 1282/SK/BAN-PT/Ak/PT/VII/2024 (Gambar 1.1).



Gambar 1.1
Akreditasi Institusi dan Program Studi

Selain itu, UT memimpin Konsorsium Pengembangan Pembelajaran Dalam Jaringan Indonesia atau yang dikenal dengan *Indonesia Cyber Education Institute* (ICE Institute) yang beranggotakan 13 (tiga belas) universitas terkemuka dan 1 (satu) asosiasi penyelenggaraan program studi di Indonesia, serta memiliki 55 mitra.

Seiring waktu, tuntutan kualitas pendidikan dan layanan dari masyarakat, pemerintah, badan akreditasi, serta asosiasi internasional seperti *Asian Association of Open Universities* (AAOU) dan ICDE terus meningkat. Menjawab kebutuhan ini, UT mengintegrasikan berbagai standar kualitas dari lembaga akreditasi dan sertifikasi ke dalam kerangka baru Sistem Jaminan Kualitas (Simintas) yang disebut **Simintas UT 2024**. Penyempurnaan Simintas UT 2024 disesuaikan dengan regulasi pemerintah terbaru, persyaratan BAN PT, LAM, hasil tinjauan kualitas ICDE melalui *Quality Review*, AAOU QA Framework, dan standar ISO. Jumlah area mutu meningkat dari 10 menjadi 12, sementara kebijakan kualitas bertambah dari 110 menjadi 143.

Pada 22 Desember 2024, UT memperoleh sertifikat ISO 27001:2022 untuk Direktorat Sistem Informasi (DSI) yang memastikan bahwa sistem keamanan informasi UT selalu terjaga dengan baik. Selain itu, pengakuan kualitas layanan pendidikan UT pada lingkup internasional

diperoleh dari ICDE dalam bentuk *Quality Certificate* secara periodik sejak tahun 2005, 2010, 2016, 2020, dan 2023. Untuk mempertahankan pengakuan tersebut, UT akan terus melakukan review kualitas dengan tujuan memastikan bahwa standar kualitas dan penyediaan layanan terhadap mahasiswa UT terus terjaga dan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Diperolehnya sertifikat kualitas dari ICDE ini menunjukkan adanya pengakuan bahwa UT telah menyelenggarakan PTJJ sesuai dengan standar kualitas penyelenggaraan PTJJ di level internasional.



Gambar 1.2
 Rekognisi dan Sertifikasi

UT juga telah mendapatkan akreditasi internasional untuk 4 program studi, dari *Foundation for International Business Administration Accreditation* (FIBAA). Selanjutnya, UT juga telah berhasil mendapatkan akreditasi level 3 dengan kategori Baik dari *Asian Association of Open Universities* (AAOU) pada tanggal 17 Oktober 2024. Pengakuan lainnya yang

diperoleh UT adalah pencapaian peringkat ke-301 di UI *GreenMetric World University Rankings* pada 11 Juli 2024, sedangkan pada tingkat nasional mendapat peringkat ke-35 (Gambar 1.2).

Dalam kancah internasional, UT mendapat kepercayaan dari *Asian Association of Open Universities* (AAOU) dengan terpilihnya Rektor UT Periode 2017-2025, Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Presiden AAOU periode 2023-2025 pada Konferensi AAOU ke-35 yang dilaksanakan di Jeju, Korea Selatan yang kemudian dilanjutkan oleh Dr. Mohamad Yunus, S.S., M.A selaku Rektor UT 2021-2025 (melanjutkan sisa jabatan) dan Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi, Kerja Sama dan Bisnis - Rahmat Budiman, M.Hum., Ph.D. sebagai Sekretaris Jenderal AAOU. Selain itu, Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D. juga mendapat mandat sebagai ICDE *Focal Point for Quality Network in Asia*. Penunjukkan UT sebagai pimpinan AAOU ini merupakan kedua kalinya setelah sebelumnya Rektor UT keempat (Prof. Dr. Atwi Suparman) dan dilanjutkan oleh Rektor UT kelima (Prof. Tian Belawati, Ph.D.) juga terpilih sebagai Presiden AAOU tahun 2008-2010.

Universitas Terbuka (UT) juga berhasil meraih predikat *Bronze* dalam *Times Higher Education Online Learning Rankings* (THE OLR) 2024 dan menempati posisi 35 besar dunia. THE OLR melakukan penilaian terhadap institusi pendidikan berdasarkan empat pilar utama, yaitu *Resources*, *Engagement*, *Outcomes*, dan *Environment*. Kontribusi skor tertinggi UT pada pemeringkatan tersebut adalah pada aspek *Outcomes*, yakni mengenai efektivitas pembelajaran daring. Pencapaian ini menegaskan kualitas UT pada bidang *Open and Distance Learning* pada skala global, melampaui beberapa universitas terbuka internasional seperti Anadolu University (Turki) dan Allama Iqbal University (Pakistan).

Dalam aspek sumber daya manusia, pegawai UT terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non-PNS yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di UT. Tenaga Non-PNS dapat dibedakan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Pegawai UT Tetap Non-Pegawai Negeri Sipil (PUT Non-PNS), Pegawai UT Dengan Perjanjian Kerja (PUT PK). Secara keseluruhan jumlah Pegawai UT sampai dengan Desember 2024 berjumlah 2.159 (per Desember 2024). Adapun komposisi Sumber Daya Manusia UT tampak pada Tabel 1.3 berikut.

Tabel 1.3
Komposisi SDM UT

Kategori	Dosen	Tenaga Kependidikan
PNS	726	519
PUT Non-PNS.	20	643
PPPK	15	2
PUT PK	14	220
Jumlah	775	1384
Total SDM UT		2.159

SDM UT juga dapat dibedakan menjadi tenaga pendidik (dosen) dan tenaga kependidikan. Jumlah dosen UT secara keseluruhan per 31 Desember 2024 adalah 775, dengan latar belakang pendidikan minimal tingkat magister (S2). Dosen UT yang telah bergelar Doktor sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 211 dosen (27%) dari total dosen 775 dosen.

Tabel 1.4 menunjukkan komposisi dosen berdasarkan latar belakang pendidikan dan jenis kelamin.

Tabel 1.4
Komposisi Dosen UT Berdasarkan Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin

Kategori	Pendidikan Terakhir		Jenis Kelamin		
	S-2	S-3	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
PNS	550	176	726	317	409
PPPK	-	15	15	11	4
PUT Non-PNS	13	7	20	10	10
PUTPK	1	13	14	6	8
Jumlah	564	211	775	775	

Sementara itu, Tabel 1.5 menunjukkan gambaran dosen UT berdasarkan jabatan fungsional per tahun 2024. Dari tabel terlihat bahwa jumlah dosen dengan kualifikasi Lektor Kepala sampai dengan 31 Desember 2024 sebanyak 122 dosen (16%) dari total dosen sebanyak 775 dosen. Terdapat penurunan 5 orang dosen (4%) dibanding pada tahun 2023 sebanyak 127 dosen, hal ini terjadi karena sebagian sudah naik jabatan fungsional menjadi guru besar dan pensiun. Jumlah Guru Besar (Profesor) sebanyak 31 orang (4%) dari total dosen sebanyak 775 dosen, terdapat kenaikan 4 orang dosen (14,8%) dibanding tahun 2023 sebanyak 27 dosen.

Tabel 1.5
Komposisi Dosen Berdasarkan Jabatan Fungsional Dosen per Tahun 2024

Kategori	Jabatan Fungsional				
	Tenaga Pengajar	Asisten Ahli	Lektor	Lektor Kepala	Profesor
PNS	116	114	360	110	26
PPK	0	0	8	7	0
PUT Non-PNS	1	9	9	0	1
PUTPK	1	1	3	5	4
Jumlah	118	124	380	122	31

Data per 31 Desember 2024

Mulai tahun 2025, jumlah PNS dosen dan tenaga kependidikan terus menurun seiring dengan peningkatan jumlah PNS yang memasuki masa pensiun. Data PNS yang telah dan akan memasuki masa pensiun mulai dari tahun 2025-2029 dapat dilihat dalam Tabel 1.6.

Tabel 1.6
Komposisi PNS yang Memasuki Masa Pensiun pada Periode 2025-2029

STATUS SDM	TAHUN				
	2025	2026	2027	2028	2029
PNS					
Tenaga Pendidik (Dosen)	40	32	32	33	19
Tenaga Kependidikan (Adm)	26	20	28	27	35
Total PNS	66	52	60	60	54

Data per 7 Februari 2025

Dengan banyaknya jumlah dosen dan tenaga kependidikan yang akan memasuki masa pensiun dalam lima tahun ke depan, perlu direncanakan rekrutmen pegawai yang sesuai dengan kebutuhan SDM UT agar dapat memberikan layanan yang optimal kepada mahasiswa. Perencanaan ini harus didasarkan pada analisis kebutuhan SDM yang akurat, mencakup jumlah, kualifikasi, kompetensi, dan distribusi pegawai yang dibutuhkan oleh setiap unit kerja. Langkah ini penting untuk memastikan keberlangsungan kualitas layanan akademik dan administratif, serta mendukung pencapaian target strategis universitas dalam menyediakan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh yang unggul dan berdaya saing global.

Dalam aspek finansial, Laporan Keuangan (laporan penghasilan komprehensif) PTNBH UT tahun 2024 memperlihatkan bahwa pendapatan UT selain dari APBN atau Pendapatan Dana Masyarakat sebesar Rp2.162.229.084.413, meningkat 27% dari pendapatan tahun 2023 sebesar Rp1.709.152.353.512. Sebagai PTNBH, UT dituntut untuk meningkatkan pendapatan dari masyarakat tidak hanya dari biaya pendidikan, namun dari sumber lain seperti pemanfaatan aset, jasa konsultasi dan pelatihan, dan hilirisasi hasil penelitian. Saat ini, pendapatan di luar biaya pendidikan masih belum optimal, yaitu masih di bawah 5% dari total pendapatan dana dari masyarakat. Idealnya, sebagai PTNBH, UT dapat menggali sumber pendapatan non biaya pendidikan hingga mencapai 60% dari total pendapatan dari masyarakat.

Dengan skala operasi dan anggaran yang sangat besar, UT memiliki sistem pengendalian internal untuk menjaga akuntabilitas dan transparansi keuangan, UT mengoptimalkan fungsi dan tugas Kantor Pengawas Internal (KPI) dalam mengaudit keuangan internal UT. KPI telah memanfaatkan Sistem Informasi Audit Internal SPI (SIAIS) dalam melaksanakan tugas pengawasan non akademik yang meliputi manajemen audit, monitoring, dan pengawasan lainnya. Setiap tahun, laporan keuangan UT juga diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP), dan sejak tahun 2012, UT selalu meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Seiring perkembangan teknologi dan tuntutan digitasi, UT secara berkelanjutan telah dan sedang melakukan transformasi digital dan mengintegrasikan seluruh proses digitalisasi dan digitasi menjadi suatu ekosistem untuk menunjang pembelajaran digital atau *Digital Learning Ecosystem* (DLE). Sebagai bagian dari transformasi digital tersebut, telah dikembangkan berbagai sistem dan aplikasi yang terintegrasi dan dapat diakses secara *single sign on* (SSO) melalui *dahsboard* atau *landing page* MyUT.

MyUT dirancang menjadi pintu akses bagi manajemen (MyUT Management), dosen (MyUT Dosen), tenaga pendidik (MyUT Tendik), mahasiswa (MyUT Mahasiswa), dan tutor/instruktur/pembimbing/supervisor (MyUT TIPS). Dalam bidang tata kelola keuangan, untuk optimalisasi efisiensi dan akurasi pengambilan keputusan berbasis data, mulai tahun 2022

UT telah mengimplementasikan sistem informasi tata kelola terintegrasi yang disebut Sistem Informasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan (SIPPP). SIPP merupakan sistem yang mengintegrasikan empat aplikasi utama terkait penganggaran (*e-budgeting*), belanja universitas (*e-expenditure*), pengelolaan asset (*e-asset*), pengadaan (*e-procurement* yang diberi nama *Promise*), dan audit internal (*e-audit*) yang masih dalam tahap pengembangan. My UT Manajemen juga dilengkapi dengan Sistem Informasi Sumber Daya Manusia (SISMA), Sistem Informasi Bahan Ajar (SIBA), Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Simpenmas), dan Sistem Informasi Program Studi (Siprodi).

UT sebagai PTNBH mendapat kesempatan untuk lebih otonom, responsif dan inovatif dalam menghadapi tantangan tersebut. Namun, hal ini juga memerlukan strategi yang efektif untuk mengatasi berbagai tantangan internal dan eksternal, seperti terpusatnya sumber pendanaan dari SPP dan kebutuhan peningkatan infrastruktur TIK. Dalam menghadapi persaingan dengan lembaga pendidikan lain yang menawarkan PJJ, perubahan kebijakan pendidikan, ancaman keamanan data, dan cepatnya perubahan lingkungan strategis, UT harus terus berinovasi dan beradaptasi. Keberhasilan UT dalam menanggapi tantangan ini akan menentukan relevansi dan keberlanjutannya dalam menyediakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas di Indonesia.

1.2 Potensi dan Permasalahan

a. Analisis Potensi

Capaian kinerja UT diukur berdasarkan capaian RPJP UT Tahun 2025-2045 dan Sasaran Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemendikristek yang meliputi: Kualitas Lulusan, Dosen, Kurikulum dan Pembelajaran serta Tata Kelola Perguruan Tinggi Negeri. Capaian kinerja UT mencerminkan relevansi antara target *outcome* saat ini dengan rencana tahap selanjutnya dalam rangka mencapai target Renstra 2025-2029. UT sebagai PTNBH dalam mencapai target perlu memanfaatkan potensi yang ada secara optimal untuk pengembangan dan perbaikan secara berkelanjutan. Beberapa hal yang menjadi perhatian UT adalah bagaimana melakukan peningkatan kualitas dan daya tampung akses pendidikan, karya akademik yang berkualitas dan relevan dalam menyelesaikan masalah dan pembangunan nasional, upaya meningkatkan daya saing global, peningkatan sumber daya, dan tata kelola yang lebih baik.

Beberapa potensi UT yang perlu dimanfaatkan lebih lanjut meliputi:

- 1) Jejaring Layanan Nasional dan Internasional
- 2) Jejaring Kolaborasi Nasional dan Internasional
- 3) Pengakuan secara nasional dan internasional
- 4) Pengalaman Pengelolaan PTJJ yang mumpuni
- 5) Infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi yang mumpuni
- 6) Jejaring mahasiswa dan alumni nasional maupun global
- 7) Sumber daya yang mendukung

Potensi yang kuat untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi bagi seluruh lapisan masyarakat dengan daya jangkauan layanan yang terluas di berbagai wilayah Indonesia melalui keberadaan kantor UT Daerah serta didukung Sentra Layanan UT (SALUT). Hal ini tentu tidak dimiliki oleh perguruan tinggi manapun di Indonesia dengan pelayanan 39 UT Daerah yang

tersebar di berbagai provinsi dan 1 UT Layanan Luar Negeri (UT LLN). Kantor pelayanan ini juga didukung dengan sumber daya manusia yang memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh yang sudah dijalankan selama bertahun-tahun.

Untuk memastikan daya saing di pasar global dan kualitas lulusan, UT memiliki potensi pengalaman yang kuat dalam pendidikan terbuka dan jarak jauh dengan memiliki jejaring global dan berbagai mitra lainnya. Potensi ini masih dapat dikembangkan lebih lanjut dalam memperkuat kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusianya untuk mendukung statusnya sebagai *World Class University* sesuai perkembangan yang ada. Dalam memperluas jejaring global, UT juga aktif dalam berbagai forum perguruan tinggi jarak jauh secara Internasional serta keterlibatan pimpinan UT dalam berbagai forum dan organisasi tingkat dunia. Upaya ini sudah memperlihatkan hasil melalui produktivitas karya akademik di bidang pendidikan terbuka jarak jauh untuk kemajuan pendidikan di Indonesia maupun pengembangan keilmuan melalui karya akademik yang berkontribusi pada pembangunan nasional dan mengatasi isu-isu global.

Pengalaman yang panjang dalam melayani pendidikan jarak jauh dan kerjasama yang luas dengan berbagai mitra, yang dituangkan dalam Rencana Strategi Bisnis Tahun 2021-2025 dan Renstra Antara 2024-2025 UT berpotensi secara terus menerus mengembangkan proses pendidikan yang bertujuan dalam menghasilkan lulusan yang tidak hanya kompeten secara akademis tetapi juga memiliki karakter dan keterampilan yang diperlukan untuk bersaing secara global. Pengalaman UT dengan kapabilitas pengembangan kurikulum dan proses pengajaran berbasis ilmu pengetahuan dan penelitian selalu berkembang mengikuti perkembangan zaman dan teknologi, menjadikan UT sebagai perguruan tinggi yang dapat melakukan peningkatan kualitas lulusan secara berkelanjutan bersamaan dengan meningkatnya *good university governance*.

Tonggak capaian utama Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) pada tahap pengembangan pertama yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2025-2029, adalah Menjadi PTJJ berkualitas dunia berbasis Ekosistem Pembelajaran Digital yang Kuat. Pada tahapan pertama ini, UT akan menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh yang memberikan layanan pendidikan kepada mahasiswa yang didukung dengan ekosistem pembelajaran digital yang kuat pada seluruh proses bisnis UT baik pada bidang akademik dan non akademik. Upaya-upaya ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam upaya meningkatkan kualitas dan reputasi institusi, optimalisasi fungsi *alumni capital* menjadi salah satu aspek penting potensi yang bisa digunakan UT dalam berkembang. UT memiliki banyak alumni yang berkarier di berbagai bidang dan posisi penting. Para alumni dapat meyakinkan masyarakat luas bahwa lulusan UT merupakan lulusan yang berkualitas. Selain itu, alumni UT yang sukses juga dapat menjadi inspirasi bagi mahasiswa UT yang akan menjadi generasi penerus. Selain berkontribusi dalam membangun reputasi, dukungan proses pembelajaran serta penelitian dan pengabdian masyarakat, UT berharap para alumni bisa berkontribusi dari segi finansial dengan memberikan beasiswa bagi mahasiswa UT.

Potensi lain yang dimiliki UT adalah terkait dengan manajemen mutu yang telah diterapkan mendahului perguruan tinggi lainnya karena keunikan “proses bisnis” dan membutuhkan diberlakukannya standarisasi dalam setiap bisnis proses. Kebijakan institusi menetapkan parameter dan kriteria yang harus dicapai dalam perencanaan, proses, dan standar harus dicapai dan dilanjutkan dengan tindakan pengendalian. Pelaksanaan dan pengendalian

standar ini dilakukan melalui proses evaluasi pelaksanaan dan pencapaian standar dengan kegiatan audit mutu internal maupun eksternal. Pengendalian lebih lanjut dilakukan melalui kegiatan tindak lanjut hasil audit yang bertujuan meningkatkan konsistensi penerapan dan capaian standar. Penyelarasan kebijakan ini termasuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan serta pengelolaan institusi secara desentralistik dengan kecakapan kelembagaan. Ini juga berkaitan dengan keberhasilan menjalankan *human capital roadmap* dan transformasi digital sistem manajemen infrastruktur.

Dalam hal pengelolaan dana, integrasi sistem tata kelola dilakukan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, serta efektivitas, efisiensi, dan ekonomi, ekualitas, dan ekuitas (5E). Infrastruktur TIK dikembangkan dan diperkuat secara terintegrasi untuk mendukung tridharma dan *stakeholder*. Riset dan pengembangan infrastruktur TIK menggunakan teknologi terbaru untuk memperkuat posisi UT sebagai *pelopor PTJJ*, meningkatkan ketahanan UT, kompetensi dan kualifikasi SDM, serta penguatan ekosistem pendidikan dengan teknologi ramah lingkungan dan responsif gender. Investasi dana juga diperkuat melalui instrumen yang *profitable*, serta diversifikasi pendanaan sektor usaha dan peningkatan jumlah *revenue generating activities* (RGAs). Semua hal tersebut dibangun dalam jangka waktu yang cukup panjang dan sekarang menjadi potensi yang dapat mendukung UT untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya keuangan.

Sejak berdiri UT menjalankan pembinaan sumber daya manusia sesuai dengan karakteristik organisasi UT sebagai perguruan tinggi terbuka jarak jauh. Selain kompetensi, dibutuhkan SDM yang berkomitmen terhadap pencapaian pendidikan berkualitas tinggi yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat merupakan hal yang mesti dipenuhi. Peningkatan standar didasarkan pada umpan balik dari penerima manfaat layanan dan program yang diberikan. Kurikulum era digital disesuaikan dengan masukan pemangku kepentingan, dengan desain pembelajaran dan bahan ajar yang interaktif dan inovatif. Perencanaan dan pemenuhan kebutuhan SDM modern menjadi penting, bersama dengan peningkatan kepercayaan terhadap pemangku kepentingan UT, peningkatan publikasi nasional dan internasional, serta penguatan kolaborasi penelitian secara nasional dan internasional. Penguatan sistem pengelolaan penelitian, peningkatan kolaborasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat, dan program pemberdayaan masyarakat berbasis teknologi juga menjadi fokus utama.

b. Analisis Permasalahan

Berdasarkan evaluasi kinerja UT, terdapat beberapa permasalahan yang menjadi tantangan UT dalam mewujudkan visi menjadi perguruan tinggi jarak jauh yang berkualitas dunia. Permasalahan ini akan dibahas berdasarkan bidang program kerja yang dijalankan UT sebagai berikut.

1) Kualitas Lulusan yang Berkarakter dan Memiliki Daya Saing Global

Pada tahun 2024, UT memiliki mahasiswa aktif sebanyak 671.967 mahasiswa yang tersebar di seluruh Indonesia dan berdomisili di 54 negara di luar negeri. Peningkatan tren jumlah mahasiswa tentunya memerlukan strategi untuk menjaga dan meningkatkan kualitas lulusan yang memiliki daya saing baik di tingkat nasional atau global. Lulusan berdaya saing global memiliki budaya belajar sepanjang hayat, yang ditunjang dengan kemampuan komunikasi yang baik termasuk bahasa asing dan kemampuan kolaborasi perlu didukung dengan kurikulum yang fleksibel, adaptif, relevan, aplikatif, dan kompetitif.

Kondisi ini merupakan permasalahan sekaligus tantangan bagi UT karena terjadi peningkatan yang signifikan dalam hal jumlah mahasiswa yang harus dilayani. Selain melakukan pemutakhiran kurikulum secara berkala, UT juga harus melakukan penyesuaian terhadap keragaman karakteristik mahasiswa melalui pemutakhiran dan keragaman bahan ajar menyesuaikan pada profil mahasiswa yang diterima. Begitu juga dengan peningkatan kualitas praktik/praktikum dengan sebaran mahasiswa yang lebih luas dibanding sebelumnya. Beban layanan akademik dan layanan bantuan belajar (tutorial) termasuk pemutakhiran kit tutorial, bahan tutorial, dan kualitas tutor menjadi hal yang lebih kompleks dibandingkan sebelumnya. Sistem ujian perlu dikembangkan sehingga dapat mengatasi keterbatasan fasilitas ujian terutama kebutuhan jumlah lokasi ujian dan jumlah pengawas yang semakin banyak yang tidak mudah dalam pengelolaannya.

Selain itu, UT mendukung program dan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pendidikan berkualitas yang bersifat inklusif dan menjangkau seluruh tanah air. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang terbuka bagi siapa saja, dengan latar belakang, serta kondisi yang beragam. UT berupaya mewujudkan pemenuhan layanan pendidikan tinggi bagi mahasiswa bagi penyandang disabilitas dan mahasiswa yang berasal dari daerah 3T (Terluar, Terdepan, dan Tertinggal). Saat ini jumlah mahasiswa disabilitas UT adalah 716 mahasiswa yang tersebar di 28 Provinsi. Jenis disabilitas yang paling banyak adalah tunadaksa sejumlah 377 mahasiswa, tunarungu sejumlah 140 mahasiswa, tunanetra sejumlah 113 mahasiswa, tunagrahita sejumlah 51 mahasiswa, tunawicara sejumlah 17 mahasiswa, tunalaras sejumlah 9 mahasiswa, dan tunaganda sejumlah 9 mahasiswa.

Kebijakan UT untuk mendukung layanan pembelajaran untuk mahasiswa disabilitas diantaranya adalah pengembangan bahan ajar khusus bagi penyandang disabilitas tunanetra. Permasalahan yang dihadapi oleh UT saat ini adalah belum optimalnya infrastruktur, sarana, dan prasarana untuk melayani semua jenis disabilitas. Begitu juga dengan pelayanan mahasiswa yang berada di wilayah 3T yang tidak memadai dalam hal jaringan teknologi serta akses secara geografis.

2) Ketersediaan SDM

Kebutuhan SDM menjadi perhatian secara kualitas dan kuantitas. Terkait dengan karakteristik pembelajaran UT, SDM UT tidak hanya berfokus pada keahlian dibidang materi tetapi juga harus memiliki keahlian spesifik seperti Ahli Instruksional Desain dan Ahli Media pada setiap prodi. Peningkatan jumlah mahasiswa dan sebaran lokasi mahasiswa masih tetap menjadi permasalahan yang mesti diselesaikan. Kebutuhan SDM ini meliputi tenaga pendidik/dosen dan kependidikan serta ketersediaan tutor untuk menjalankan proses kegiatan tutorial yang jumlah kelasnya semakin meningkat. Untuk kebutuhan dosen, saat ini UT perlu segera memenuhi kebutuhan dosen pada beberapa prodi yang ada, serta untuk prodi baru yang akan dibuka. Hal yang mejadi kendala UT saat ini adalah jumlah dosen yang berpendidikan S3 hanya 211 orang dari total 775 dosen, dan jumlah dosen UT yang masih berpendidikan S2 mencapai 564 orang. Untuk itu, UT perlu merencanakan studi lanjut S3 bagi dosen-dosen yang masih berpendidikan S2. Selain standar strata pendidikan juga diperlukan pengembangan persyaratan jenjang fungsional. Jumlah Guru Besar pada akhir tahun 2024 sebanyak 31 dosen, sementara yang berstatus Lektor Kepala sejumlah 122 dosen dari total 755 dosen. Terkait hal ini UT harus memberikan perhatian khusus terhadap permasalahan kenaikan jabatan fungsional ke jenjang Lektor Kepala dan Guru Besar. Begitu juga dengan kompetensi dosen untuk

menjalankan proses pembelajaran jarak jauh yang tidak bisa didapat dari perguruan tinggi konvensional sehingga memerlukan program pengembangan khusus. Begitu juga dengan kebutuhan tenaga kependidikan yang saat ini sebagian besar dijadikan sebagai tenaga fungsional pada beberapa bidang yang membutuhkan sertifikasi kompetensi tertentu. Perlu dikembangkan program khusus oleh UT untuk memenuhi kebutuhan pengembangan kompetensi tersebut karena tidak semua kompetensi tersebut tersedia secara umum.

Peningkatan kebutuhan tutor pada tahap perkembangan UT saat ini akan menjadi permasalahan tersendiri karena sebagian besar tutor yang bertugas merupakan tenaga pendidik yang berasal dari luar UT. Dengan jumlah kelas tutorial saat ini UT masih mengalami kesulitan melakukan pemantauan terhadap proses tutorial untuk memastikan praktik baik tutor dalam menjalankan tugasnya. Meski sudah melalui pelatihan tutor, seringkali terdapat kelemahan pelaksanaan tutorial yang dilaksanakan. Kondisi ini memerlukan peningkatan pola pembinaan dan pengendalian kinerja tutor yang tepat.

3) Layanan Akademik dan Non-Akademik berbasis *Digital Learning Ecosystem (DLE)*

Dalam rangka mendukung pengembangan untuk memberikan layanan optimal kepada mahasiswa, UT perlu secara konsisten mengintegrasikan visi dan misi UT dengan seluruh bisnis proses layanan pembelajaran, aplikasi-aplikasi layanan akademik dan non akademik, perkembangan teknologi informasi, dan peta jalan. Dengan demikian pengembangan UT ke depan memiliki dasar dan arah yang kuat, melalui pengembangan *Enterprise Architecture* UT yang disebut dengan *Digital Learning Ecosystem Architecture* UT.

DLE architecture merupakan cetak biru organisasi yang menyelaraskan visi dan misi organisasi, serta proses bisnis (*business architecture*) dengan teknologi informasi dalam perspektif data (*data architecture*), aplikasi (*application architecture*) dan teknologi (*technology architecture*). Implementasi *DLE architecture* telah dilakukan pada hampir seluruh unit di UT. Beberapa pengembangan sistem dan aplikasi yang telah dilakukan di antaranya dalam mendukung *DLE architecture* adalah pengembangan dan penyempurnaan 1) aplikasi kemahasiswaan (My UT), 2) fitur aplikasi SRS 5G, 3) aplikasi Simpenmas (Penelitian, PkM, seminar, HKI), 4) aplikasi bahan ajar terpadu, 5) aplikasi ujian, 6) aplikasi pembelajaran, 7) aplikasi penjaminan mutu internal dan eksternal, dan 8) aplikasi Sistem Informasi Perencanaan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban (SIPPP). Dalam mewujudkan hal tersebut memerlukan dukungan infrastruktur, kesiapan organisasi, serta ketersediaan SDM dengan kompetensi yang mumpuni.

Infrastruktur yang harus tersedia agar terwujudnya layanan akademik berbasis DLE adalah memastikan jaringan internet pada semua wilayah dan akses mahasiswa terhadap layanan tersedia dengan baik. UT perlu mempersiapkan solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi mahasiswa dalam mengakses jaringan, sehingga layanan akademik dan non akademik berbasis DLE dapat dimanfaatkan dengan baik.

Kesiapan organisasi dalam mengimplementasikan layanan akademik dan non akademik kepada mahasiswa berbasis DLE sangat diperlukan baik secara kompetensi, proses bisnis, kemampuan adaptasi, dan penciptaan nilai baru yang selaras dengan penggunaan teknologi. Untuk itu diperlukan program yang terintegrasi dengan pengembangan SDM dan peta jalan pengembangan teknologi UT.

4) Penguatan Tata Kelola UT PTNBH dan Budaya Kerja

Saat ini, UT memastikan pelaksanaan tata kelola berstandar tinggi, efektif dan efisien. UT sebagai PTNBH dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2022 Tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka dan Peraturan Rektor UT Nomor 1151 tahun 2022 serta Peraturan Rektor Nomor 1311 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UT. Secara umum organisasi UT dibentuk untuk membantu Rektor dalam menjalankan fungsinya. Pengembangan organisasi terus dilakukan untuk menghasilkan struktur yang lebih dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Struktur organisasi UT dibentuk menggunakan model *slim and flat* yang kaya akan fungsi untuk meningkatkan efisiensi waktu dan koordinasi, biaya akses layanan, serta mengurangi adanya tumpang tindih koordinasi. Meskipun sudah memiliki dasar hukum dan konsep yang jelas dalam mengembangkan tata kelola UT yang mengacu pada strategi yang sedang dan akan dijalankan, UT membutuhkan dukungan struktur organisasi yang tepat serta budaya kerja yang sesuai. Struktur dan budaya ini secara dinamis dan berkelanjutan perlu disesuaikan untuk mengikuti perkembangan lingkungan yang berdampak pada strategi.

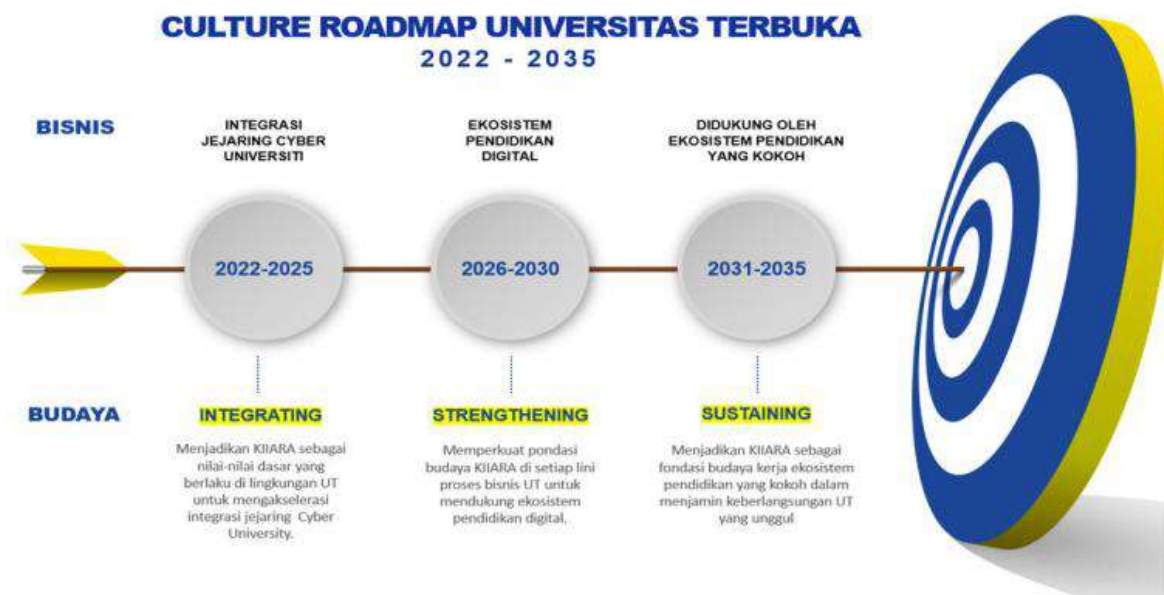
Struktur organisasi UT PTNBH telah mengalami beberapa kali perubahan untuk memastikan seluruh proses bisnis UT dapat berjalan dengan baik. Perubahan struktur organisasi PTNBH berdampak terhadap penyesuaian beberapa proses perencanaan, prosedur dan koordinasi kerja, perubahan tim kerja, penyesuaian kompetensi dan perilaku kerja personil yang ditempatkan pada fungsi dan unit berbeda serta aspek implementasi lainnya. Perubahan struktur UT setelah masa peralihan masih dimungkinkan terjadi dengan berbagai perubahan strategi UT untuk tumbuh. Perubahan strategi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan pada level tertentu akan berdampak pada penyesuaian kembali terhadap struktur UT.

Keberhasilan UT dalam implementasi *Good University Governance* (GUG) dipengaruhi oleh efektivitas peran dan fungsi struktur organisasi. Prinsip-prinsip GUG yang meliputi transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), tanggung jawab (*responsibility*), independensi (*independency*), kesetaraan dan kewajaran (*fairness*) diimplementasikan pada berbagai kegiatan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan untuk mewujudkan visi UT menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia. Tentunya hal ini tidak terlepas dari budaya kerja dan nilai-nilai yang telah dibangun selama ini. Namun dengan ditetapkannya UT sebagai PTN-BH, maka diperlukan nilai-nilai baru yang perlu diinternalisasikan pada setiap personil UT untuk menyesuaikan diri dengan perubahan tersebut. Jika UT tidak dapat melakukan penyesuaian dengan baik maka akan terjadi masalah.

Nilai utama yang melandasi semua aspek eksistensi UT disusun atas beberapa nilai yaitu Kualitas, Integritas, Inovasi, Aksesibilitas, Relevansi, dan Akuntabilitas yang disingkat dengan sebutan KIIARA. Kualitas, diwujudkan melalui produk dan layanan UT yang menjunjung tinggi kualitas sehingga mampu memenuhi harapan seluruh pemangku kepentingan. Integritas, terwujud dalam etika dan standar profesionalisme dalam proses penyelenggaraan UT. Inovasi, terwujud melalui komitmen dan berbagai bentuk terobosan untuk meningkatkan kualitas layanan melalui inovasi pada segala bidang kegiatan. Aksesibilitas, UT dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat tanpa terkendala tempat dan waktu, Relevansi, pengembangan seluruh program UT dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara kontekstual. Akuntabilitas, penyelenggaraan seluruh program UT dilakukan dengan efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Semua nilai-nilai tersebut telah mulai ditanamkan dan diinternalisasi kedalam semua aktifitas dan personil UT.

Sebagai PTN-BH yang baru, UT juga mengalami tantangan dalam perubahan budaya kerja dari budaya birokrasi menuju budaya organisasi korporasi (Budaya PTN-BH). Berdasarkan evaluasi diri dapat diketahui bahwa sebagian besar staf UT sudah memiliki budaya kerja yang efektif, namun pertumbuhan organisasi yang membutuhkan personel baru atas tuntutan untuk memenuhi kekurangan atauantisipasi kebutuhan kedepan. Masuknya personel baru dalam jumlah yang cukup banyak ini dapat saja “tarik menarik” nilai antar personel baru karena berasal dari institusi lain yang beragam yang bisa saja memiliki nilai berbeda dengan kebutuhan UT. Oleh karena itu, permasalahan ini perlu diantisipasi dengan memperkuat sistim pengembangan SDM, kepemimpinan yang kuat dan sistem kerja yang tepat serta diikuti dengan penilaian kinerja staf UT mendukung terhadap pelaksanaan strategi UT.

Berhadapan dengan permasalahan dan tantangan tersebut, maka penguatan budaya korporasi (GCG) yang sudah dirancang sebelumnya perlu terus dilakukan. UT melanjutkan implementasi rancangan tersebut melalui tiga tahapan, yaitu: i) proses menyatukan nilai dari masing-masing subkultur menjadi sebuah rumusan budaya organisasi UT PTNBH yang dapat merepresentasikan seluruh *stakeholder*; ii) proses penanaman nilai-nilai UT PTNBH (KIARA) secara bertahap kepada seluruh pegawai; dan iii) proses penyusunan dokumen pedoman, melakukan penyesuaian peraturan, dan penyusunan *standard operation procedure* (SOP) dengan organisasi tata kelola baru UT PTNBH.



Gambar 1.3
Culture Roadmap UT 2022-2035

5) Sarana dan Prasarana dan Pemanfaatan Aset sebagai Sumber Pendapatan

Seiring dengan perubahan status UT menjadi PTNBH, pengelolaan sarana dan prasarana di lingkungan UT telah diatur oleh Peraturan Rektor UT Nomor 1154 Tahun 2022 yang menjelaskan bahwa Barang Milik UT adalah semua barang selain tanah yang berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dan ditetapkan sebagai kekayaan awal dan yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. Direktorat Manajemen Aset, Umum, Pengadaan Barang dan Jasa (DMAUPBJ) adalah unit yang berada di bawah Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Umum yang bertanggung jawab atas penatausahaan, pengelolaan, dan penyusunan laporan serta neraca BMUT.

Pada tahun 2024, UT memiliki tanah, baik yang berada di UT Pusat dan Daerah, seluas 374.611 m² (tanah yang dikuasai oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) seluas 364.120 m² dan tanah yang dikuasai oleh UT sebagai PTNBH seluas 10.491 m²) dengan luas bangunan 134.491 m². Dalam laporan tahun 2024, aset peralatan dan mesin yang dimiliki UT tercatat sebanyak 87.293 unit, gedung dan bangunan sebanyak 198 unit, jalan dan jembatan sebanyak 1.014 m², irigasi sebanyak 9 unit, jaringan sebanyak 111 unit, aset tetap renovasi sebanyak 4 unit, aset tetap lainnya sebanyak 11.550 unit, dan aset lain-lain sebanyak 277 unit. Keseluruhan aset ini bernilai sebesar Rp 1.083.207.111.975. Sarana penting lain yang menjadi andalan adalah sistem layanan online yang digunakan untuk layanan pembelajaran dan manajemen. UT juga memiliki beberapa server yang memiliki kemampuan melayani ratusan ribu mahasiswa UT dan mahasiswa PT lain yang bekerjasama dengan UT. Dalam menjalankan operasionalnya, UT menerapkan prinsip *sharing economy* untuk penyediaan infrastruktur seperti untuk ruang-ruang ujian dan ruang tutorial.

Peningkatan sarana dan prasarana untuk pembangunan *Learning Center* yang mendukung *Smart Campus* telah dilakukan melalui pengadaan *podcast equipment* di 39 UT Daerah yang digunakan sebagai peralatan penunjang bagi media pembelajaran secara daring. Selain itu, 12 (dua belas) UT Daerah telah dilengkapi dengan Taman Pintar. Taman Pintar ditujukan bagi mahasiswa untuk dapat belajar dan mengakses layanan UT online di area gedung UT Daerah, yaitu UT Pangkalpinang, UT Jayapura, UT Malang, UT Tarakan, UT Medan, UT Palembang, UT Mataram, UT Palu, UT Denpasar, UT Kupang, UT Banjarmasin dan UT Banda Aceh. Beberapa UT Daerah yang telah menempati gedung baru, yaitu UT Denpasar, UT Makassar, UT Padang, UT Bandar Lampung, UT Surabaya, UT Palu, UT Purwokerto yang telah mengusung konsep *green building* dengan memperhatikan aspek hemat energi, ventilasi, pencahayaan, tanaman dalam ruang, atap, dan material yang aman.

Ketersediaan infrastruktur TIK canggih yang dimiliki oleh UT memungkinkan mahasiswa dapat mengakses materi pembelajaran secara daring dari mana saja dan kapan saja. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan digital harus selalu dilakukan. Sementara itu keperluan pembelajaran UT yang dilakukan di luar jaringan seperti menyediakan sarana fisik seperti laboratorium atau fasilitas praktikum belum maksimal, untuk itu diperlukan kerja sama dengan perguruan tinggi atau instansi lain dalam melaksanakan praktikum mahasiswa di berbagai daerah.

Pengembangan bisnis di era UT PTNBH perlu dilakukan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki yang menjadi sumber pendapatan alternatif selain dari Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa dan pembelian bahan ajar. UT memiliki sarana dan prasarana dalam jumlah dan kualitas yang memadai dengan jangkauan layanan yang luas di seluruh Indonesia. Maka dari itu, peluang bisnis dan investasi dalam penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki UT sangat terbuka luas.

6) Inovasi dan Reputasi

UT merupakan pelopor perguruan tinggi di Indonesia yang menawarkan pendidikan jarak jauh dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Seiring dengan perkembangan teknologi, UT terus berinovasi mengembangkan berbagai aplikasi untuk mendukung pembelajaran dan tata kelola universitas. Melalui pendekatan ini, UT dapat menawarkan layanan pendidikan yang lebih fleksibel dan mudah diakses bagi mahasiswa dari berbagai lokasi, dan memungkinkan mereka untuk melanjutkan pendidikan tinggi tanpa hambatan geografis. Inovasi inilah yang turut menciptakan reputasi UT sebagai perguruan tinggi pendidikan jarak jauh yang fleksibel dengan pemanfaatan teknologi.

Keberlanjutan dan inovasi merupakan salah satu faktor penentu kemajuan pendidikan jarak jauh dan tentu akan menjadi permasalahan bagi perguruan tinggi penyelenggaranya. Oleh karena itu berbagai inovasi telah dilakukan UT melalui pengembangan aplikasi-aplikasi pendukung pembelajaran seperti aplikasi BA Digital, MyUT Mahasiswa, MyUT Dosen, SUAKA-UT, dan ProMISe. Aplikasi BA Digital UT merupakan fasilitas mahasiswa untuk mengakses, mengunduh, dan membaca BMP sesuai mata kuliah yang telah diregistrasikan. Sedangkan aplikasi My UT Mahasiswa membantu dalam menghubungkan berbagai aplikasi dalam satu wadah untuk memfasilitasi mahasiswa dalam memperoleh segala informasi terkait dengan kegiatan perkuliahan. SUAKA-UT merupakan *website* yang berisi tentang layanan UT dalam menyediakan materi pembelajaran yang dapat diakses secara gratis oleh masyarakat luas seperti UT-TV, UT Radio, Guru Pintar *Online*, dan materi pengayaan. Dalam bidang manajerial,

UT telah mengembangkan sistem ProMISe yang merupakan sebuah sistem pintar terintegrasi berbasis online yang menyimpan dan mengolah informasi data terkait proses aktivitas pengadaan barang jasa di lingkungan UT. MyUT Dosen membantu dalam menghubungkan berbagai aplikasi dalam satu wadah untuk memfasilitasi dosen dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi. Seluruh aplikasi tersebut perlu dipelihara dan dioptimalkan pemanfaatannya serta dikembangkan kemudahan penggunaan yang akan menjadi permasalahan tersendiri karena banyaknya aplikasi yang mesti digunakan sivitas akademika. Tantangan ini yang mesti dijawab UT ke depan bagaimana semua teknologi tersebut menjadi sesuatu yang mudah diakses dan digunakan dan sangat bersahabat bagi semua pihak yang dilayani UT.

UT juga telah melaksanakan ujian *online* dengan *online proctoring system*. Layanan ujian *online proctoring* merupakan layanan yang bertujuan untuk memberikan kemudahan mahasiswa untuk melaksanakan ujian tanpa terkendala ruang dan waktu. Dengan berkembangnya teknologi AI, maka ini menjadi permasalahan yang dihadapi oleh UT agar kualitas penyelenggaraan ujian tetap terjaga. Di satu sisi AI dapat membantu proses pembelajaran mahasiswa yang perlu juga dipertimbangkan untuk diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran, namun, di sisi yang lain menjadi sesuatu yang “mengganggu” proses pembelajaran dalam hal penugasan, kuis, dan ujian. Perkembangan teknologi AI harus disikapi dengan bijaksana agar AI dapat membantu UT dalam menangani layanan kepada mahasiswa, untuk itu diperlukan inovasi-inovasi yang dapat memanfaatkan AI secara positif.

Proses inovasi yang dilakukan dalam bidang teknologi, UT juga melakukan inovasi dalam bidang akademik dan pembelajaran. Dalam bidang akademik, produk HKI UT mengalami peningkatan dalam satu dekade terakhir. Pada tahun 2024, UT memiliki 109 hasil penelitian yang telah didaftarkan sebagai produk HKI (Hal Kekayaan Intelektual). Perolehan ini masih harus dapat ditingkatkan dengan pembinaan penelitian yang lebih baik. Sementara itu, perlu meningkatkan pemanfaatan produk HKI tersebut, baik oleh pihak industri maupun masyarakat. Inovasi ini tentunya perlu disebar luaskan agar dapat dipergunakan oleh berbagai pihak yang ada di dalam masyarakat. Permasalahan yang dihadapi UT saat ini bagaimana semua karya ini dapat dijangkau oleh masyarakat luas agar memberi dampak yang signifikan bagi masyarakat. Semakin banyak inovasi yang dilakukan serta hasil penelitian yang digunakan maka reputasi UT di dalam masyarakat akan meningkat.

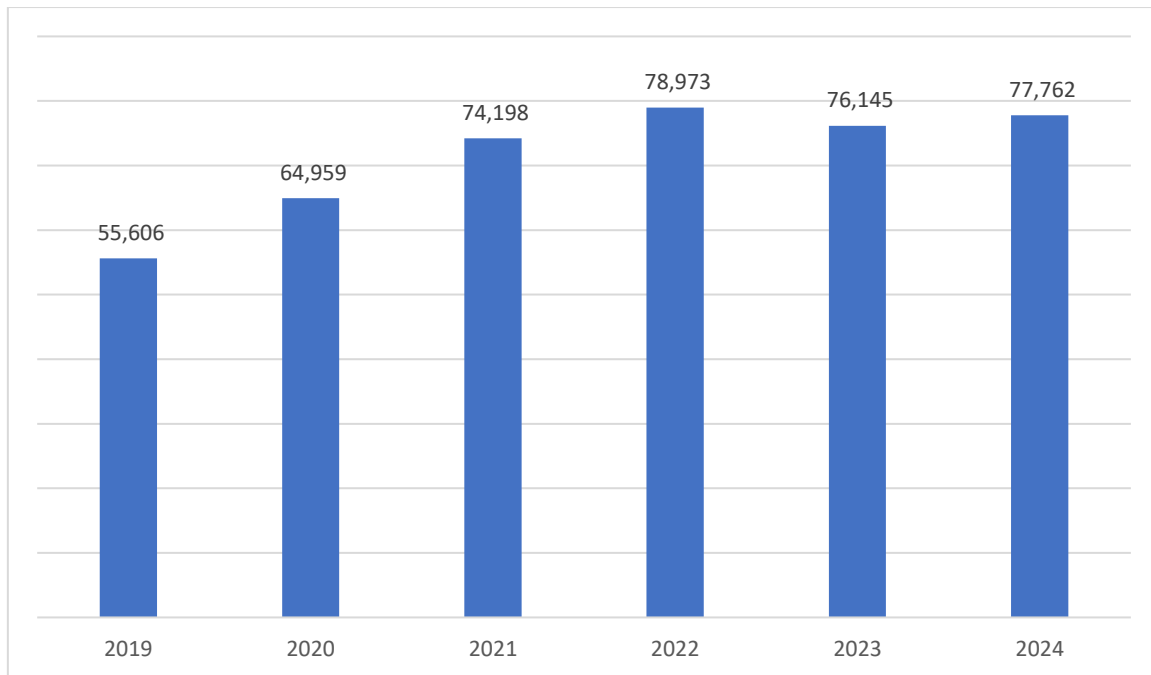
Selain melalui inovasi dan karya karya akademik, reputasi UT juga dapat dibangun dengan menjaga mutu pendidikan dan kualitas luaran UT. Penjaminan mutu dalam bentuk akreditasi PT dan program studi dari Badan Akreditasi Nasional (BAN) PT dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) merupakan sesuatu yang terus dijalankan. UT berkomitmen dan konsisten dalam meningkatkan kualitas keamanan informasi, yang dibuktikan dengan diperolehnya sertifikat ISO 27001:2013 oleh Direktorat Sistem Informasi pada tahun 2024. Selain itu, UT merupakan satu-satunya perguruan tinggi jarak jauh di Asia yang setiap tiga tahun mengundang *International Council for Open and Distance Education* (ICDE) yang berpusat di Oslo, Norwegia, untuk melakukan review kualitas dalam penyelenggaraan pendidikan jarak jauh.

Upaya lainnya yang dilaksanakan UT dalam peningkatan citra dan pengakuan masyarakat yakni dengan ranking perguruan tinggi melalui *Webometric*, yaitu suatu sistem pemeringkat yang memberikan penilaian terhadap seluruh perguruan tinggi melalui aktifitasnya di dunia maya atau website perguruan tinggi. Pada saat ini UT sudah dapat menempati peringkat ke-60 meski memiliki peluang yang besar untuk menempati posisi teratas. Permasalahan yang dihadapi UT saat ini adalah bagaimana semua proses, kegiatan dan isi perkuliahan UT yang sebagian besar berada dalam dunia maya dapat tercatat menjadi poin dalam meningkatkan peringkat *Webometric* tanpa mengganggu kepentingan UT sendiri. Selain itu bagaimana keaktifan mahasiswa yang selalu terhubung dengan aktifitas UT dalam dunia maya menjadi suatu masalah yang perlu ditangani karena keterbatasan akses yang dimiliki mahasiswa pada beberapa wilayah yang dilayani.

Upaya lain untuk meningkatkan rekognisi publik dilakukan dengan menyelenggarakan layanan PJJ sebagai pelopor PTJJ yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Pembelajaran dalam Jaringan Indonesia (UPPDJI) atau disebut ICE Institute. Dalam melaksanakan kegiatan ini, UT bekerja sama secara konsorsium dengan beberapa perguruan tinggi dalam dan luar negeri. Konsorsium ICE Institute dan sudah melayani 12.403 peserta pada tahun 2024. Peningkatan citra UT dilakukan juga melalui pengembangan produk UT seperti Bahan Ajar (BA) Digital yang digunakan melalui ruang baca virtual mencapai 8.929.066 hit. Selain BA Digital, UT terus berupaya meningkatkan jumlah pengguna layanan UT *online* (kalender akademik, registrasi *online*, upload karya ilmiah, toko buku *online*, layanan belajar online, SUAKA UT), jumlah pengguna mencapai 2.164.188 orang. Terkait Sistem Ujian Online (SUO), trennya menunjukkan peningkatan dari 2024.1 sejumlah 1.118.305 NIM mata kuliah ke 2024.2 sejumlah 1.807.909.

7) Peran Alumni

Sebagai salah satu perguruan tinggi negeri di Indonesia, UT telah menghasilkan alumni dengan beragam latar belakang, pengalaman, dan cerita sukses mereka sendiri. Banyak dari alumni UT adalah individu yang memiliki komitmen kuat untuk mengejar pendidikan tinggi meskipun memiliki keterbatasan waktu, lokasi, atau keterampilan.



Grafik 1.1
Jumlah Lulusan UT Tahun 2019 - 2024

Jumlah alumni UT (Grafik 1.1) yang besar memiliki potensi yang luar biasa bagi UT sebagai kekuatan untuk bisa tumbuh berkembang lebih baik lagi. Permasalahannya adalah sudah berapa besar potensi ini telah dimanfaatkan bagi kemajuan UT.

Melihat potensi alumni yang cukup besar tersebut maka perlu dibuat kebijakan pengelolaan alumni UT. Alumni memiliki peran yang penting dalam berbagai aspek kehidupan dan perkembangan UT antara lain dapat memberikan dukungan finansial, membangun jejaring kerja sama, pengembangan karir, serta menjadi duta bagi UT yang secara langsung maupun tidak langsung dapat membantu dalam sosialisasi promosi UT. Dalam jangka panjang dengan pengelolaan alumni yang baik dapat memajukan dan mengembangkan UT serta memberikan manfaat bagi masyarakat secara lebih luas. Perlu menjadi perhatian untuk mengaktifkan IKA UT daerah dalam membangun jaringan di setiap wilayah UT Daerah. Hal ini tentu dikelola oleh unit kerja alumni yang menjadi jembatan antara UT dan alumninya.

Pada tahun 2021 telah disusun *roadmap* alumni dengan visi membangun hubungan alumni yang berkelanjutan. Strategi berkelanjutan untuk membangun *Sustainable Alumni Connection* (SAC) melalui *alumni funding*, *employment reputation*, *alumni engagement* dan *alumni clustering* (Gambar 1.4). gambar dengan rincian sebagai berikut:

a. *Alumni Funding*

Merupakan bentuk partisipasi alumni yang berupa uang maupun bantuan dalam tujuan untuk memberikan kontribusi kepada UT yang dapat disalurkan melalui program beasiswa, riset maupun penyertaan modal untuk anak usaha dalam rangka memberikan dukungan untuk kemandirian finansial.

b. *Employment Reputation*

UT memiliki sebaran alumni di berbagai negara dengan berbagai pekerjaan. Dengan membangun atau melakukan *tracer* terhadap alumni maka akan dapat mendongkrak ranking UT dalam *THE Impact Ranking*.

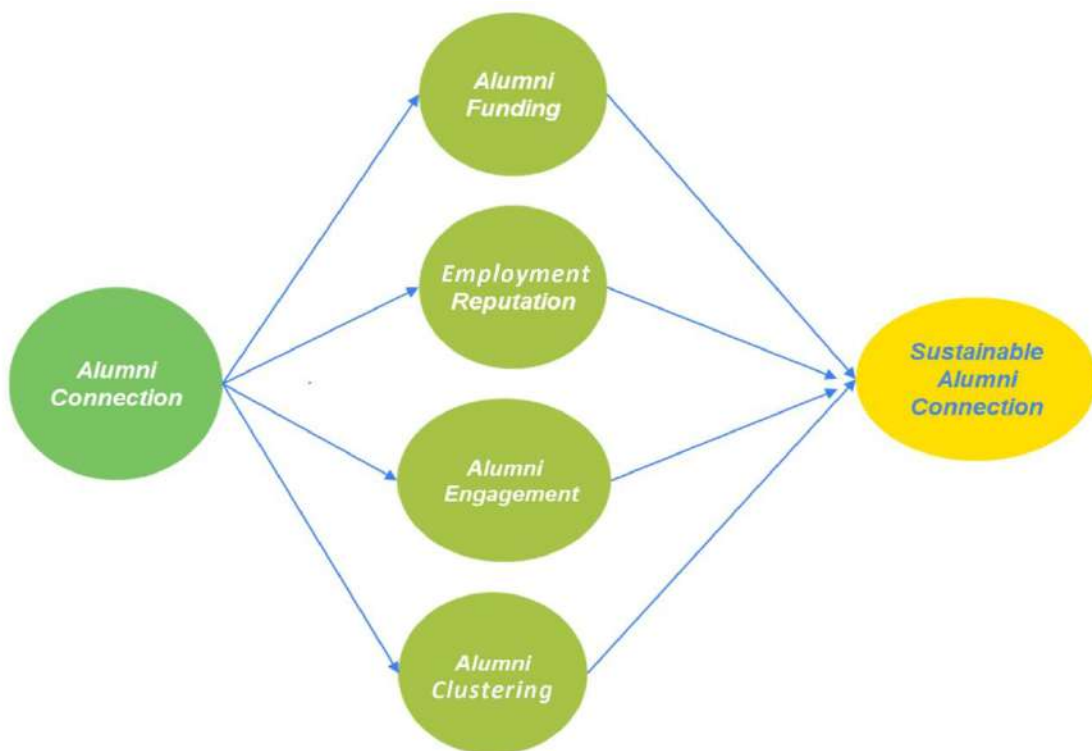
c. *Alumni Engagement*

Membangun keterikatan alumni dengan Universitas dengan berperan pada pengembangan Universitas antara lain pengembangan kerja sama dengan institusi alumni.

d. *Alumni Clustering*

Pengelompokan alumni disesuaikan dengan jurusan, pekerjaan, dan lainnya agar dapat saling berkomunikasi antar alumni hingga tercipta komunitas untuk menumbuhkan peran universitas dalam memacu pertumbuhan ekonomi, serapan kerja lulusan, dan keikutsertaan mahasiswa di dunia kerja.

Dengan pengorganisasian yang baik diharapkan *roadmap* tersebut bisa berjalan sehingga pemberdayaan alumni dalam kemajuan UT dapat tercapai.



Gambar 1.4
Skema Strategi Sustainable Alumni Connection
Sumber: Roadmap Alumni UT 2021

8) Kerja Sama dan Kemitraan

Kemitraan merupakan hal yang penting bagi UT dalam menjalankan proses bisnisnya. UT menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai pihak baik dalam penyelenggaraan akademik maupun operasional. Dengan cakupan wilayah operasional yang sangat luas yang mencakup wilayah di seluruh Indonesia bahkan luar negeri, tidak memungkinkan bagi UT bekerja sendiri, namun harus bersinergi dengan berbagai pihak lainnya.

Upaya peningkatan kerja sama terus dilakukan, baik dengan cara memaksimalkan kerja sama yang sudah ada, menambah lingkup/bidang kerja sama baru dari mitra lama dan mencari mitra baru. Pada tahun 2024, inisiasi dan implementasi kerja sama difokuskan untuk mencapai

target jumlah kerja sama berbasis program studi Diploma dan Sarjana yang ditentukan oleh Kementerian kepada UT melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 dengan rincian pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7
Total Dokumen Kerja Sama UT

No	Kategori Mitra	MoU	PKS	Total Kerja Sama	Total Mitra 2024
1	PTN	10	25	35	
2	PTS	22	20	42	
3	Pemerintah	28	11	39	
4	Mitra Luar Negeri	19	13	32	
5	Mitra Lainnya	41	37	78	
Grand Total				226	160

Kerja sama internasional masih dirasakan sedikit dan perlu terus ditingkatkan. Melalui AAOU pada level Asia, dan ICDE pada level dunia, UT berupaya menjalin kerja sama international dalam bidang pendidikan jarak jauh maupun bidang keilmuan. Hal ini menjadi peluang kerja sama Universitas Terbuka di kancan internasional dan menjadikan posisi UT diakui di tingkat internasional.

Kerja sama dengan dunia usaha dan industri (DUDI) juga perlu terus ditingkatkan karena akan banyak memberikan manfaat bagi perkembangan perguruan tinggi, perkembangan riset, pemutakhiran kurikulum dan desain pembelajaran, peningkatan kompetensi mahasiswa, dan kualitas lulusan. Kerja sama dengan dunia industri memungkinkan universitas untuk tetap mengikuti perkembangan terbaru dalam industri. Universitas dapat memperbarui kurikulum mereka berdasarkan kebutuhan nyata dunia kerja sehingga lulusan memiliki keterampilan dan pengetahuan yang relevan dan sesuai dengan tuntutan pasar kerja. Kerja sama dengan dunia kerja memungkinkan universitas untuk menyediakan kesempatan magang dan penempatan kerja bagi mahasiswa. Ini memberi kesempatan bagi mahasiswa untuk mengalami lingkungan kerja sebenarnya dan mengembangkan keterampilan praktis yang diperlukan untuk berhasil di dunia kerja.

Kerja sama antara universitas dan dunia industri membuka peluang untuk melakukan riset kolaboratif. Ini dapat membawa solusi inovatif untuk masalah yang dihadapi oleh industri dan memberikan wawasan baru bagi mahasiswa dan staf universitas. Kerja sama dengan dunia industri dapat membantu universitas mendapatkan dukungan finansial, sumber daya, dan fasilitas yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan penelitian. Bantuan finansial dan dukungan dari dunia industri dapat membantu universitas dalam membangun laboratorium, fasilitas pelatihan, dan program-program unggulan. Kerja sama dengan dunia kerja dapat membantu universitas dalam pengembangan keterampilan *soft skills* seperti kemampuan komunikasi, kepemimpinan, dan kerja sama tim pada mahasiswa. Pengalaman bekerja dengan industri membantu melatih mahasiswa menjadi profesional yang siap dan kompeten di dunia kerja.

c. Analisis Lingkungan Eksternal dan Internal

Analisis terhadap lingkungan eksternal dan internal Universitas Terbuka disajikan dalam bentuk matriks analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity and Threat*) berikut ini (Gambar 1.5).

		Skor Internal Factor Evaluation (IFE) 3,91		
		Strong (3.0 - 4.0)	Medium (0.2 - 2.99)	Low (0.1 - 1.99)
Skor External Factor Evaluation (EFE) 3,96	Strong (3.0 - 4.0)	 1. Growth Concentration through Vertical Integration Growth & Build Sel I Growth & Build Sel II		
	Medium (0.2 - 2.99)	5. Stability Watch Out 5. Growth Concentration through Horizontal Stability Integration No Change in Strategy Profit 6. Growth Partial Closure Business		
	Low (0.1 - 1.99)	7. Growth Concentric Diversification 8. Growth Diversified Conglomerate 8. Retrenchment Bankrupt or Liquidation		

Gambar 1.5
Matriks Internal-External Factor Evaluation (IFE-EFE) -Universitas Terbuka

Setelah dilakukan *scanning* terhadap lingkungan internal dan eksternal, langkah selanjutnya adalah mensintesis faktor-faktor internal dan eksternal tersebut ke dalam tabel analisis. Ringkasan analisis faktor internal dan eksternal berisi masing-masing 37 faktor internal dan 35 faktor eksternal yang dianggap paling strategis. Pada kolom total nilai tergambar kekuatan UT dibanding dengan perguruan tinggi lain dalam menangkap peluang yang tersedia. Hasil analisis internal menunjukkan nilai rata-rata 3,91 dan eksternal menunjukkan nilai rata-rata 3,96. Artinya, UT memiliki peluang untuk berkembang dan memenangkan persaingan sebagai perguruan tinggi penyelenggara PJJ.

BAB II VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1 Visi

Visi UT tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka (PTNBH UT), yakni:

“Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh Berkualitas Dunia”

Melalui visi tersebut, UT berkomitmen untuk melayani seluruh lapisan masyarakat melalui pendidikan terbuka dan jarak jauh. Pada PP Nomor 39 Tahun 2022 dijelaskan bahwa sistem terbuka dan jarak jauh mempunyai makna sebagai berikut. Sistem jarak jauh mengacu pada layanan pendidikan tinggi melalui pendidikan jarak jauh sesuai dengan standar pendidikan nasional. Terbuka mengacu pada sistem pendidikan yang memiliki 4 (empat) karakteristik utama, yaitu waktu, tempat, metode, dan akses.

1. Terbuka dalam hal waktu, memiliki makna bahwa peserta didik dapat memilih waktu yang tepat untuk belajar, termasuk kecepatan dan masa tempuh studi.
2. Terbuka dalam hal tempat, memiliki makna proses pembelajaran tidak dibatasi oleh sekat-sekat ruang kelas. Peserta didik dapat mengakses pendidikan dari tempat mereka berada.
3. Terbuka dalam hal metode, artinya metode pembelajaran disediakan menggunakan beragam modus, teknologi, dan media.
4. Terbuka dalam hal akses, memiliki makna peserta didik dapat mengakses program pendidikan UT secara fleksibel tanpa dibatasi oleh usia, latar belakang ekonomi, gender, serta keterbatasan fisik dan mental.

2.2 Misi

Berdasarkan visi yang ditetapkan, UT memiliki misi untuk:

- a. menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia yang dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat;
- b. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bidang pendidikan jarak jauh yang berkelanjutan dan berkualitas dunia; dan
- c. menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk memberdayakan dan menyejahterakan masyarakat melalui penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3 Tujuan

Visi dan Misi UT dituangkan dalam tujuan UT sebagai berikut.

- a. Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global;
- b. Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global; dan
- c. Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.

Visi dan Misi UT yang diturunkan dalam Tujuan serta Dampak dari Tujuan UT, selaras dengan tujuan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang dapat dilihat pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1
Tujuan UT dan Tujuan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi

Tujuan UT	Dampak dari Tujuan	Tujuan Kemendiknas
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global	1. Pendapatan di atas Upah Minimum Provinsi (UMP) 2. Membuka Lapangan kerja baru 3. Mengurangi Tingkat pengangguran 4. Lulusan yang bekerja pada Perusahaan multinasional 5. Lulusan mempunyai kompetensi setara dengan kompetensi lulusan PTJJ dunia. 6. Lulusan mampu bersaing dengan lulusan PTJJ dunia	1. Meningkatkan kualitas lulusan yang kompeten, inovatif, dan memiliki jiwa kewirausahaan 2. Meningkatkan reputasi Indonesia di mata internasional yang mana perguruan tinggi yang berkualitas akan meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan studi bagi mahasiswa asing dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan
Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global	1. Karya akademik dapat dihilirisasi dan menghasilkan pendapatan 2. Riset dan inovasi menghasilkan materi ajar dan proses pembelajaran yang relevan dan kontekstual 3. Riset dan Inovasi dapat berdampak pada pemberdayaan masyarakat	1. Mendorong pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan hilirisasi hasil riset sehingga perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa
Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global	1. Masyarakat berdaya dan sejahtera	1. Memecahkan masalah sosial melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat sehingga perguruan tinggi dapat berkontribusi dalam mengatasi berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, dan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN STRATEGIS, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan Strategis

Dengan status UT menjadi PTN BH tersebut, UT memiliki otonomi akademik dan non akademik yang lebih tinggi, sehingga dapat mempercepat pencapaian Visi maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Panjang. Pengembangan UT yang dituangkan dalam RPJP 2025-2045 memiliki empat tahap yang terbagi dalam tema strategis untuk mencapai visi menjadi perguruan tinggi jarak jauh berkualitas dunia (Gambar 3.1). Adapun tema strategis tersebut yaitu:

1. Pembangunan Tahap 1 (2025-2029): Menjadi PTJJ berkualitas dunia melalui Ekosistem Pembelajaran Digital yang Kuat
2. Pembangunan Tahap 2 (2030-2034): Menjadi PTJJ berkualitas dunia Melalui Jejaring Pembelajaran Digital yang Luas
3. Pembangunan Tahap 3 (2035-2039): Menjadi PTJJ berkualitas dunia melalui Inovasi Digital Terdepan
4. Pembangunan Tahap 4 (2040-2045): Menjadi PTJJ berkualitas dunia melalui Kepemimpinan yang Kokoh dalam Pembelajaran Digital



Gambar 3.1
Tonggak Capaian Utama RPJP UT Tahun 2025-2045

Tonggak Capaian Utama RPJP Tahap 1

Tonggak Capaian Utama RPJP UT Tahap 1 yang dituangkan dalam Renstra Tahun 2025-2029 adalah “Menjadi PTJJ berkualitas dunia berbasis Ekosistem Pembelajaran Digital yang Kuat”, yang bermakna bahwa UT menjadi PTJJ yang menghasilkan lulusan dengan kualitas dunia melalui ekosistem pembelajaran digital yang handal.

Tahapan Rencana Pengembangan Jangka Panjang (RPJP) Universitas Terbuka terbagi menjadi 4 (empat) tahap untuk 5 (lima) bidang, meliputi bidang akademik, non akademik, kemahasiswaan, penjaminan mutu dan manajemen risiko, serta alumni dan kerja sama. Penjabaran Tonggak Utama Tahap 1 untuk tiap bidang terlihat pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1
Tonggak Capaian Utama Tahap 1 untuk Tiap Bidang Strategis

Bidang Strategis	Tonggak Capaian Utama Tahap 1
Akademik	Mengembangkan kurikulum berkualitas dunia yang fleksibel, adaptif, relevan, aplikatif, kompetitif dengan penguatan karakter dan <i>wellbeing</i> , yang dituangkan melalui bahan ajar, proses pembelajaran dan asesmen, serta diperkuat dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Publikasi melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital (<i>digital learning ecosystem/DLE</i>) untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Non-Akademik	Melakukan transformasi tata kelola dan sumber daya melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital (<i>digital learning ecosystem/DLE</i>) dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko	Memperkuat sistem penjaminan mutu dan manajemen berbasis risiko untuk mendukung transformasi tata kelola ekosistem pembelajaran digital berstandar nasional dan internasional serta pemerataan pendidikan tinggi berkualitas berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia
Kemahasiswaan	Memberikan pelayanan tri dharma dan pemerataan akses pendidikan tinggi dan kegiatan kemahasiswaan melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital (<i>digital learning ecosystem/DLE</i>) yang andal dan terintegrasi di seluruh Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Alumni dan Kerjasama	Penguatan pengelolaan alumni dan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital (<i>digital learning ecosystem/DLE</i>) untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.

3.2 Penguatan Sasaran Strategis

Dalam upaya mencapai Visi, Misi, Tujuan, Tonggak Capaian Utama RPJP Tahap 1, serta Sasaran Strategis RPJP, maka diturunkan menjadi penguatan sasaran strategis Universitas Terbuka, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2
Keselarasan Tujuan dan Penguatan Sasaran Strategis Universitas Terbuka

Tujuan	Penguatan Sasaran Strategis (SS)
Akademik	
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global.	SS 1 Mengembangkan kurikulum berkualitas dunia yang fleksibel dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk membangun kesadaran awal tentang green industry, green jobs dan green skills, pada jenjang diploma/vokasi, sarjana, pascasarjana, profesi dan program sertifikat (<i>microcredentials</i>) sebagai bagian dari program lifelong learning melalui penguatan pemanfaatan teknologi digital.
	SS 2 Mengembangkan bahan ajar berkualitas dunia yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.
	SS 3 Mengembangkan proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini (misal AI dan Learning Analytics) untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendukung keterlibatan mahasiswa secara lebih efektif dengan menggunakan platform pembelajaran.
	SS 4 Mengembangkan sistem asesmen yang valid dan reliabel berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.
	SS 5 Memperkuat kolaborasi dengan penyedia teknologi dan pemerintah dalam membangun akses internet untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).
	SS 6 Menata ICE Institute sebagai lokapasar (marketplace) matakuliah daring dan memperkuat keterlibatan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.
	SS 7 Menjalin kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pendidikan dengan DUDIKA, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.

Tujuan	Penguatan Sasaran Strategis (SS)
Menghasilkan karya akademik dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi pembangunan nasional dan pemecahan masalah global	SS8 Mengembangkan dan mempublikasikan hasil riset yang sesuai dengan prioritas UT, nasional dan tren global, seperti inovasi pendidikan digital, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi berbasis teknologi yang diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan global.
	SS9 Menguatkan penelitian multidisiplin yang melibatkan Teknologi Pendidikan dan <i>Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics</i> (STEAM).
	SS10 Mengembangkan riset dengan memanfaatkan data besar (big data) dari platform digital UT untuk mengambil kebijakan pendidikan dan pengembangan strategi pembelajaran UT yang tepat.
	SS11 Menjalin kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas penelitian dengan dudika, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi.
Menghasilkan karya pengabdian kepada masyarakat dalam penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan masyarakat sejahtera dan merespon masalah global.	SS12 Memanfaatkan hasil penelitian bidang ilmu untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dalam rangka ikut serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Mengembangkan program MOOCs sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital praktis, kewirausahaan digital, literasi keuangan, praktik keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
	SS13 Memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga pemerintah daerah, sektor industri, LSM nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur dalam hal berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pengabdian masyarakat sebagai strategi untuk peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.
Non Akademik	
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global	SS 14 Menguatkan konsolidasi antar organ menuju <i>Good University Governance</i> .
	SS 15 Menguatkan tata kelola yang <i>agile</i> dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan kewajaran, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, dan nirlaba.

Tujuan	Penguatan Sasaran Strategis (SS)
	SS 16 Menguatkan sistem manajemen strategik untuk peningkatan kinerja. SS 17 Menguatkan peran UT sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembuatan kebijakan. SS 18 Menguatkan SDM unggul melalui grand design Human Capital Management berbasis teknologi digital SS 19 Menguatkan budaya kerja yang mendukung ekosistem pembelajaran digital UT. SS 20 Mengembangkan sumber pendapatan dari selain biaya pendidikan. SS 21 Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan digital terintegrasi yang transparan dan akuntabel. SS 22 Mengembangkan tata kelola TIK dan platform online yang andal, mudah diakses bagi seluruh stakeholder, serta ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus. SS 23 Mengembangkan infrastruktur TIK di seluruh wilayah UT untuk mendukung pembelajaran digital. SS 24 Menguatkan implementasi UT <i>Green University</i> dalam pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.
Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko	
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global	SS 25 Mengintegrasikan Simintas UT dengan SN Dikti, Standar Internasional, dan peraturan perundang-undangan terkini yang sesuai dengan karakter UT. SS 26 Memperkuat audit/asesmen mutu secara berkala yang terintegrasi dengan ekosistem pembelajaran digital dalam rangka mencapai dan mempertahankan peringkat akreditasi/sertifikasi dari lembaga nasional dan internasional yang diakui oleh pemerintah. SS 27 Memperkuat peran pengelola manajemen berbasis risiko pada tingkat universitas dan unit yang adaptif. SS 28 Perumusan peta dan pedoman manajemen berbasis risiko terbaru sesuai dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tingkat universitas dan unit.

Tujuan	Penguatan Sasaran Strategis (SS)	
Kemahasiswaan		
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global	SS 29	Memperkuat titik akses UT hingga tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.
	SS 30	Memperkuat <i>brand awareness</i> terhadap UT kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
	SS 31	Memperkuat sistem pendukung untuk kesuksesan mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh.
	SS 32	Menguatkan pembinaan minat dan bakat mahasiswa yang komprehensif yang berorientasi prestasi.
	SS 33	Menguatkan program kesejahteraan mahasiswa.
Alumni dan Kerja sama		
Menghasilkan lulusan yang berkarakter, berkompetensi, dan mampu bersaing secara global	SS 34	Memberdayakan alumni untuk mendukung visi, misi, dan tujuan UT.
	SS 35	Menyediakan sistem informasi manajemen (SIM) data alumni.
	SS 36	Menyediakan sistem informasi manajemen (SIM) data kerja sama.
	SS 37	Meningkatkan kerja sama dengan mitra di bidang akademik, non akademik, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) terkini yang mengakomodasi perubahan lingkungan dan Kebijakan yang dinamis.

Keselarasan antara tujuan Universitas Terbuka (UT) dan sasaran strategis dalam Rencana Strategis (Renstra) menjadi landasan utama dalam memastikan tercapainya visi sebagai perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh berkualitas dunia. Penguatan sasaran strategis tidak hanya berfokus pada pencapaian target akademik, seperti peningkatan kualitas pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, tetapi juga memastikan keterpaduannya dengan arah kebijakan nasional yang tercantum dalam program prioritas Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendiknasaintek). Keterkaitan antara isu strategis dengan arah kebijakan Renstra UT serta kebijakan program prioritas Kemendiknasaintek disajikan pada Tabel 3.3 berikut.

Tabel 3.3

Keterkaitan antara Isu Strategis dengan Arah Kebijakan UT dan Arah Kebijakan Kemendikristek

Isu Strategis Global	Isu Strategis Internal	Arah Kebijakan Renstra UT 2025-2029	Arah Kebijakan Program Prioritas Kemendikristek
Perubahan cepat di bidang teknologi, terutama munculnya kecerdasan buatan (<i>Artificial Intelligence</i>)	Inovasi dan Reputasi Kerja Sama dan Kemitraan	SS 8	Pengembangan Talenta Sains dan Teknologi
		SS 9	
		SS 10	
		SS 11	
		SS 12	
Tekanan finansial	Ketersediaan SDM	SS 13	Penumbuhan dan Penguatan Budaya Ilmiah (Scientific Culture) Penelitian dan Pengembangan Penyelesaian Permasalahan sosial dan Ekonomi Nasional
		SS 18	
		Tata Kelola UT PTNBH dan Budaya Kerja	
		SS 14-17	
		SS 19-21	
Tantangan kualitas pendidikan	Sarana dan Prasarana dan Pemanfaatan Aset sebagai Sumber Pendapatan	SS 20	Akses Pendidikan Tinggi Relevan, dan Bermutu, dan Berdampak
		SS 22-24	
		Kerja Sama dan Kemitraan	
		SS 11, SS 13	
		SS 17	
Tantangan kualitas pendidikan	Kualitas Lulusan yang Berkarakter dan Memiliki Daya Saing Global	SS 36, SS 37	Akses Pendidikan Tinggi Relevan, dan Bermutu, dan Berdampak
		• SS 1-13	
		• SS 25-28	
		• SS 30-31	
		• SS 32-33	
Tantangan kualitas pendidikan	Layanan Akademik dan Non-Akademik berbasis <i>Digital Learning Ecosystem</i> (DLE)	• SS 22-23	Akses Pendidikan Tinggi Relevan, dan Bermutu, dan Berdampak
		• SS 25-29	
		• SS 31	
		• SS 33	
		• SS 34-35	
Tantangan kualitas pendidikan	Peran Alumni Kerja Sama dan Kemitraan	• SS 11	Akses Pendidikan Tinggi Relevan, dan Bermutu, dan Berdampak
		• SS 13	
		• SS 36-37	
		• SS 38	
		• SS 39	

Kebijakan Pendapatan dan Pengeluaran Dana

Sumber pendapatan UT bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Selain APBN. Sumber pendapatan APBN meliputi pendanaan gaji dan Tunjangan (Rupiah Murni), Alokasi Bantuan Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH), Bantuan Pendanaan berbasis Indikator Kinerja Utama (IKU), Pusat Unggulan Antar Perguruan Tinggi (PUAPT)/Program Revitalisasi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PRPTNBH)/Pinjaman Luar Negeri (PLN)/Hibah Luar Negeri (HLN)/Rupiah Murni Pendamping (RMP)/Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)/Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), dan pendanaan lainnya dari Ditjen Diktiristek. Sumber pendapatan Selain APBN meliputi dana Masyarakat, Biaya Pendidikan (dari program diploma, sarjana, magister, doktoral, dan lain-lain), Hasil Pengelolaan Dana Abadi, Usaha UT, Pengelolaan Kekayaan UT, APBD, Pinjaman, Hibah, dan Pendapatan lain.

Terkait sumber pendanaan, saat ini pendapatan terbesar UT berasal dari biaya pendidikan dan nonpendidikan. Upaya meningkatkan pendapatan dari biaya nonpendidikan di antaranya melalui: Pendapatan Jasa Layanan Perbankan, Pendapatan Investasi, Pendapatan Layanan Non Akademik, Pendapatan Unit Bisnis.

1. Strategi Pembiayaan

Untuk mendukung pembiayaan kegiatan tridharma dan operasional kelembagaan, UT merancang strategi konkret dalam mengoptimalkan empat pilar utama sumber pendapatan:

a. Uang Kuliah Tunggal (UKT)

UKT akan tetap menjadi komponen utama penerimaan UT, khususnya pada masa transisi menuju diversifikasi pendapatan yang lebih mapan. Strategi optimalisasi UKT dilakukan melalui peningkatan jumlah dan mutu mahasiswa, diversifikasi program studi sesuai kebutuhan pasar, dan penguatan sistem digitalisasi layanan akademik yang efisien dan responsif terhadap mahasiswa. Upaya ini diharapkan dapat menjaga tingkat retensi dan menarik pendaftar baru secara konsisten.

b. Unit Usaha

Pengelolaan unit usaha dilakukan secara profesional dengan prinsip tata kelola korporasi. Unit usaha seperti UT Press, jasa pelatihan dan sertifikasi, percetakan, serta penyewaan fasilitas akan diperkuat melalui restrukturisasi kelembagaan, modernisasi operasional, serta perluasan jangkauan layanan. Setiap unit usaha akan memiliki business plan jangka menengah-lima tahunan yang terintegrasi dalam kerangka keuangan universitas.

- c. **Kemitraan Strategis**
Kemitraan dengan pemerintah, BUMN, sektor industri, dan organisasi masyarakat sipil akan ditingkatkan, baik dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan berbasis institusi (corporate university), pendampingan teknis, maupun program pembelajaran karyawan. Program kerja sama ini diharapkan memberikan kontribusi pendapatan yang signifikan melalui skema pembiayaan bersama.
 - d. **Hibah Riset dan Dana Kompetitif**
UT mendorong dosen dan peneliti untuk aktif mengakses hibah riset kompetitif nasional dan internasional. Untuk mendukung hal tersebut, UT akan membentuk unit pendamping proposal dan sistem insentif berbasis kinerja. Sinergi antara riset akademik dan dunia industri juga dikembangkan untuk memperbesar peluang pendanaan dari luar APBN.
- 2. Risiko keuangan yang dihadapi**
- UT mengidentifikasi sejumlah potensi risiko keuangan yang perlu diantisipasi, antara lain:
- a. Fluktuasi jumlah mahasiswa, yang berdampak langsung terhadap penerimaan UKT sebagai sumber pendapatan utama.
 - b. Ketergantungan pada UKT, yang mengakibatkan rentan terhadap tekanan ekonomi nasional maupun daya beli masyarakat.
 - c. Pendapatan non-UKT yang masih minim, di bawah 5% dari total pendapatan masyarakat pada 2024, jauh dari target ideal 60%.
 - d. Volatilitas pasar keuangan, yang dapat memengaruhi kinerja investasi jangka panjang, termasuk dana abadi.
- 3. Strategi mitigasi risiko keuangan**
- Untuk mengatasi dan mengantisipasi risiko tersebut, UT menyusun strategi mitigasi sebagai berikut:
- a. **Penyusunan Cadangan Anggaran**
UT akan mengalokasikan dana cadangan dari surplus anggaran tahunan untuk menjamin kelangsungan operasional, khususnya dalam menghadapi ketidakpastian.
 - b. **Diversifikasi Sumber Pendapatan**
UT menargetkan pertumbuhan pendapatan non-UKT secara progresif melalui pengembangan unit usaha, perluasan mitra kerja sama, serta peningkatan kinerja riset dan pelatihan komersial.
 - c. **Penguatan Sistem Keuangan Berbasis Kinerja**
Melalui implementasi Sistem Informasi Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Keuangan (SIPPP), proses penganggaran dan monitoring kinerja keuangan dilaksanakan secara transparan dan akuntabel.
 - d. **Efisiensi Operasional**
Optimalisasi penggunaan sumber daya dan implementasi transformasi digital untuk meningkatkan efisiensi biaya dan produktivitas kelembagaan.

4. Strategi Diversifikasi Pendapatan dan Pendirian Dana Abadi

Dalam rangka memperkuat keberlanjutan keuangan jangka panjang, UT menyusun strategi diversifikasi terstruktur sebagai berikut:

- a. **Pembentukan Dana Abadi (Endowment Fund)**
Dana abadi dirancang sebagai sumber pendanaan jangka panjang untuk mendukung beasiswa, riset strategis, serta pengembangan kapasitas kelembagaan. Dana awal direncanakan dihimpun dari kontribusi alumni, donatur, dan surplus usaha, dengan target nilai pengumpulan sebesar Rp10–25 miliar dalam lima tahun.
- b. **Pengelolaan Unit Bisnis Secara Strategis**
UT akan melakukan audit kinerja tahunan terhadap setiap unit bisnis, menyusun model manajemen berbasis profit center, dan mengembangkan produk layanan berbasis kebutuhan pasar (misalnya pelatihan daring, sertifikasi kompetensi, produk digital learning, dsb.).
- c. **Pemanfaatan Aset dan Sarana Prasarana**
Gedung, laboratorium, studio produksi, dan aset strategis lainnya akan dikembangkan sebagai sumber pendapatan melalui skema sewa pakai, inkubasi usaha, dan program kemitraan publik-swasta.

5. Proyeksi Penerimaan Usaha dan Dana Abadi

Proyeksi penerimaan UT selama periode 2025–2029 diarahkan pada peningkatan proporsi pendapatan non-UKT secara bertahap, sebagaimana dicantumkan pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4
Proyeksi Penerimaan UT

Sumber Pendapatan	Tahun 2024 (Baseline)	Target 2029	Rencana Aksi
UKT dan layanan mahasiswa	95% dari total	≤ 70%	Optimalisasi layanan akademik dan efisiensi operasional
Unit Usaha	<5%	15–20%	Modernisasi dan ekspansi bisnis
Hibah Riset & Pelatihan	<1%	5–7%	Tim proposal riset & pelatihan bersertifikasi
Dana Abadi	Belum aktif	Imbal hasil tahunan 2–3%	Investasi konservatif jangka panjang

Dana abadi akan dikelola oleh unit khusus dengan prinsip kehati-hatian (prudent investment), difokuskan pada instrumen rendah risiko seperti obligasi negara dan deposito syariah, dengan hasil investasi digunakan untuk mendukung program beasiswa dan riset strategis institusi.

Prinsip dan Ruang Lingkup Investasi dan Kegiatan Usaha UT

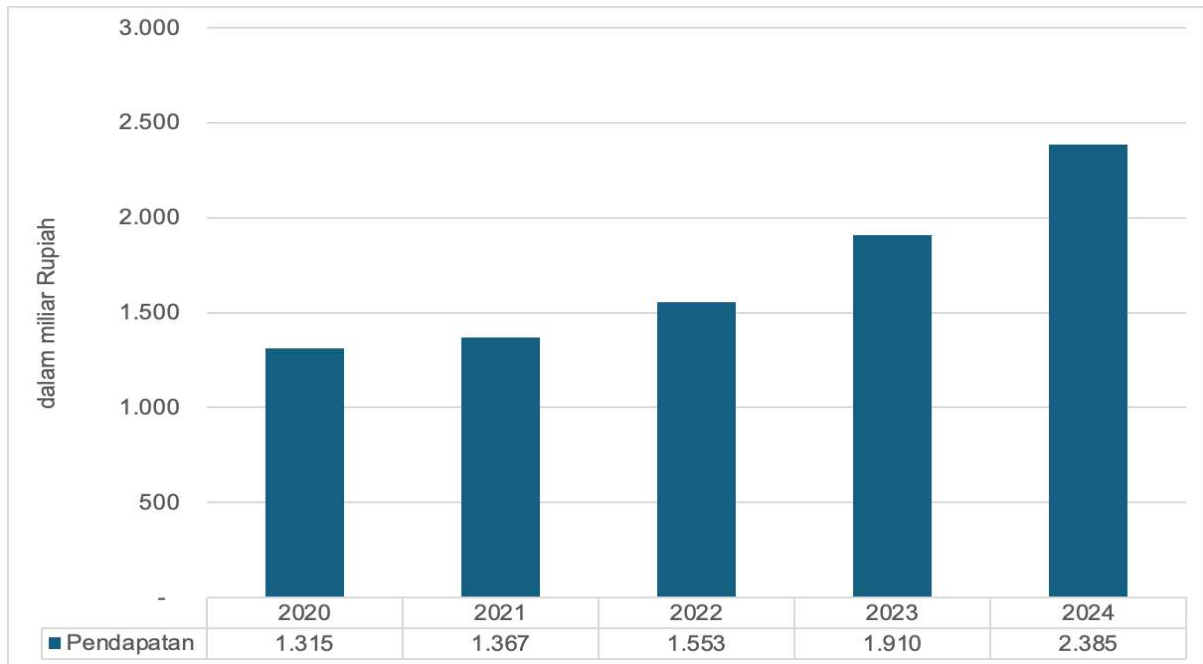
Berdasarkan Peraturan MWA No.6 Tahun 2023 tentang Tata cara pengawasan investasi dan kegiatan usaha, kegiatan investasi dan kegiatan usaha UT dilaksanakan berdasarkan prinsip berikut.

- a. Tata Kelola universitas dan tata Kelola badan usaha yang baik
- b. Kepatuhan pada peraturan perundang-undangan
- c. Keunggulan aspek finansial dan ekonomi
- d. Kestinambungan usaha
- e. Keadilan dan saling menguntungkan
- f. Kemaslahatan bagi sivitas akademika dan pegawai UT
- g. Keselarasan dengan visi dan misi UT

Adapun ruang lingkup investasi dan kegiatan usaha meliputi aspek-aspek sebagai berikut.

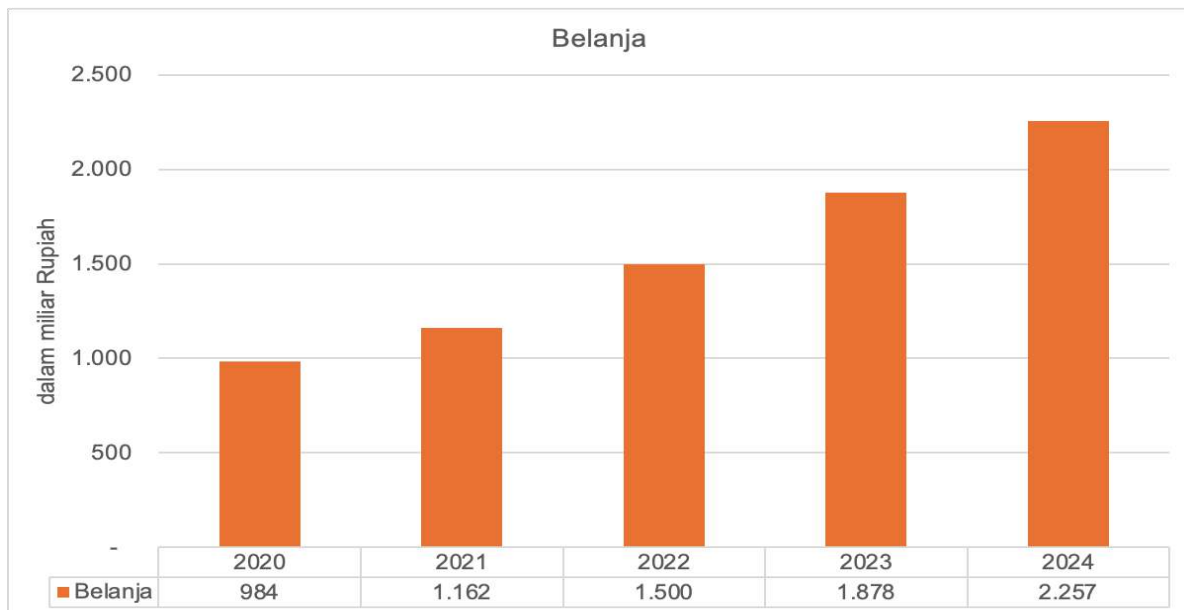
- a. Investasi UT hanya dapat dilakukan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan MWA
- b. UT melakukan investasi peningkatan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan tridharma perguruan tinggi
- c. Selain investasi sebagaimana dimaksud diatas, UT dapat melakukan investasi dalam satuan pengelolaan usaha dalam bentuk badan usaha dan jenis usaha komersial
- d. Investasi UT yang dilakukan baik berbentuk investasi peningkatan sarana dan prasarana maupun satuan pengelolaan usaha harus dilaksanakan berdsarkan studi kelayakan yang menunjukkan adanya manfaat dan/atau rencana usaha yang layak
- e. Investasi dalam bentuk penempatan dana berupa deposito ditempatkan pada 4 (empat) bank umum konvensional terbesar milik negara dan bank umum syari'ah milik negara, serta surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah, ditetapkan oleh Rektor dengan mempertimbangkan Tingkat kembalian yang memadai risiko yang terukur
- f. Investasi dalam bentuk satuan pengelolaan usaha, dapat membentuk BUM UT dengan atau tanpa melibatkan mitra
- g. Kepemilikan UT dalam BUM UT paling sedikit 51 % dari total modal disetor BUM UT
- h. Nilai aset UT yang diinvestasikan untuk usaha komersial jangka panjang paling banyak 20 % dari nilai aset (berdasarkan laporan keuangan yang telah diaudit).

Sebagai gambaran perkembangan pendapatan dan belanja UT dalam lima tahun terakhir seperti terlihat pada Grafik 3.1 dan 3.2 berikut.



Grafik 3.1
Pendapatan UT Tahun 2020-2024

Berdasarkan data pendapatan UT pada grafik 3.1, pertumbuhan pendapatan UT pada periode 2020–2022 meningkat secara moderat dari Rp1.315 miliar menjadi Rp1.553 miliar, dengan rata-rata kenaikan tahunan sekitar 8,6%, seiring peningkatan jumlah mahasiswa yang masih terbatas akibat dampak pandemi covid-19. Pada tahun 2023–2024, pendapatan melonjak dari Rp1.910 miliar menjadi Rp2.385 miliar atau naik sekitar 24,9%, hal ini mencerminkan dampak langsung dari peningkatan jumlah mahasiswa pascapandemi yang didukung oleh akselerasi digitalisasi layanan pendidikan.



Grafik 3.2
Tabel Belanja UT Tahun 2020-2024

Grafik 3.2 menunjukkan belanja UT meningkat secara konsisten dari Rp984 miliar (2020) menjadi Rp2.257 miliar (2024), atau tumbuh 129% dalam 5 tahun yang selaras dengan kenaikan jumlah mahasiswa. Kenaikan belanja tersebut mencerminkan skala operasional yang meningkat untuk mendukung layanan pendidikan jarak jauh seperti produksi dan pengiriman bahan ajar, tutorial, ujian dan layanan lainnya yang langsung dirasakan oleh mahasiswa. Belanja tersebut juga termasuk belanja atas pengembangan infrastruktur TI dan SDM.

3.3 Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta kewenangan organisasi dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran. Kerangka regulasi UT meliputi Peraturan Pemerintah, Peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh MWA, SAU, dan Peraturan-peraturan Rektor yang berlaku. Berikut ini adalah regulasi yang perlu disusun dan direvisi sebagaimana dijelaskan pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5
Regulasi yang Perlu Disusun dan Direvisi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Progress Status
1.	Revisi Peraturan Rektor tentang Penerimaan Mahasiswa	Sesuai dengan PP No. 39 Tahun 2022 Pasal 19, Penerimaan mahasiswa WNI, WNA dan UT wajib mencari dan menjaring calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, calon mahasiswa dari 3T paling sedikit 20% dari seluruh mahasiswa baru dan tersebar pada semua Program Studi.	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	2025	Belum Tersedia
2.	Peraturan Rektor Revisi Pedoman pelaksanaan penyelenggaraan, penyebaran, pemanfaatan, perlindungan penyelenggaraan penelitian	Proses pelaksanaan penyelenggaraan, penyebaran, pemanfaatan, perlindungan penyelenggaraan, perlindungan hasil penelitian perlu menyesuaikan status UT sebagai PTN Badan Hukum. Peraturan komersialisasi hasil penelitian.	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	2025	Belum Tersedia
3.	Revisi Peraturan Rektor tentang Pelayanan dan Penjaminan Mutu Pendidikan	Perlu menyesuaikan dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	2025	Belum Tersedia
4.	Revisi Peraturan Rektor tentang Pembukaan Prodi Baru	Perlu menyesuaikan dengan Permendikbud Nomor 53 Tahun 2023	Direktorat Administrasi Akademik dan Kelulusan	2026	Tersedia, Pertor Nomor 32 Tahun 2025
5.	Revisi Peraturan Pengelolaan Aset PTN Badan Hukum	Sesuai dengan perubahan statuta UT dan PP Nomor 8 Tahun 2020 Pasal 19, Semua Aset yang diperoleh PTN Badan Hukum harus dicatat dalam inventaris barang PTN Badan Hukum. Ketentuan Tata cara pengelolaan Aset diatur dengan peraturan masing-masing pimpinan PTN Badan Hukum. Perlu penyesuaian pedoman Pengelolaan BMUT (Perencanaan, Pengadaan, Pengapusan)	Direktorat Manajemen Sarana, Prasarana, dan Umum	2025	Tersedia beberapa bagian

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Progress Status
6.	Revisi Peraturan Rektor pedoman Pengelolaan Keuangan	Perlu penyesuaian pedoman Pengelolaan Keuangan PTN Badan Hukum	Pusat Pengelolaan Keuangan	2025	Draf Tersedia
7.	Revisi Peraturan Rektor Pedoman Perencanaan dan Penganggaran	Perlu penyesuaian Pedoman Perencanaan dan Penganggaran PTN Badan Hukum	Pusat Perencanaan dan Pelaporan	2025	Draf Tersedia
8.	Peraturan Rektor Pengelolaan Perpajakan PTNBH UT	Perlunya Pedoman dalam Perpajakan PTN BH UT	Pusat Pengelolaan Keuangan	2026	Draf Tersedia
9.	Peraturan Rektor pangkat, gaji, dan tunjangan	Perlu menyesuaikan Pangkat, gaji, dan tunjangan pegawai disesuaikan dengan PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Draf Final
10.	Pangkat, Jenis Kenaikan Pangkat, Kenaikan Pangkat, Gaji, Kenaikan Gaji, Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Pangan, Tunjangan Umum	Perlu menyesuaikan Pangkat, Jenis Kenaikan Pangkat, Kenaikan Pangkat, Gaji, Kenaikan Gaji, Tunjangan Istri/Suami, Tunjangan Anak, Tunjangan Pangan, Tunjangan Umum pegawai sesuai dengan PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Draf Final
11.	Peraturan Rektor Beban Kerja Dosen	Perlu penyesuaian Beban Kerja Dosen dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Belum Tersedia
12.	Rincian Tugas, Beban Kerja, dan Penilaian Kinerja Dosen	Penyesuaian Rincian Tugas, Beban Kerja, dan Penilaian Kinerja Dosen pada PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Belum Tersedia
13.	Jenis tugas belajar, persyaratan, prosedur, hak, kewajiban, sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar	Perlunya penyesuaian Jenis tugas belajar, persyaratan, prosedur, hak, kewajiban, sanksi bagi Pegawai Tugas Belajar dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Belum Tersedia
14.	Peraturan Rektor Mutasi (pemindahan) Pegawai	Perlunya penyesuaian Mutasi (pemindahan) Pegawai dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Belum Tersedia

Arah Kerangka No. Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian, dan Penelitian	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Progress Status
15. Pertor Insentif kinerja	Perlunya penyesuaian Insentif kinerja pegawai dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Pertor induk telah tersedia (Pertor 396 Tahun 2023).
16. Besaran insentif, mulai berlakunya, prosedur dan tata cara pembayaran	Besaran insentif, mulai berlakunya, prosedur dan tata cara pembayaran	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Pertor induk telah tersedia (Pertor 396 Tahun 2023).
17. Peraturan Rektor bantuan hukum	Perlunya pedoman bantuan hukum bagi pegawai di UT	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Draf Tersedia
18. Peraturan Rektor Standar Kompetensi Jabatan	Perlunya penyesuaian Standar Kompetensi Jabatan dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Belum Tersedia
19. SKJ Jabatan Unsur Pimpinan, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana	Perlunya penyesuaian SKJ Jabatan Unsur Pimpinan, Jabatan Fungsional, dan Jabatan Pelaksana dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Belum Tersedia
20. Peraturan Rektor Rincian Tugas	Perlu Penyesuaian Rincian Tugas Pegawai dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Belum Tersedia
21. Rincian Tugas Jabatan Pelaksana	Perlu penyesuaian Rincian Tugas Jabatan Pelaksana dalam PTN Badan Hukum	Pusat Sumber Daya Manusia	2025	Belum Tersedia
22. Peraturan Rektor tentang Jabatan Fungsional Non-Dosen	Perlunya pedoman tentang Jabatan Fungsional Non-Dosen	Pusat Sumber Daya Manusia	2026	Belum Tersedia

3.4 Kerangka Kelembagaan

Pencapaian visi dan misi UT mengacu kepada PP No 39 tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Terbuka dan Peraturan Rektor UT nomor 1151 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UT serta nomor 1311 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Rektor UT nomor 1151 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja UT. Proses pelaksanaan pengelolaan institusi merupakan proses bagaimana organ-organ yang ada bekerja berinteraksi secara sinergi untuk memenuhi kepentingan *stakeholders*. Status PTNBH memungkinkan UT melakukan pengembangan organisasi yang lebih dinamis dan menyesuaikan dengan kebutuhan.

UT menerapkan struktur organisasi *slim and flat* yang kaya akan fungsi untuk meningkatkan efisiensi waktu dan koordinasi, biaya akses layanan, serta mengurangi adanya tumpang tindih koordinasi. Berdasarkan PP No 39 tahun 2022 tentang PTNBH, organ UT terdiri atas Majelis Wali Amanat (MWA), Rektor dan Senat Akademik Universitas (SAU). Rektor sebagai organ yang menjalankan fungsi pengelolaan UT, dimana pada pelaksanaannya, organisasi di bawah Rektor terdiri atas unsur pimpinan; pelaksana akademik; penunjang akademik dan nonakademik; pelaksana penjaminan mutu; pengembang dan pelaksana tugas strategis; pelaksana administrasi; pelaksana pengawasan internal; pengelola usaha; dan unsur lain yang diperlukan.

Kerangka organisasi dan tata kerja UT juga diatur dalam Peraturan Rektor No. 1151 tahun 2022. Pada peraturan Rektor tersebut diatur kedudukan, tugas, dan wewenang; susunan organisasi; wakil rektor; pelaksana akademik; penunjang akademik dan non-akademik; pelaksana penjaminan mutu; pengembang dan pelaksana tugas strategis; pelaksana administrasi; pelaksana pengawasan internal; pengelola usaha; dan unsur lain yang diperlukan.

Pengelolaan sumber daya yang dilakukan di UT berkaitan dengan implementasi *roadmap* sumber daya manusia dan *roadmap ICT architecture* yang mencakup seluruh bidang organisasi seperti integrasi sistem keuangan, pendidikan, dan penjaminan mutu. Implementasi tersebut digunakan untuk meningkatkan transformasi organisasi dan kesiapan dalam percepatan menuju integrasi jejaring *cyber university*.

3.5 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi di UT merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan tinggi jarak jauh. Proses ini melibatkan serangkaian perubahan sistematis dalam struktur organisasi, metode kerja, serta budaya kerja, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Reformasi birokrasi oleh UT dilakukan sesuai dengan visi, misi, dan tujuan UT. Visi UT yaitu “Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh Berkualitas Dunia.” Merujuk pada visi tersebut, maka perlu dilakukan perubahan pada delapan area. Selain itu *Good University Governance* merupakan capaian ideal yang ditargetkan UT dalam melaksanakan pelayanan publik dan mengelola sumber daya.

Untuk mencapai hal tersebut, reformasi birokrasi merupakan langkah strategis dalam rangka melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. UT berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan birokrasi perguruan tinggi berkelas dunia yang ditunjukkan dengan tata kelola yang efektif dan efisien, cepat dan mudah, bersih dan akuntabel, serta memiliki pelayanan publik berkualitas. Reformasi birokrasi yang dilakukan meliputi delapan area perubahan yaitu manajemen perubahan, deregulasi kebijakan,

penataan dan penguatan organisasi, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia aparatur, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan kondisi yang sudah dipaparkan, maka secara umum tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi di UT adalah terciptanya tata kelola yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Kondisi yang ingin dicapai pada tiap-tiap area terlihat dalam Tabel 3.4.

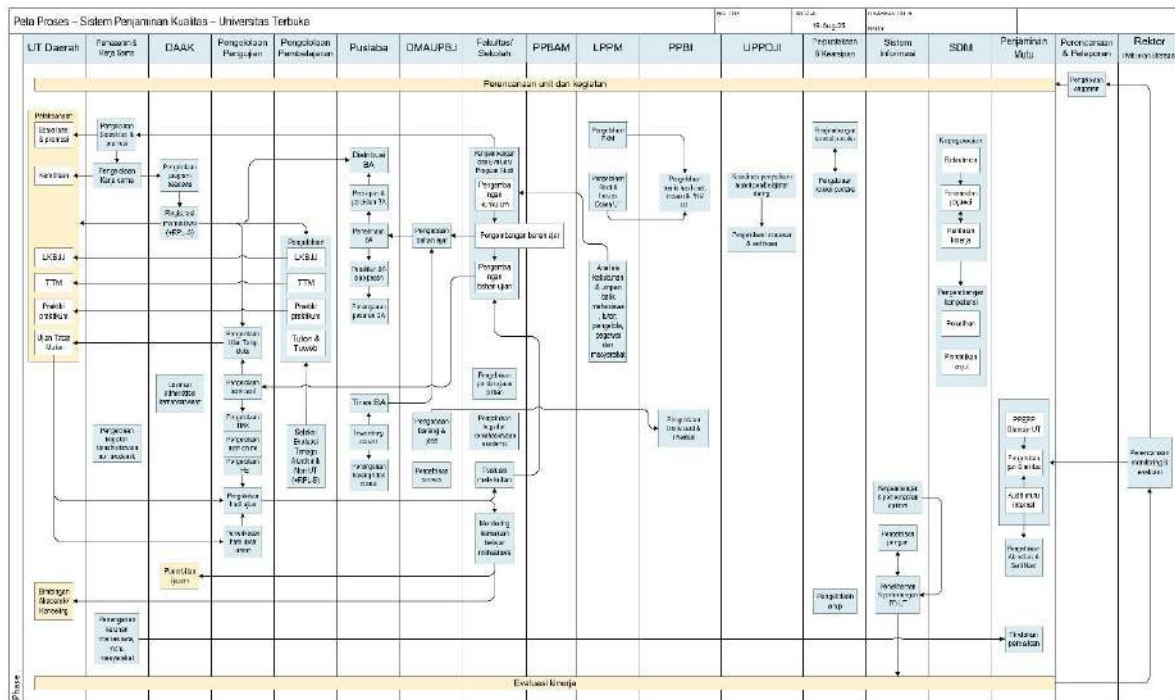
Tabel 3.6
Area Perubahan Reformasi Birokrasi dan Kondisi yang Ingin Dicapai

No.	Area Perubahan	Kondisi yang Akan Dicapai
1.	Manajemen Perubahan	1. Keterlibatan penuh secara konsisten dari pimpinan, dosen, dan staf kependidikan di UT dalam mengimplementasikan reformasi birokrasi. 2. Mindset dan budaya kerja yang lebih progresif di kalangan dosen dan staf kependidikan di UT, terutama dalam menanggapi perkembangan zaman, yang lebih adaptif dan inovatif. 3. Tingkat penolakan atau ketidaksiapan terhadap perubahan di UT yang semakin rendah, sehingga menghasilkan respon yang lebih cepat dan positif terhadap kebijakan baru. 4. Keberadaan dan penerimaan budaya perubahan di UT yang semakin terintegrasi, menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif dan kolaboratif 5. Jumlah fakultas/unit kerja yang menerapkan Zona Integritas, yang lebih luas dan merata di seluruh lingkungan UT.
2.	Penataan Kebijakan	1. Keselarasan kebijakan UT dengan aturan-aturan yang berlaku di tingkat yang lebih tinggi. 2. Koordinasi kebijakan antar sektor di UT, seperti akademik, administrasi umum, keuangan, kemahasiswaan, dan kerjasama yang lebih efektif dan responsif. 3. Kualitas pembuatan kebijakan di UT yang terstruktur dan sistematis. 4. Sistem dokumentasi kebijakan yang terorganisir dan mudah diakses. 5. Tersedianya informasi mengenai kebijakan UT yang lebih mudah diakses oleh seluruh civitas akademika. 6. Kepatuhan dan konsistensi dalam penerapan kebijakan di kalangan civitas akademika UT yang lebih merata.
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	1. Tugas pokok dan fungsi setiap unit diatur dengan jelas, sehingga tidak terjadi tumpang tindih (<i>overlap</i>). 2. Kemampuan unit kerja dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi utamanya secara andal dan profesional. 3. Struktur organisasi yang lebih ramping, sehingga koordinasi antar unit lebih cepat, kinerja meningkat, dan keputusan lebih efektif. 4. Jalinan kerja sama dan berbagi sumber daya dengan berbagai mitra dalam pelaksanaan tridharma perguruan tinggi yang optimal. 5. Integrasi Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam seluruh proses akademis dan non-akademis.

No.	Area Perubahan	Kondisi yang Akan Dicapai
4.	Penataan Tatalaksana	1. Sistem penjaminan kualitas yang komprehensif dan terimplementasi. 2. Standar pendidikan Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh (PTTJJ) yang meningkat berdasarkan evaluasi dari ICDE dan AAOU <i>Accreditation Board</i>. 3. Status akreditasi A/Unggul/Internasional. 4. Pengembangan dan implementasi <i>e-government</i> secara menyeluruh. 5. Penggunaan <i>e-procurement</i> yang lebih sempurna dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa. 6. Pemanfaatan sistem manajemen aset yang didukung oleh Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 7. Sistem informasi dan dokumentasi yang terintegrasi.
5.	Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Aparatur	1. Strategi pengelolaan sumber daya manusia yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan. 2. Keterampilan dan keahlian sumber daya manusia di tingkat nasional dan internasional. 3. Keberhasilan implementasi <i>roadmap human capital</i> yang melingkupi sistem rekrutmen, pengembangan (<i>talent pool, career path</i>), kompetensi, ketersediaan atau kecukupan jumlah SDM), Rotasi/mutasi Pegawai, Penetapan kinerja individu pegawai, Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai dan <i>retirement</i>. 4. Jumlah kualifikasi dan keahlian yang lebih tinggi untuk posisi fungsional Dosen dan fungsional Tenaga Kependidikan. 5. Penggunaan sistem manajemen SDM berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK).
6.	Penguatan Akuntabilitas	1. Kualitas perjanjian kinerja dan pencapaian perjanjian kinerja yang meningkat. 2. Keselarasan Rencana Strategis UT dengan Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. 3. Aplikasi terintegrasi yang mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 4. Ketersediaan akses informasi terkait perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan serta anggaran untuk pengguna internal dan eksternal sesuai dengan kebutuhan dan otoritas yang berlaku. 5. Perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam Pengelolaan Keuangan.
7.	Penguatan Pengawasan	1. Sistem pengawasan atas penerimaan gratifikasi. 2. Implementasi sistem pengawasan internal yang efektif. 3. Mekanisme penerimaan dan penanganan keluhan dari masyarakat. 4. Pelaksanaan sistem pelaporan pelanggaran (<i>whistleblowing</i>) yang optimal. 5. Penanganan <i>conflict of interest</i> dalam setiap proses bisnis di UT secara transparan dan akuntabel.
8.	Penguatan Kualitas Pelayanan Publik	1. Kualitas pelayanan publik yang lebih cepat, murah, aman, dan mudah dijangkau pada setiap unit yang ada di UT. 2. Jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional pada setiap unit di UT yang semakin banyak 3. Indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh unit yang ada di UT memperoleh nilai lebih tinggi.

3.6 Kerangka Penyelenggaraan Bidang Akademik dan Nonakademik

Kerangka penyelenggaraan bidang akademik dan non-akademik Universitas Terbuka (UT) mengacu pada peta proses bisnis (Gambar 3.2) dan dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (Simintas) UT tahun 2024.



Gambar 3.2
Peta Proses Bisnis UT

Simintas UT mengintegrasikan berbagai standar mutu nasional dan internasional guna mendukung penyelenggaraan pendidikan tinggi jarak jauh yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Arah Kebijakan Strategis dan Tata Kelola

Rector menetapkan arah kebijakan strategis melalui Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan yang dijabarkan menjadi sasaran dan indikator kinerja strategis. Selanjutnya, Pusat Perencanaan dan Pelaporan (Pusrenpor) menjalankan fungsi perencanaan dan pengelolaan anggaran, meliputi identifikasi kebutuhan, pengalokasian sumber daya, serta pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program. Proses ini dijalankan secara terintegrasi dalam kerangka PPEPP (Perencanaan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).

Penyelenggaraan Akademik

Penyelenggaraan bidang akademik dilakukan melalui serangkaian proses yang mencakup: (1) pengembangan program studi, (2) pengembangan mata kuliah dan bahan ajar, (3) pelaksanaan pembelajaran, (4) asesmen hasil belajar, serta (5) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Seluruh proses didesain untuk menjamin ketercapaian capaian pembelajaran lulusan dan peningkatan mutu pendidikan secara berkelanjutan (Tabel 3.5).

Penyelenggaraan Non-Akademik

Bidang non-akademik mendukung kelancaran proses akademik melalui pengelolaan sumber daya manusia, prasarana, sistem informasi, layanan administrasi mahasiswa, serta kemitraan dan promosi. Area ini juga mencakup pengelolaan keuangan, pengembangan SDM, dan layanan kesejahteraan mahasiswa (Tabel 3.5).

Penjaminan Mutu dan Evaluasi Berkelanjutan

UT menekankan penerapan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal. Sistem ini memastikan bahwa semua standar pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sistem pendukung lainnya berjalan sesuai dengan kebijakan mutu dan peraturan yang berlaku. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui Audit Mutu Internal (AMI), asesmen eksternal, dan rapat tinjauan manajemen (Tabel 3.5).

Tabel 3.7
Kerangka Penyelenggaraan

Aspek	Deskripsi	Unit Pelaksana
Kebijakan dan Perencanaan	Penetapan visi, misi, Renstra, dan indikator kinerja strategis	Rektorat, Pusrenpor
Pengembangan Program Studi	Perancangan kurikulum, pengembangan prodi sesuai kebutuhan DUDI	Fakultas, Sekolah Pascasarjana
Pembelajaran dan Bahan Ajar	Penyusunan RPS, bahan ajar cetak dan digital, layanan Tutor	Fakultas, Puslaba, UT Daerah
Asesmen dan Evaluasi	Penyelenggaraan ujian, evaluasi pembelajaran, pemantauan capaian belajar	Fakultas, Pusjian
Penjaminan Mutu	Pelaksanaan AMI, PPEPP, penyusunan dokumen mutu	Kantor Penjaminan Mutu, Fakultas
Pengelolaan SDM	Rekrutmen, pelatihan, dan evaluasi kinerja pegawai	PSDM
Prasarana dan Teknologi	Pengelolaan infrastruktur digital, sarana pembelajaran, perpustakaan	DSI, Pusat Perpustakaan dan Kearsipan, DMAUPBJ
Layanan Mahasiswa	Registrasi, kemahasiswaan, bimbingan, kesejahteraan, layanan disabilitas	DAAK, UT Daerah
Penelitian dan Pengabdian	Pendanaan, pelaksanaan, publikasi dan integrasi hasil riset	LPPM, Fakultas
Pemasaran dan Kerja Sama	Promosi, kerja sama dengan mitra, pengelolaan MoU	DPKS
Bisnis dan Investasi	Pengelolaan bisnis dan investasi	PPBI, UPPDJI

3.7 Manajemen Resiko

Manajemen risiko dan rencana kontinjensi merupakan hal penting bagi keberlangsungan operasional dan layanan akademik pada Universitas Terbuka. Berbagai skenario risiko besar, seperti pandemi, perubahan kebijakan politik, serangan siber, serta berbagai dinamika global dapat memengaruhi keberlangsungan pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh. Penyusunan strategi adaptif terhadap dinamika tersebut menjadi bagian dari kesiapan institusi dalam menghadapi ketidakpastian dan perubahan yang cepat.

Manajemen risiko dan perencanaan kontinjensi juga merupakan bagian dari tuntutan tata kelola yang baik (*good governance*) bagi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH), sebagaimana direkomendasikan oleh Kemdiktisaintek, Kementerian Keuangan, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). UT sebagai PTNBH dituntut memiliki sistem mitigasi risiko strategis seperti kegagalan hilirisasi riset, konflik kepentingan akademik, penurunan drastis pendapatan non-APBN atau bencana yang menghentikan kegiatan akademik, risiko reputasi, serta risiko operasional seperti kegagalan teknologi informasi, kehilangan data, hingga krisis SDM. Penyiapan rencana kontinjensi yang memadai akan menjadi tolok ukur akuntabilitas dan ketahanan institusi di mata lembaga audit eksternal.

Melalui berbagai program pada Rencana Strategis 2025–2029, UT akan mengembangkan rencana kontinjensi yang bersifat konkret dan aplikatif. Program-program tersebut bersifat terintegrasi dalam sistem manajemen risiko strategis dan operasional, serta disesuaikan dengan kebutuhan dari setiap unit kerja di UT. Dengan memiliki sistem manajemen risiko yang komprehensif dan rencana kontinjensi yang siap dijalankan, UT akan mampu menjamin keberlanjutan operasional dan layanan akademik, serta menjaga stabilitas tata kelola institusi secara berkelanjutan.

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi UT, UT menetapkan tiga puluh tujuh sasaran strategis sebagai kondisi keberhasilan dari setiap program yang ditetapkan. Setiap sasaran dan program strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program Strategis (IKPS). Adapun IKSS dan IKPS UT dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1
Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) dan Indikator Kinerja Program Strategis (IKPS) UT

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
Akademik										
SS 1	Mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk membangun kesadaran awal tentang <i>green industry, green jobs</i> dan <i>green skills</i> , pada jenjang diploma/vokasi, sarjana, pascasarjana, profesi dan program sertifikat <i>microcredentials</i>) sebagai bagian dari program lifelong learning dengan memanfaatkan teknologi digital	IKSS 1.1	Program studi yang menerapkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif sesuai dengan standar nasional dan internasional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kesadaran awal tentang <i>green industry, green jobs</i> dan <i>green skills</i> .	Persentase Program Studi dan Program Sertifikat	80	100	100	100	100	

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 1.1.1	Pengembangan Program Studi yang menerapkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif sesuai dengan standar nasional dan internasional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kesadaran awal tentang <i>green industry, green jobs dan green skills</i>	IKPS 1.1.1.1	Jumlah program studi baru jenjang diploma, vokasi, sarjana, magister, dan doktoral yang menerapkan kurikulum fleksibel, dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif.	Prodi	5	6	7	7	7	Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
		IKPS 1.1.1.2	Jumlah program studi jenjang diploma, vokasi, sarjana, magister, dan doktoral yang menerapkan kurikulum fleksibel, dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif.	Prodi	49	55	56	56	56	Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
		IKPS 1.1.1.3	Jumlah program <i>microcredential</i> untuk mendukung asta cita dalam membangun kesadaran awal tentang <i>green industry, green jobs dan green skills</i> .	Program	1	5	25	49	49	Fakultas, SPs, P2BAM, LPPM, ICE-I
		IKPS 1.1.1.4	Jumlah program studi yang menyediakan layanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Prodi	5	10	15	20	25	Fakultas, SPs

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 1.1.2	Pengembangan Program Studi Internasional	IKPS 1.1.2.1	Jumlah Program Studi Internasional (kelas internasional)	Prodi	0	0	2	4	6	Fakultas, SPs, DAAK, P2BAM, PPPb, PPPu, UT LLN.
		IKPS 1.1.2.2	Jumlah Mata Kuliah Internasional	Mata kuliah	13	18	23	28	33	Fakultas, DAAK, P2BAM, PPPb, PPPu, UT LLN.
SS 2	Mengembangkan bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	IKSS 2.1	Bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	persentase	100	100	100	100	100	
PS 2.1.1	Pengembangan bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	IKPS 2.1.1.1	Bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas termasuk dengan teknologi terkini/multimedia (misalnya: metaverse, game based, AR/VR, dll)	persentase	20	40	60	80	100	Fakultas, SPs, P2BAM

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
		IKPS 2.1.1.2	Bahan ajar berumur kurang dari atau sama dengan 7 tahun	persentase	55	70	85	100	100	Fakultas, SPs,P2BA M
		IKPS 2.1.1.3	Ketersediaan sistem revidi pengembangan bahan ajar secara digital	persentase	25	50	100	100	100	Fakultas, SPs,P2BA M
		IKPS 2.1.1.4	Ketersediaan Bahan Ajar dalam berbahasa Inggris	persentase	3	5	8	10	15	Fakultas, SPs, P2BAM
SS 3	Mengembangkan proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini (misal AI dan Learning Analytics) untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendukung keterlibatan mahasiswa secara lebih efektif dengan menggunakan platform pembelajaran.	IKSS 3.1	Mata kuliah yang menggunakan pembelajaran jarak jauh berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini (misal AI dan Learning Analytics)	persentase	100	100	100	100	100	

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 3.1.1	Pengembangan pembelajaran jarak jauh berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini (misal AI dan <i>Learning Analytics</i>)	IKPS 3.1.1.1	Tersedianya layanan pembelajaran program diploma, sarjana, diploma, vokasi, profesi, magister, dan doktoral yang memanfaatkan teknologi digital yang berkualitas dengan teknologi terkini (pembelajaran berbasis <i>learning companion</i> , pembelajaran kolaboratif, mata kuliah berbasis kasus atau berbasis proyek)	persentase	100	100	100	100	100	Fakultas, SPs, PPPb, Sekolah Vokasi
		IKPS 3.1.1.2	Tersedianya layanan pembelajaran praktik/praktikum program sarjana dan program vokasi yang memanfaatkan teknologi digital yang berkualitas dengan teknologi terkini.	persentase	15	20	25	30	30	Fakultas, SPs, PPPb, Sekolah Vokasi

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 4	Mengembangkan sistem asesmen yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	IKSS 4.1	Tersedianya sistem asesmen yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	persentase	100	100	100	100	100	
PS 4.1.1	Pengembangan sistem asesmen yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	IKPS. 4.1.1.1	Pelaksanaan asesmen tatap muka dan online yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini termasuk sistem remedial.	persentase	50	100	100	100	100	PPPu, DSI, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi, UT Daerah
SS 5	Menguatkan kolaborasi dengan penyedia teknologi dan pemerintah dalam membangun akses internet untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).	IKSS 5.1	Kerja sama untuk penyediaan teknologi/akses internet di daerah 3T.	persentase	100	100	100	100	100	
PS 5.1.1	Penguatan kolaborasi dengan penyedia teknologi dan pemerintah dalam membangun akses internet untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)	IKPS 5.1.1.1	Kerja sama dengan daerah 3T yang dapat mengakses pendidikan tinggi secara online	Kerja sama	40	80	120	160	200	UT Daerah, DSI, DPKS

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 6	Menata ICE Institute sebagai lokapasar (market place) mata kuliah daring dan memperkuat keterlibatan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.	IKSS 6.1	Tersedianya sistem yang terintegrasi untuk mata kuliah daring dan menambah serta memperkuat keterlibatan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 6.1.1	Pengembangan ICE Institute sebagai lokapasar (<i>market place</i>) mata kuliah daring dan memperkuat keterlibatan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.	IKPS 6.1.1.1	Terselenggaranya lokapasar (<i>marketplace</i>) matakuliah daring yang meliputi sistem, program dan kemitraan.	persentase	100	100	100	100	100	ICE
		IKPS 6.1.1.2	Pengguna mata kuliah ICE Institute	Pengguna	40.000	41.600	43.600	45.600	47.600	ICE, Fakultas, Sekolah Vokasi, SPs, UT Daerah, DPKS

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 7	Menjalin kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pendidikan dengan DUDIKA, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.	IKSS 7.1	Tersedianya kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pendidikan dengan DUDIKA, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 7.1.1	Pengembangan kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pendidikan dengan DUDIKA, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.	IKPS 7.1.1.1	Kerja sama dengan program studi nasional, internasional, dan DUDIKA	Kerja sama	206	220	224	224	224	Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi, LPPM, DPKS, SRUH

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 8	Mengembangkan riset yang sesuai dengan prioritas UT, nasional dan tren global, seperti inovasi pendidikan digital, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi berbasis teknologi yang diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan global.	IKSS 8.1	Tersedianya riset yang sesuai dengan prioritas UT, nasional dan tren global, seperti inovasi pendidikan digital, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi berbasis teknologi yang diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan global.	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 8.1.1	Pengembangan riset yang sesuai dengan prioritas UT, nasional dan tren global, seperti inovasi pendidikan digital, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi berbasis teknologi yang diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan global.	IKPS 8.1.1.1	Jumlah riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh program studi, riset sistem pembelajaran jarak jauh dan institusi UT, sesuai dengan kebijakan nasional yang sumber pendanaannya dari UT atau eksternal untuk mendukung hilirisasi pembangunan nasional.	penelitian	520	550	595	645	697	LPPM, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
		IKPS 8.1.1.2	Jumlah keluaran penelitian dalam bentuk artikel jurnal internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi/HKI.	Luaran	850	867	885	903	922	LPPM, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
SS 9	Menguatkan penelitian multidisiplin yang melibatkan Teknologi Pendidikan dan <i>Science Technology Engineering Arts Mathematics</i> (STEAM).	IKSS 9.1	Tersedianya penelitian berbasis STEAM dan Teknologi Pendidikan	persentase	100	100	100	100	100	
PS 9.1.1	Pengembangan riset berbasis STEAM dan Teknologi Pendidikan	IKPS 9.1.1.1	Jumlah penelitian berbasis STEAM dan Teknologi Pendidikan	Riset	100	110	120	130	140	LPPM, Fakultas, SPs
SS 10	Mengembangkan riset dengan memanfaatkan data besar (big data) dari platform digital UT untuk mengambil kebijakan pendidikan dan pengembangan strategi pembelajaran UT yang tepat.	IKSS 10.1	Tersedianya riset yang memanfaatkan big data dari platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UT	persentase	100	100	100	100	100	
PS 10.1.1	Pengembangan riset yang memanfaatkan big data dari platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UT	IKPS 10.1.1.1	Jumlah riset yang memanfaatkan big data dari platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UT	Riset	2	4	6	8	10	LPPM, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi, DSI, PPPu, PPPb

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 11	Menjalin kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas penelitian dengan dudika, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi	IKSS 11.1	Tersedianya kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi	persentase	100	100	100	100	100	
PS 11.1.1	Penguatan kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas penelitian dengan dudika, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi.	IKPS 11.1.1.1	Jumlah kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi	Kerja sama	20	25	30	35	40	LPPM, Fakultas, PPBI, SRUH, DPKS, SPs, Sekolah Vokasi
SS 12	Memanfaatkan hasil penelitian, dan program MOOCs sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital praktis, kewirausahaan digital, literasi keuangan, praktik keberlanjutan	IKSS 12.1	Tersedianya hasil penelitian, dan program MOOCs sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital praktis, kewirausahaan digital, literasi	persentase	100	100	100	100	100	

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
	lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.		keuangan, praktik keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat							
PS 12.1.1	Pengembangan hasil penelitian dan program MOOCs sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital praktis, kewirausahaan digital, literasi keuangan, praktik keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat	IKPS 12.1.1.1	Jumlah program pengabdian kepada masyarakat termasuk PkM MOOCs, Dosen, Nasional, Internasional, dan kewirausahaan mahasiswa	Judul	425	480	540	610	680	LPPM, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi, LPPM, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi, DPKS
		IKPS 12.1.1.2	Jumlah peserta yang memanfaatkan program MOOCs	Pengguna	10000	10500	11000	11500	12000	
SS 13	Memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga pemerintah daerah, sektor industri, LSM nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur dalam hal berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pengabdian masyarakat sebagai strategi untuk peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.	IKSS 13.1	Tersedianya kolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga pemerintah daerah, sektor industri, LSM nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur dalam hal berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pengabdian masyarakat sebagai strategi untuk peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.	Presentase	100	100	100	100	100	

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 13.1.1	Penguatan kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat	IKPS 13.1.1.1	Jumlah kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat	Kerja sama	49	55	56	56	56	LPPM, Fakultas, SRUH, DPKS
Tata Kelola dan SDM										
SS 14	Penguatan konsolidasi antar organ menuju <i>Good University Governance</i> .	IKSS 14.1	Terlaksananya konsolidasi antar organ secara terencana.	Persentase	75	100	100	100	100	
PS 14.1.1	Penguatan konsolidasi antar organ menuju <i>Good University Governance</i> yang didukung mekanisme dan sistem informasi.	IKPS 14.1.1.1	Tercapainya <i>Good University Governance</i> melalui konsolidasi antara tiga organ universitas.	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	MWA, Rektor (SRUH), SAU
SS 15	Menguatkan tata kelola yang <i>agile</i> dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan kewajiban, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, dan nirlaba.	IKSS 15.1	Tersedianya sistem terintegrasi yang mendukung tata Kelola UT yang <i>agile</i> .	Persentase	50	80	100	100	100	

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 15.1.1	Pengembangan sistem terintegrasi yang mendukung tata Kelola UT yang <i>agile</i> dan berintegritas	IKPS 15.1.1.1	Tersedianya sistem terintegrasi (regulasi, tatanan kelembagaan, sistem informasi dan komunikasi) yang mendukung tata kelola UT yang <i>agile</i> dan berintegritas.	Persentase	70	80	90	100	100	SRUH, seluruh unit
SS 16	Menguatkan sistem manajemen strategik untuk peningkatan kinerja.	IKSS 16.1	Peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU).	Persentase	60	80	100	100	100	
PS 16.1.1	Penguatan sistem manajemen strategik untuk peningkatan kinerja.	IKPS 16.1.1.1	Pencapaian IKU UT	Persentase	60	80	100	100	100	Seluruh unit
		IKPS 16.1.1.2	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> (pegawai, mitra, tutor)	Persentase	80	90	90	100	100	PSDM, LPPM, DPKS, UT Daerah, Fakultas, SPs
SS 17	Menguatkan peran UT sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembuatan kebijakan.	IKSS 17.1	Partisipasi UT dalam forum kebijakan pada badan pengambilan keputusan pemerintah pusat dan daerah.	kegiatan	5	10	15	20	25	
PS 17.1.1	Penguatan peran UT sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pemberdayaan.	IKPS 17.1.1.1	Jumlah kegiatan yang memberi kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat.	Jumlah	5	10	15	20	25	Fakultas, LPPM

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 18	Menguatkan SDM unggul dengan penguasaan teknologi mutakhir melalui Human Capital Management.	IKSS 18.1	Meningkatnya kualitas SDM UT berdasarkan grand design Human Capital Management (HCM) UT	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 18.1.1	Pengembangan dan Implementasi Grand Design HCM untuk mencapai SDM Unggul	IKPS 18.1.1.1	Terlaksananya Perencanaan, rekrutmen dan penempatan yang sesuai dengan grand design HCM	Persentase	50	60	70	90	100	PSDM
		IKPS 18.1.1.2	Terlaksananya program pengembangan SDM dalam berbagai modus dengan jumlah jam pelatihan yang memadai, termasuk <i>talent pool</i>	Persentase	73,58	74,87	76,15	77,3	78,45	PSDM, seluruh unit terkait
		IKPS 18.1.1.3	Terlaksananya program dan kegiatan penguatan budaya kerja KIIARA pada seluruh pegawai UT	Kegiatan/ Unit	5	5	5	5	5	PSDM, seluruh unit terkait
		IKPS 18.1.1.4	Terlaksananya program pemberian penghargaan, imbalan, dan pengakuan berdasarkan merit system, termasuk program persiapan pensiun.	Persentase	82	84	86	88	90	PSDM, LPPM, Fakultas, PIC Dies, Puslakeu

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
		IKPS 18.1.1.5	Guru Besar dan Lektor Kepala	Persentase	24	25	27	29	32	PSDM, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
		IKPS 18.1.1.6	Dosen bergelar doktor dan tendik bergelar magister	Persentase	33	34	36	39	41	PSDM, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
		IKPS 18.1.1.7	Pegawai (dosen dan tendik) yang memiliki sertifikat pendidik, sertifikasi nasional kompetensi, teknis (TIK, keuangan, Barjas), dan/atau profesi	Persentase	47,16	49,73	52,3	54,6	56,9	PSDM, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
		IKPS 18.1.1.8	Tersedia database dan aplikasi Human Capital Management (HCM) yang meliputi fungsi- fungsi HCM sesuai kebutuhan	Persentase	27	54	100	100	100	PSDM, DSI

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 19	Menguatkan budaya kerja yang mendukung ekosistem pembelajaran digital UT.	IKSS 19.1	Tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital oleh dosen dan mahasiswa dan budaya kerja yang mendukung ekosistem pembelajaran digital UT.	Skor	90	91	91	92	92	
PS 19.1	Pengembangan Sistem Kerja Digital dan <i>Agile</i>	IKPS 19.1.1	Tersedianya Sistem Kerja Digital dan <i>Agile</i>	Persentase	50	75	100	100	100	PSDM, DSI
PS 19.2	Internalisasi Budaya Pembelajaran Digital	IKPS 19.2.1	Skor Indeks Budaya Pembelajaran Digital	Skor	80	83	86	89	90	PPPb, PSDM, Fakultas
Perencanaan dan Keuangan										
SS 20	Mengembangkan sumber pendapatan dari selain biaya pendidikan	IKSS 20.1	Meningkatnya sumber pendapatan dari selain pendapatan layanan akademik	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 20.1.1	Peningkatan profit bersih yang bersumber dari <i>revenue generating activities</i> (RGAs) selain pendapatan layanan akademik	IKPS 20.1.1.1	Jumlah profit bersih yang bersumber dari <i>revenue generating activities</i> (RGAs) selain pendapatan layanan akademik	Rupiah	2,5 M	3,5 M	5,5 M	8 M	11 M	PPBI
		IKPS 20.1.1.2	Proporsi biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) unit usaha	Persentase	75	70	65	60	55	PPBI, DMAUPBJ PBJPBJ, UT Daerah

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
		IKPS 20.1.1.3	Proporsi jumlah pendapatan unit usaha dibandingkan jumlah total pendapatan UT	Persentase	0,68%	0,88%	1,08%	1,28%	1,48%	PPBI
		IKPS 20.1.1.4	Jumlah unit usaha UT menjadi Badan Usaha Milik UT dan anak usaha Badan Usaha Milik UT	Jumlah	1	2	3	4	5	PPBI
		IKPS 20.1.1.5	Jumlah dividen Badan Usaha Milik UT	Rupiah	-	-	0,5 M	0,75 M	1,5 M	PPBI
		IKPS 20.1.1.6	Pertumbuhan Dana Abadi PTNBH	Persentase	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	Puslakeu, PPBI
		IKPS 20.1.1.7	Pengelolaan hasil pengembangan Investasi PTNBH UT	Persentase ROI	6,25	6,5	6,7	6,9	7	PPBI
SS 21	Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan digital terintegrasi yang transparan dan akuntabel	IKSS 21.1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip <i>good university governance</i> yang berkelanjutan	Persentase	80	82	85	90	95	
PS 21.1.1	Integrasi pengembangan dan sistem tata kelola pengelolaan dana	IKPS 21.1.1.1	Persentase integrasi pengembangan sistem tata kelola pengelolaan dana	Persentase	20	40	60	80	100	DSI, Puslakeu, Pusrenpor
PS 21.1.2	Akuntabilitas pengelolaan dana Universitas	IKPS 21.1.2.1	Opini Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Audit Laporan Keuangan PTNBH UT	opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Puslakeu, KPI

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 21.1.3	Peningkatan nilai kinerja anggaran	IKPS 21.1.2.2	Persentase akuntabilitas pengelolaan dana Unit	Persentase	100	100	100	100	100	UT Pusat dan UT Daerah
		IKPS 21.1.3.1	Nilai Kinerja Anggaran (Penilaian Kementerian Keuangan)	Nilai	88	89	90	91	92	Pusrenpor dan Puslakeu
		IKPS 21.1.3.2	Nilai Kinerja Anggaran (Penilaian Universitas)	Nilai	92	92.5	93	93.5	94	UT Pusat dan UT Daerah
PS 21.1.4	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	IKPS 21.1.4.1	Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Predikat	A	A	AA	AA	AA	Pusrenpor dan KPI
TIK, Sarana, dan Prasarana										
SS 22	Mengembangkan tata kelola TIK dan platform online yang andal, mudah diakses bagi seluruh <i>stakeholder</i> , serta ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus .	IKSS 22.1	Tersedianya layanan digital yang dapat diakses secara stabil dan konsisten	Persentase	95	96	97	98	99	
PS 22.1.1	Penguatan tata kelola TIK	IKPS 22.1.1.1	Tersedianya kebijakan atau prosedur TIK yang terdokumentasi dan diterapkan	Persentase	40	50	65	80	100	DSI

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 22.1.2	Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	IKPS 22.1.1.2	Terimplementasinya Blue Print Tata Kelola dan Pengembangan Teknologi Informasi yang terbarukan	Persentase	30	50	75	100	100	DSI
			Penyelesaian insiden keamanan siber per tahun	Persentase	100	100	100	100	100	DSI
		IKPS 22.1.2.1	Tersedianya platform yang menyajikan fitur aksesibilitas (<i>text-to-speech</i> , subtitle, kontras tinggi, dsb.)	Fitur	1	3	5	10	20	DSI, Fakultas, SPs, PPBAM, PPPu, PPPb
		IKPS 22.1.3.1								
SS 23	Mengembangkan infrastruktur TIK di seluruh wilayah UT untuk mendukung ekosistem pembelajaran digital.	IKSS 23.1	Tersedianya infrastruktur TIK yang sesuai standar pada unit UT	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 23.1.1	Pengembangan Infrastruktur TIK Terintegrasi	IKPS 23.1.1.1	Tersedianya akses jaringan TIK berkualitas di UT Pusat dan UT Daerah	Persentase	85	95	100	100	100	DSI dan DMAUPBJ PBJPBJ
		IKPS 23.1.1.2	Tersedianya sarana dan prasarana TIK UT yang sesuai standar di UT Pusat dan UT Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	DSI dan DMAUPBJ PBJPBJ
PS 23.1.2	Penguatan Ekosistem Pembelajaran Digital	IKPS 23.1.2.1	Tingkat Indeks Maturity DLE	Indeks	3	4	4	4	4	DSI, DAAK, PSDM

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 24	Menguatkan implementasi UT <i>Green University</i> dalam pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien.	IKSS 24.1	Tersedianya sarana dan prasarana berbasis digital yang ramah lingkungan	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 24.1.1	Penataan dan Infrastruktur	IKPS 24.1.1.1	Tersedianya sarana prasarana bagi mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Persentase	65	70	80	90	100	DMAUPBJ PBJPBJ
		IKPS 24.1.1.2	Tersedianya sarana prasarana yang hemat energi	Persentase	65	70	80	90	100	DMAUPBJ PBJPBJ, LPPM, seluruh unit
		IKPS 24.1.1.3	Tersedianya pengelolaan sampah (<i>waste management system</i>) untuk mendukung <i>Green University</i>	Persentase	20	30	50	70	100	DMAUPBJ PBJPBJ, LPPM, seluruh unit
		IKPS 24.1.1.4	Penurunan anggaran ATK dan listrik sebagai dampak implementasi sarana prasarana berbasis digital	Persentase	5	10	15	20	25	DMAUPBJ PBJPBJ, LPPM, seluruh unit
PS 24.1.2	Pengembangan infrastruktur	IKPS 24.1.2.1	Terlaksananya pembangunan fisik infrastruktur kawasan baru sesuai rencana induk (<i>masterplan</i>)	Persentase	15	30	50	60	70	DMAUPBJ PBJPBJ

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko										
SS 25	Mengintegrasikan Simintas UT dengan SN Dikti, Standar Internasional, dan peraturan perundang-undangan terkini yang sesuai dengan karakter UT.	IKSS 25.1	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi (SPT), sesuai dengan Karakteristik UT (Simintas 2024) di setiap unit yang meliputi Kebijakan, Pedoman, prosedur, Petunjuk Kerja dan Rekaman.	Persentase	50	75	100	100	100	
PS 25.1.1	Finalisasi dan sosialisasi Dokumen Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan SN Dikti dan sesuai dengan Karakteristik UT (Simintas 2024) di setiap unit yang meliputi Kebijakan, Pedoman, prosedur, Petunjuk Kerja dan Rekaman	IKPS 25.1.1.1	Tersedianya Dokumen Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan SN Dikti dan sesuai dengan Karakteristik UT (Simintas 2024) di setiap unit yang meliputi Kebijakan, Pedoman, prosedur, Petunjuk Kerja dan Rekaman, serta terselenggaranya sosialisasi dokumen tersebut.	Persentase	50	100	100	100	100	KPM, Seluruh Unit

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 25.1.2	Penyusunan Kebijakan baru Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini (Pertor, Surat Edaran, Pedoman).	IKPS 25.1.2.1	Tersedia Kebijakan baru Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini (Pertor, Surat Edaran, Pedoman).	Persentase	40	80	100	100	100	KPM, SRUH
PS 25.1.3	Penyusunan Dokumen Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini di unit	IKPS 25.1.3.1	Tersedia Dokumen Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini di unit.	Persentase	-	30	50	75	100	KPM, Seluruh Unit
		IKSS 25.2	Proporsi unit kerja di UT yang telah memanfaatkan Simintas yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini dalam operasionalnya.	Persentase	40	50	75	100	100	
PS 25.2.1	Pemanfaatan Simintas yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini dalam operasionalnya oleh setiap Unit Kerja di UT.	IKPS 25.2.1.1	Terimplementasinya Simintas yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini dalam operasionalnya sesuai dengan proporsi yang ditargetkan.	Persentase	-	-	-	75	100	KPM, Seluruh Unit

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
		IKSS 25.3	Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan Standar Internasional (AAOU Framework) di unit.	Persentase	-	-	50	60	70	
PS 25.3.1	Pemanfaatan Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan Standar Internasional (AAOU Framework).	IKPS 25.3.1.1	Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan Standar Internasional (AAOU Framework).	Persentase	-	-	50	60	100	KPM, Seluruh Unit
SS 26	Memperkuat audit/ asesmen mutu secara berkala yang terintegrasi dengan ekosistem pembela-jaran digital dalam rangka mencapai dan mempertahan-kan peringkat akreditasi/sertifikasi dari lembaga nasional dan internasional yang diakui oleh pemerintah.	IKSS 26.1	Terlaksananya Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis elektronik (SPBE)	Persentase	75	100	100	100	100	
PS 26.1.1	Implementasi Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis teknologi (e- Audit)	IKPS 26.1.1.1	Terlaksananya Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis teknologi	Persentase Unit Kerja Operasional Akademik	-	-	50	75	100	KPM, KPI, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi, DAAK, DSI, PPPb, PPPu, PPK.

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
		IKSS 26.2	Unit kerja yang telah menindaklanjuti hasil Asesmen/Audit Mutu Eksternal (AAOU)	Persentase	75	100	100	100	100	
PS 26.2.1	Pelaksanaan Asesmen/Audit Mutu Eksternal (AAOU) di unit	IKPS 26.2.1.1	Diperolehnya status Akreditasi dari AAOU	Level Akreditasi	3	3	3	3	4	KPM
		IKSS 26.3	Program studi dengan akreditasi Unggul dan Internasional	Persentase	8	10	15	20	30	
PS 26.3.1	Peningkatan jumlah prodi terakreditasi Unggul dan Internasional	IKPS 26.3.1.1	Program studi akreditasi "Unggul"	Persentase	10	20	25	35	40	KPM, Fakultas, Prodi
		IKPS 26.3.1.2	Program studi memperoleh akreditasi internasional	Persentase	5	5	10	10	15	KPM, Fakultas/SP s
		IKSS 26.4	PT memperoleh akreditasi/sertifikasi internasional	Terakreditasi/Te rsertifikasi	-	-	100	100	100	
PS 26.4.1	Pelaksanaan akreditasi/sertifikasi Perguruan Tinggi	IKPS 26.4.1.1	Predikat PT terakreditasi/ tersertifikasi	Peringkat	A	A	A	A	A/ Unggul	KPM, Seluruh Unit

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 26.4.2	Peningkatan Rekognisi UT dalam skala nasional dan Internasional	IKPS 26.4.2.1	Tercapainya peringkat UT pada skema WUR THE IMPACT	Peringkat/ ranking internasional	1200	1000	1000	800	800	KPM, Fakultas, LPPM
		IKPS 26.4.2.2	Tercapainya peringkat UT pada skema WUR UI Greenmetric	Peringkat/ ranking nasional	33	31	30	28	25	KPM, LPPM
		IKPS 26.4.2.3	Tercapainya peringkat UT pada Webometrics	Peringkat/ ranking nasional	80	70	60	50	40	KPM, DSI, DPKS, LPPM
SS 27	Memperkuat peran pengelola manajemen risiko pada tingkat universitas dan unit yang adaptif.	IKSS 27.1	Unit kerja yang telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko sesuai dengan pedoman universitas. (tingkat implementasi manajemen risiko pada unit kerja).	Persentase	-	30	50	70	100	
PS 27.1.1	Implementasi sistem manajemen risiko sesuai dengan pedoman universitas oleh unit kerja	IKPS 27.1.1.1	Unit kerja memiliki peta risiko sesuai pedoman Universitas	Persentase	10	75	100	100	100	KPM, Seluruh Unit
		IKSS 27.2	Tingkat kepatuhan pelaporan risiko unit sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan.	Persentase	-	30	50	70	100	

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 27.2.1	Penyediaan laporan manajemen risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan oleh unit kerja.	IKPS 27.2.1.1	Unit kerja memiliki laporan risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan oleh unit kerja	Persentase	-	-	30	50	70	KPM, Seluruh Unit
		IKSS 27.3	Pelaksanaan Audit Manajemen risiko yang dilakukan pada tingkat universitas dan unit kerja setiap tahun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.	Persentase	-	-	100	100	100	
PS 27.3.1	Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.	IKPS 27.3.1.1	Tersedia dokumen laporan hasil Audit Berbasis Risiko berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.	Persentase	-	-	-	30	50	KPM, KPI, Seluruh Unit
		IKSS 27.4	Pengembangan dashboard digital untuk manajemen risiko yang berfungsi sebagai alat mitigasi dan monitoring risiko.	Persentase	-	30	50	100	-	
PS 27.4.1	Pengembangan <i>dashboard</i> digital untuk manajemen risiko yang berfungsi sebagai alat mitigasi dan monitoring risiko.	IKPS 27.4.1.1	Tersedianya <i>dashboard</i> digital untuk manajemen risiko yang berfungsi sebagai alat mitigasi dan monitoring risiko.	Persentase	-	30	50	100	-	KPM, DSI

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 28	Perumusan peta dan pedoman manajemen risiko terbaru sesuai dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tingkat universitas dan unit.	IKSS 28.1	Tersedianya peta analisis risiko di tingkat universitas dan unit kerja yang telah dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan aktual serta hasil monitoring yang dilakukan.	Persentase	50	100	100	100	100	
PS 28.1.1	Penyediaan peta risiko di tingkat universitas dan unit kerja yang telah dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan hasil monitoring.	IKPS 28.1.1.1	Tersedianya peta risiko di tingkat universitas dan unit kerja yang telah dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan hasil monitoring.	Persentase	50	100	100	100	100	KPM, Seluruh Unit
Kemahasiswaan										
SS 29	Memperkuat titik akses UT hingga tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.	IKSS 29.1	Meningkatnya kualitas layanan prima pada Sentra Layanan UT (SALUT)	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 29.1.1	Peningkatan Kualitas layanan prima pada SALUT	IKPS 29.1.1.1	Jumlah SALUT yang memenuhi standar layanan prima	Persentase	50	75	80	90	100	UT Daerah/LL N , DPKS
SS 30	Memperkuat <i>brand awareness</i> terhadap UT kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.	IKSS 30.1	Peningkatan Jumlah Mahasiswa Universitas Terbuka	Jumlah Mahasiswa Registrasi	700.000	800.000	900.000	1.050.0000	1.250.000	

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 30.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa	IKPS 30.1.1.1	Pencapaian jumlah mahasiswa pertahun berdasarkan target	Mahasiswa	700.000	800.000	900.000	1.050.000	1.250.000	UT Daerah/LL N, DPKS, DAAK, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
PS 30.1.2	Peningkatan retensi mahasiswa	IKPS 30.1.2.1	Peningkatan jumlah retensi mahasiswa baik di UT Daerah maupun di UT LLN	Persentase	70	73	75	78	80	Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi, UT Daerah/ LLN,
PS 30.1.3	Pemasaran melalui berbagai media untuk meningkatkan brand awareness UT	IKPS 30.1.3.1	Jumlah program sosialisasi dan edukasi	Jumlah Program	40	80	120	120	120	UT Daerah/ LLN, DPKS, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
PS 30.1.4	Peningkatan kepuasan mahasiswa dan pengguna lulusan	IKPS 30.1.4.1	Indeks kepuasan mahasiswa	Indeks Kepuasan	3,5	3,6	3,65	3,75	3,85	LPPM, DAAK

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
		IKPS 30.1.4.2	Indeks kepuasan pengguna lulusan	Indeks Kepuasan	3,00	3,10	3,25	3,35	3,5	LPPM, UT Daerah/LL N, DAAK
PS 30.1.5	Peningkatan jumlah mahasiswa WNA	IKPS 30.1.5.1	Jumlah Mahasiswa WNA	Mahasiswa	100	200	300	400	500	Fakultas, UT LLN
SS 31	Memperkuat sistem pendukung untuk kesuksesan mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh.	IKSS 31.1	Jumlah Program Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh	Program	4	4	4	4	4	UT Daerah, LPPM, PPPb
PS 31.1.1	Penyelenggaraan program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh	IKPS 31.1.1.1	Mahasiswa yang mengikuti program orientasi mahasiswa baru dan persiapan pembelajaran jarak jauh	Persentase	100	100	100	100	100	UT Daerah
		IKPS 31.1.1.2	Mahasiswa yang mengikuti program penyelesaian tugas dan persiapan ujian	Persentase	60	70	80	90	100	UT Daerah, Fakultas, DAAK, PPPu, PPPb
SS 32	Menguatkan pembinaan minat dan bakat mahasiswa yang komprehensif yang berorientasi prestasi.	IKSS 32.1	Mahasiswa yang mengikuti program pembinaan minat bakat	Persentase	1	2	3	4	5	
PS 32.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi di berbagai tingkat	IKPS 32.1.1.1	Mahasiswa yang berprestasi tingkat lokal, wilayah, nasional, dan internasional	Persentase	2	2,5	3	3,5	4	Fakultas, UT Daerah/LL N, DAAK

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 32.1.2	Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar program studi	IKPS 32.1.2.1	Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar program studi	Persentase	5	5	5	5	5	Fakultas, UT Daerah/LL N, DAAK LPPM, UT Daerah/UT LN, DPKS, Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
PS 32.1.3	Penyelenggaraan program pengembangan minat, bakat, dan persiapan karier bagi mahasiswa	IKPS 32.1.3.1	Mahasiswa yang mengikuti program pengembangan minat, bakat, dan persiapan karier bagi mahasiswa	Persentase	3	4	5	6	7	Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
PS 32.1.4	Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	IKPS 32.1.4.1	Jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi pada setiap program studi	Mahasiswa per prodi	5	10	15	20	25	Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi
SS 33	Menguatkan program kesejahteraan mahasiswa.	IKSS 33.1	Mahasiswa penerima manfaat program kesejahteraan	Persentase	2	3	4	5	6	
PS 33.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan dari berbagai sumber	IKPS 33.1.1.1	Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan dari berbagai sumber	Jumlah Mahasiswa	15.000	17.500	20.000	22.500	25.000	WR1, WR2, WR3, WR4, UT Daerah
PS 33.1.2	Penyediaan program bimbingan konseling bagi mahasiswa	IKPS 33.1.2.1	Program studi yang menyelenggarakan program bimbingan konseling bagi mahasiswa	Persentase Program Studi	20	40	60	80	100	Fakultas, SPs, Sekolah Vokasi

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 33.1.3	Penyediaan layanan kesehatan untuk mahasiswa	IKPS 33.1.3.1	Jumlah UT Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk mahasiswa	Jumlah UT Daerah	10	15	20	30	39	UT Daerah
Alumni dan Kerjasama										
SS 34	Memberdayakan alumni untuk mendukung visi, misi dan tujuan UT.	IKSS 34.1	Peningkatan partisipasi alumni untuk mendukung visi, misi dan tujuan UT.	Persentase	0,25	0,5	0.75	1	1,25	
PS 34.1.1	Program pemberdayaan alumni oleh UT Pusat dan Daerah untuk mendukung visi dan misi UT	IKPS 34.1.1.1	Jumlah Program Pemberdayaan Alumni Oleh UT Pusat dan Daerah.	Program	20	30	40	50	60	UT Daerah /LLN, DAAK, Fakultas, SPs, LPPM, UPT Alumni, DPKS
SS 35	Menyediakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) data alumni.	IKSS 35.1	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) data alumni.	Persentase	35	50	100	100	100	
PS 35.1.1	Pengembangan aplikasi dan website manajemen alumni yang terintegrasi dan selalu terupdate	IKPS 35.1.1.1	Tersedianya <i>platform</i> dan <i>website</i> manajemen alumni yang terintegrasi dan terupdate	Persentase	50	75	90	100	100	DSI, DAAK, DPKS, UPT Alumni
		IKSS 35.2	Tersedianya data <i>tracer study</i>	Persentase	80	80	80	80	80	

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
PS 35.2.1	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan <i>tracer study</i>	IKPS 35.2.1.1	Lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	Persentase	80	80	80	80	80	LPPM, Fakultas, SPs,Sekolah Vokasi, UT Daerah/LL N, UPT Alumni
		IKPS 35.2.1.2	Jumlah alumni T-1 yang berpartisipasi sebagai responden <i>tracer study</i>	Persentase	35	35	35	35	35	LPPM, Fakultas, SPs,Sekolah Vokasi, UT Daerah/LL N, UPT Alumni
SS 36	Menyediakan sistem informasi manajemen (SIM) data kerja sama.	IKSS 36.1	Tersedianya sistem informasi manajemen (SIM) data kerja sama	Persentase	50	75	100	100	100	
PS 36.1.1	Pengembangan aplikasi kerja sama yang baik dan terintegrasi serta dapat di akses oleh stakeholders	IKPS 36.1.1.1	Tersedianya aplikasi kerja sama yang terintegrasi serta dapat di akses oleh stakeholders.	Persentase	50	65	75	85	100	DSI, DPKS

Kode	Program/Sasaran Strategis	Kode	Indikator Kinerja Sasaran/Program Strategis	Satuan	Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029	Unit Pelaksana
SS 37	Meningkatkan kerja sama dengan mitra di bidang akademik, non akademik, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) terkini yang mengakomodasi perubahan lingkungan dan kebijakan yang dinamis.	IKSS 37.1	Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 pada bidang akademik dan non akademik dengan mitra baik dalam dan luar negeri.	Persentase	100	100	100	100	100	
PS 37.1.1	Peningkatan dan penguatan kerja sama antar institusi dengan berfokus pada akademik dan non-akademik.	IKPS 37.1.1.1	Pelaksanaan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan institusi negeri dan swasta di dalam dan luar negeri	IA dan Laporan	15	19	24	29	35	DPKS, SRUH, Seluruh Unit

Jabaran Visi, Misi, dan Tujuan diturunkan pada Sasaran Strategis (SS) dan Program Strategis (PS) dapat dilihat pada Lampiran 1 tentang Pohon Kinerja UT. Adapun definisi operasional, kriteria, dan rumus perhitungan (formula) masing-masing IKSS dan IKPS terdapat di Lampiran 2 dan 3.

Melalui pencapaian target IKSS dan IKPS tersebut diharapkan dapat mendukung pencapaian kinerja UT yang tertuang dalam Sasaran Strategis (SS) UT. Keseluruhan pencapaian sasaran strategis UT di akhir tahun 2029 adalah untuk mencapai *key success indicators* (Tabel 4.2).

Tabel 4.2
Key Success Indicators

Bidang Strategis	Tonggak Capaian Utama Tahap 1	Key Success Indicators
Akademik	Mengembangkan kurikulum yang fleksibel, adaptif, relevan, aplikatif, kompetitif dengan penguatan karakter dan wellbeing, yang dituangkan melalui bahan ajar, proses pembelajaran dan asesmen, serta diperkuat dengan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan Publikasi melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital (digital learning ecosystem/DLE) untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.	1. 80% lulusan sarjana dan diploma memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta 2. 80% lulusan UT memperoleh penghasilan 1,2x UMP 3. 5 Program Studi Internasional 4. Hilirisasi terhadap 30 % hasil penelitian 5. 1000 mitra pemberdayaan masyarakat 6. Jumlah keluaran dosen yang berhasil mendapatkan rekognisi internasional atau diterapkan oleh masyarakat/industri/pemerintah per jumlah dosen rasio 1: 1
Non Akademik	Melakukan transformasi tata kelola dan sumber daya melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital (digital learning ecosystem/DLE) dalam rangka meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.	1. Opini WTP dari KAP 2. Predikat SAKIP AA 3. Sistem IT yang handal dengan stabilitas layanan berbasis jaringan bernilai 99% (<i>uptime system</i>) 4. Jumlah Guru Besar 5 % 5. Jumlah lektor kepala 28 % 6. Jumlah dosen bergelar doktor 35 % 7. 30% dosen dan tenaga kependidikan yang memiliki sertifikat kompetensi/teknis yang diakui oleh dunia usaha dan dunia industri

Bidang Strategis	Tonggak Capaian Utama Tahap 1	Key Success Indicators
Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko	Memperkuat sistem penjaminan mutu dan manajemen berbasis risiko untuk mendukung transformasi tata kelola ekosistem pembelajaran digital berstandar nasional dan internasional serta pemerataan pendidikan tinggi berkualitas berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia	15% program studi memperoleh akreditasi internasional 40% program studi memperoleh akreditasi nasional “Unggul” - Memperoleh Sertifikat Kualitas ICDE - Memperoleh Akreditasi AAOU predikat level 4. - Peringkat 25 nasional UI Greenmetric - Peringkat 40 nasional Webometrics - Peringkat 800 Internasional THE Impact World University Ranking - Peringkat Silver Internasional Online Learning
Kemahasiswaan	Memeratakan akses pendidikan tinggi dan kegiatan kemahasiswaan melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital (<i>digital learning ecosystem/DLE</i>) yang andal dan terintegrasi di seluruh Indonesia untuk meningkatkan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.	5.000 prestasi yang diperoleh oleh mahasiswa - UT memiliki mahasiswa di seluruh kecamatan di Indonesia
Alumni dan Kerjasama	Menguatkan pengelolaan alumni dan jejaring kerja sama dengan pemangku kepentingan melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital (<i>digital learning ecosystem/DLE</i>) untuk meningkatkan pemerataan akses pendidikan tinggi berkualitas bagi seluruh masyarakat Indonesia.	Kontribusi dana abadi dari alumni Rp 3.000.000.000/tahun

4.2 Kerangka Pendanaan dan Belanja

Pencapaian Sasaran Strategis (SS) UT memerlukan dukungan sumber daya yang berasal dari dana APBN dan Selain APBN. Berikut ini adalah proyeksi pendapatan UT pada Tahun 2025-2029 (Tabel 4.3).

Tabel 4.3
Proyeksi Pendapatan

No.	Sumber Pendapatan	Anggaran 2025 (Target Pendapatan) (Rp)	Anggaran 2026 (Target Pendapatan) (Rp)	Anggaran 2027 (Target Pendapatan) (Rp)	Anggaran 2028 (Target Pendapatan) (Rp)	Anggaran 2029 (Target Pendapatan) (Rp)
1.	APBN	190.177.218.000	185.671.782.933	181.080.902.466	177.674.409.931	178.856.356.652
2.	SELAIN APBN	2.671.326.117.000	2.914.335.766.067	3.246.558.253.364	3.787.676.910.130	4.507.317.982.319
2.1	Biaya Pendidikan	2.526.485.832.548	2.760.929.867.580	3.084.501.910.605	3.616.441.716.038	4.326.545.085.116
2.2	Hasil Pengelolaan Dana Abadi	96.271.415.181	101.084.985.940	106.139.235.237	111.446.196.999	117.018.506.849
2.3	Usaha UT	10.576.048.000	12.428.450.212	14.030.022.070	15.807.557.369	17.573.878.644
2.4	Pengelolaan Kekayaan UT	15.466.285.337	16.239.599.604	17.051.579.584	17.904.158.563	18.799.366.491
2.5	Hibah	3.462.975.600	3.636.124.380	3.817.930.599	4.008.827.129	4.209.268.485
2.6	Pendapatan Lain	19.063.560.334	20.016.738.351	21.017.575.269	22.068.454.032	23.171.876.734
	TOTAL	2.861.503.335.000	3.100.007.549.000	3.427.639.155.830	3.965.351.320.061	4.686.174.338.971

Berikut ini adalah indikasi kebutuhan pendanaan UT pada Tahun 2025-2029 guna mendukung pencapaian Program Strategis (PS) UT (Tabel 4.4).

Tabel 4.4
Indikasi Kebutuhan Pendanaan

Kode SS	Kode PS	Program Strategis	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
SS 1	PS 1.1.1	Pengembangan Program Studi yang menerapkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif sesuai dengan standar nasional dan internasional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kesadaran awal tentang green industry, green jobs dan green skills	34,757,901,000	37,654,947,000	41,634,598,000	48,166,041,000	56,921,682,000
	PS 1.2.1	Pengembangan Program Studi Internasional	498,954,000	512,800,000	566,996,000	655,944,000	775,182,000
SS 2	PS 2.1.1	Pengembangan bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	470,955,249,000	510,209,026,000	606,378,285,000	774,246,125,000	1,004,637,345,000
SS 3	PS 3.1.1	Pengembangan pembelajaran jarak jauh berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini (misal AI dan Learning Analytics)	464,954,888,000	503,708,539,000	598,652,522,000	764,381,586,000	991,837,432,000
SS 4	PS 4.1.1	Pengembangan sistem asesmen yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	152,001,021,000	164,670,195,000	195,708,868,000	249,888,289,000	324,247,161,000
SS 5	PS 5.1.1	Penguatan kolaborasi dengan penyedia teknologi dan pemerintah dalam membangun akses internet untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)	3,148,066,000	3,410,456,000	3,770,898,000	4,362,459,000	5,155,468,000
SS 6	PS 6.1.1	Pengembangan ICE Institute sebagai lokapasar (market place) matakuliah daring dan memperkuat keterlibatan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.	10,485,006,000	11,358,924,000	12,559,418,000	14,529,682,000	17,170,893,000
SS 7	PS 7.1.1	Pengembangan kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pendidikan dengan DUDIKA, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.	1,537,513,000	1,665,664,000	1,841,703,000	2,130,621,000	2,517,926,000
SS 8	PS 8.1.1	Pengembangan riset yang sesuai dengan prioritas UT, nasional dan tren global, seperti inovasi pendidikan digital, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi berbasis teknologi yang diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan global.	54,550,000,000	57,601,000,000	62,155,000,000	67,209,000,000	72,466,000,000
SS 9	PS 9.1.1	Pengembangan riset berbasis STEAM dan Teknologi Pendidikan	10,000,000,000	11,000,000,000	12,000,000,000	13,000,000,000	14,000,000,000
SS 10	PS 10.1.1	Pengembangan riset yang memanfaatkan big data dari platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UT	300,000,000	600,000,000	900,000,000	1,200,000,000	1,500,000,000
SS 11	PS 11.1.1	Penguatan kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas penelitian dengan dudika, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi.	305,386,000	330,840,000	365,805,000	423,191,000	500,119,000
SS 12	PS 12.1.1	Pengembangan hasil penelitian dan program MOOCs sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital praktis, kewirausahaan digital, literasi keuangan, praktik keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat	14,613,625,000	15,831,660,000	17,504,866,000	20,250,948,000	23,932,173,000
SS 13	PS 13.1.1	Penguatan kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat	205,344,000	222,460,000	245,971,000	284,558,000	336,285,000

Kode SS	Kode PS	Program Strategis	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
SS 14	PS 14.1.1	Penguatan konsolidasi antar organ menuju Good University Governance yang didukung mekanisme dan sistem informasi.	1,768,452,000	1,915,852,000	1,967,580,000	2,020,704,000	2,075,263,000
SS 15	PS 15.1.1	Pengembangan sistem terintegrasi yang mendukung tata Kelola UT yang agile dan berintegritas	6,207,043,000	6,724,396,000	6,905,954,000	7,092,415,000	7,283,910,000
SS 16	PS 16.1.1	Penguatan sistem manajemen strategik untuk peningkatan kinerja.	2,005,733,000	2,172,909,000	2,231,578,000	2,291,830,000	2,353,710,000
SS 17	PS 17.1.1	Penguatan peran UT sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pemberdayaan.	3,136,620,000	3,398,056,000	3,489,803,000	3,584,028,000	3,680,796,000
SS 18	PS 18.1.1	Pengembangan dan implementasi Grand Design SDM yang terupdate	719,398,631,000	779,359,982,000	800,402,701,000	822,013,574,000	844,207,941,000
SS 19	PS 19.1.1	Pengembangan Sistem Kerja Digital dan Agile	138,459,000	150,000,000	154,050,000	158,209,000	162,481,000
SS 19	PS 19.1.2	Internalisasi Budaya Pembelajaran Digital	39,333,000	42,612,000	43,762,000	44,944,000	46,157,000
SS 20	PS 20.1.1	Peningkatan profit bersih yang bersumber dari revenue generating activities (RGAs) selain pendapatan layanan akademik	13,340,464,000	14,452,383,000	14,842,597,000	15,243,347,000	15,654,917,000
SS 21	PS 21.1.1	Integrasi pengembangan dan sistem tata kelola pengelolaan dana	374,172,000	405,360,000	416,304,000	427,544,000	439,088,000
	PS 21.1.2	Akuntabilitas pengelolaan dana Universitas	22,482,451,000	25,410,547,000	26,096,632,000	26,801,241,000	27,524,875,000
	PS 21.1.3	Peningkatan nilai kinerja anggaran	3,015,546,000	3,266,890,000	3,355,096,000	3,445,683,000	3,538,717,000
	PS 21.1.4	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	29,698,000	32,174,000	33,042,000	33,934,000	34,851,000
SS 22	PS 22.1.1	Penguatan tata kelola TIK	2,152,544,000	2,331,958,000	2,578,416,000	2,982,906,000	3,525,140,000
	PS 22.1.2	Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber	1,033,830,000	1,120,000,000	1,238,369,000	1,432,639,000	1,693,065,000
	PS 22.1.3	Pengembangan Platform Pembelajaran dan assesmen Inklusif dan Aksesibel	694,143,000	752,000,000	831,476,000	961,915,000	1,136,772,000
SS 23	PS 23.1.1	Pengembangan Infrastruktur TIK Terintegrasi	93,365,737,000	101,147,704,000	111,837,737,000	129,382,324,000	152,901,490,000
	PS 23.1.2	Penguatan Ekosistem Pembelajaran Digital	5,612,225,000	6,080,000,000	6,722,579,000	7,777,186,000	9,190,925,000
SS 24	PS 24.1.1	Penataan dan Infrastruktur	239,789,249,000	259,775,508,000	266,789,446,000	273,992,761,000	281,390,566,000
	PS 24.1.2	Pengembangan infrastruktur	252,647,288,000	273,705,256,000	281,095,297,000	288,684,870,000	296,479,362,000
SS 25	PS 25.1.1	Finalisasi dan sosialisasi Dokumen Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan SN Dikti dan sesuai dengan Karakteristik UT (Simintas 2024) di setiap unit yang meliputi Kebijakan, Pedoman, prosedur, Petunjuk Kerja dan Rekaman	221,062,000	239,488,000	245,954,000	252,594,000	259,415,000
	PS 25.1.2	Penyusunan Kebijakan baru Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini (Pertor, Surat Edaran, Pedoman).	13,609,000	14,744,000	15,142,000	15,550,000	15,970,000
	PS 25.1.3	Penyusunan Dokumen Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini di unit	11,076,000	12,000,000	12,324,000	12,656,000	12,998,000
	PS 25.2.1	Pemanfaatan Simintas yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini dalam operasionalnya oleh setiap Unit Kerja di UT.	40,546,000	43,926,000	45,112,000	46,330,000	47,580,000
	PS 25.3.1	Pemanfaatan Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan Standar Internasional (AAOU Framework).	36,922,000	40,000,000	41,080,000	42,189,000	43,328,000
SS 26	PS 26.1.1	Implementasi Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis teknologi (e-Audit)	1,266,907,000	1,372,503,000	1,409,560,000	1,447,618,000	1,486,704,000
	PS 26.2.1	Pelaksanaan Asesmen/Audit Mutu Eksternal (AAOU) di unit	210,454,000	227,996,000	234,151,000	240,473,000	246,966,000
	PS 26.3.1	Peningkatan jumlah program studi terakreditasi unggul dan internasional	3,184,676,000	3,450,117,000	3,543,270,000	3,638,938,000	3,737,189,000
	PS 26.4.1	Pelaksanaan akreditasi/sertifikasi Perguruan Tinggi	887,496,000	961,469,000	987,428,000	1,014,089,000	1,041,469,000

Kode SS	Kode PS	Program Strategis	Tahun 2025 (Rp)	Tahun 2026 (Rp)	Tahun 2027 (Rp)	Tahun 2028 (Rp)	Tahun 2029 (Rp)
SS 27	PS 26.4.2	Peningkatan rekognisi UT dalam skala nasional dan internasional	329,419,000	356,876,000	366,511,000	376,407,000	386,570,000
	PS 27.1.1	Implementasi sistem manajemen risiko sesuai dengan pedoman universitas oleh unit kerja	164,027,000	177,699,000	182,496,000	187,424,000	192,484,000
	PS 27.2.1	Penyediaan laporan manajemen risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan oleh unit kerja.	319,379,000	346,000,000	355,342,000	364,936,000	374,789,000
	PS 27.3.1	Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.	1,747,358,000	1,893,000,000	1,944,111,000	1,996,601,000	2,050,510,000
	PS 27.4.1	Pengembangan dashboard digital untuk manajemen risiko yang berfungsi sebagai alat mitigasi dan monitoring risiko.	169,311,000	183,424,000	188,376,000	193,462,000	198,686,000
SS 28	PS 28.1.1	Penyediaan peta risiko di tingkat unit kerja yang telah dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan hasil monitoring.	637,387,000	690,513,000	709,156,000	728,304,000	747,968,000
SS 29	PS 29.1.1	Peningkatan Kualitas layanan prima pada SALUT	1,904,506,000	2,063,246,000	2,281,305,000	2,639,185,000	3,118,937,000
SS 30	PS 30.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa	30,443,870,000	32,981,345,000	36,467,056,000	42,187,839,000	49,856,760,000
	PS 30.1.2	Peningkatan retensi mahasiswa	35,247,128,000	38,184,951,000	42,220,617,000	48,843,992,000	57,722,871,000
	PS 30.1.3	Pemasaran melalui berbagai media untuk meningkatkan brand awareness UT	37,680,027,000	40,820,630,000	45,134,854,000	52,215,401,000	61,707,136,000
	PS 30.1.4	Peningkatan kepuasan mahasiswa dan pengguna lulusan	2,004,129,000	2,171,172,000	2,400,637,000	2,777,238,000	3,282,085,000
	PS 30.1.5	Peningkatan jumlah mahasiswa WNA	3,425,502,000	3,711,016,000	4,103,223,000	4,746,918,000	5,609,814,000
SS 31	PS 31.1.1	Penyelenggaraan program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh	118,943,809,000	128,857,689,000	153,146,064,000	195,542,535,000	253,729,824,000
SS 32	PS 32.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi di berbagai Tingkat	1,477,721,000	1,600,889,000	1,902,640,000	2,429,361,000	3,152,262,000
	PS 32.1.2	Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar program studi	1,351,133,000	1,463,749,000	1,739,650,000	2,221,250,000	2,882,224,000
	PS 32.1.3	Penyelenggaraan program pengembangan minat, bakat, dan persiapan karier bagi mahasiswa	7,395,220,000	8,011,607,000	9,521,714,000	12,157,675,000	15,775,415,000
	PS 32.1.4	Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa	8,093,353,000	8,767,929,000	10,420,595,000	13,305,399,000	17,264,666,000
	PS 33.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan dari berbagai sumber	2,339,878,000	2,534,906,000	3,012,710,000	3,846,739,000	4,991,407,000
SS 33	PS 33.1.2	Penyediaan program bimbingan konseling bagi mahasiswa	7,608,155,000	8,242,290,000	9,113,395,000	10,543,063,000	12,459,585,000
	PS 33.1.3	Penyediaan layanan kesehatan untuk mahasiswa	321,471,000	376,008,000	415,747,000	480,967,000	568,398,000
SS 34	PS 34.1.1	Program pemberdayaan alumni oleh UT Pusat dan Daerah untuk mendukung visi dan misi UT	107,998,000	117,000,000	129,365,000	149,659,000	176,864,000
SS 35	PS 35.1.1	Pengembangan aplikasi dan website manajemen alumni yang terintegrasi dan selalu terupdate	1,194,757,000	1,294,340,000	1,431,135,000	1,655,645,000	1,956,609,000
	PS 35.2.1	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan tracer study	572,077,000	619,760,000	685,260,000	792,761,000	936,869,000
SS 36	PS 36.1.1	Pengembangan aplikasi kerja sama yang baik dan terintegrasi serta dapat di akses oleh stakeholders	153,036,000	165,792,000	183,314,000	212,071,000	250,622,000
SS 37	PS 37.1.1	Peningkatan dan penguatan kerja sama antar institusi dengan berfokus pada akademik dan non-akademik.	6,455,365,000	6,993,377,000	7,732,512,830	8,945,553,061	10,571,672,971
Total			2,861,503,335,000	3,100,007,549,000	3,427,639,155,830	3,965,351,320,061	4,686,174,338,971

BAB V

PENUTUP

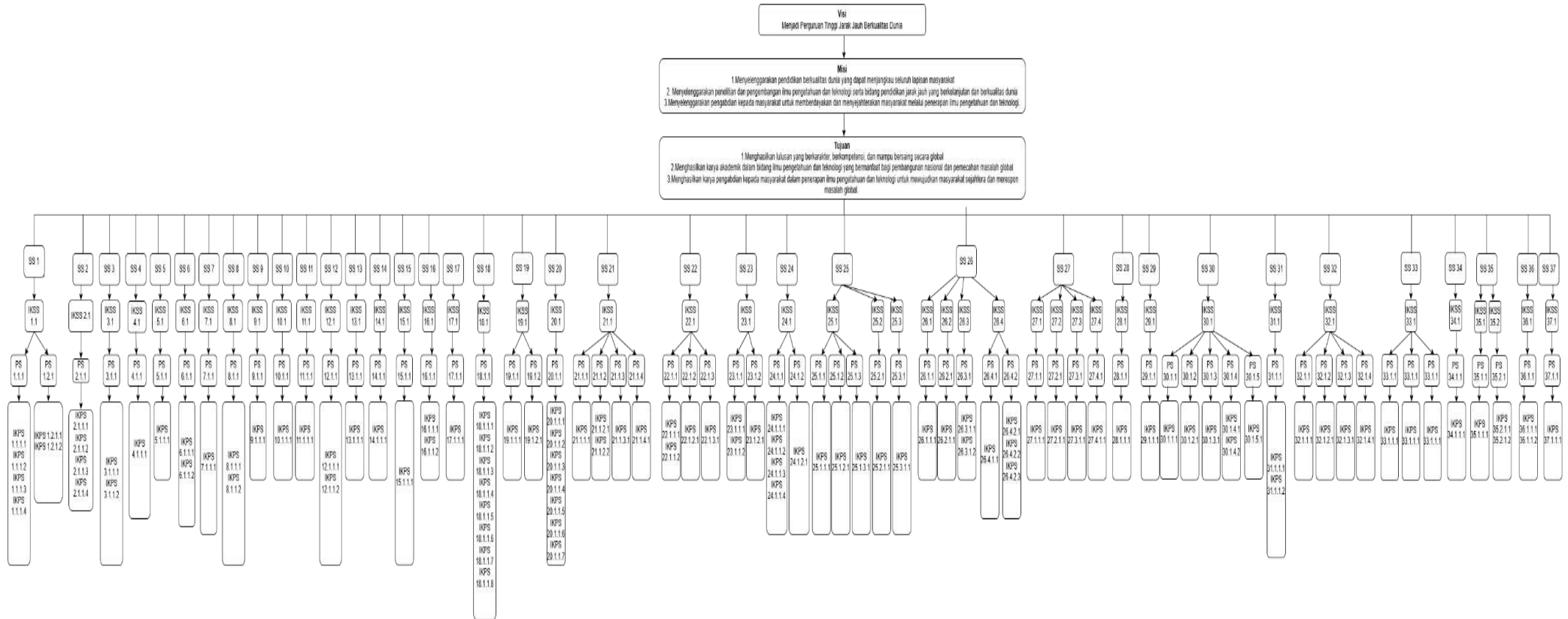
Sebagai perguruan tinggi negeri yang telah berbadan hukum, UT selalu adaptif dan mengikuti dinamika yang terjadi. Tren peningkatan minat masyarakat terhadap pendidikan tinggi jarak jauh dapat dilihat dari semakin meningkatnya jumlah mahasiswa. Untuk menjaga kredibilitas dan kepercayaan masyarakat, UT selalu menjaga kualitas pembelajaran yang ditawarkan. Kemudahan akses dalam penyelenggaraan berbagai layanan menjadi prinsip yang selalu diutamakan.

Renstra UT Tahun 2025-2029 ini merupakan komitmen untuk dijadikan rujukan bagi semua sivitas akademika dalam menyelenggarakan UT. Oleh karena itu, Renstra ini merupakan rujukan utama sebagai pemicu dan pemacu segala aktivitas untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Seluruh sivitas akademika UT, di bawah pimpinan Rektor, bergerak bersama mewujudkan visi-misi dengan berlandaskan dokumen ini.

Berbagai gambaran umum tentang visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi dan target kinerja, serta kerangka pendanaan telah disajikan dalam dokumen ini. Demikian juga, langkah-langkah perencanaan strategis serta indikator kinerja setiap program strategis telah dijabarkan. Dengan acuan yang telah disusun sedemikian rinci maka Renstra ini menjadi alat navigasi utama Rektor untuk memimpin UT menjadi PTJJ berkualitas dunia melalui ekosistem pembelajaran digital yang kuat.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 POHON KINERJA UNIVERSITAS TERBUKA



LAMPIRAN 2 DEFINISI OPERASIONAL, KRITERIA, DAN RUMUS PERHITUNGAN IKSS

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
Akademik			
SS 1	Mengembangkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif sesuai dengan standar nasional dan internasional untuk membangun kesadaran awal tentang green industry, green jobs dan green skills, pada jenjang diploma/vokasi, sarjana, pascasarjana, profesi dan program sertifikat (<i>microcredentials</i>) sebagai bagian dari program lifelong learning dengan memanfaatkan teknologi digital.		
IKSS 1.1	Jumlah program studi yang menerapkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif sesuai dengan standar nasional dan internasional dengan memanfaatkan teknologi digital.	Definisi Operasional: Program studi yang menerapkan kurikulum yang memungkinkan adanya penyesuaian terhadap kebutuhan mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan dunia kerja. Program Studi convergen dan program <i>microcredentials</i> sebagai bagian dari program lifelong learning dengan memanfaatkan teknologi digital. Kriteria: 1. Program Studi Baru (N1) Bobot 20% 2. Kurikulum Fleksibel, Adaptif, relevan, aplikatif, dan kompetitif (N2) Bobot 40% 3. Program <i>microcredential</i> (N3) Bobot 10% 4. Program studi yang menyediakan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus (N4) 10% 5. Program studi internasional (kelas internasional) (N5) 10% 6. Mata kuliah internasional (N6) 10% Formula: Pengembangan Kurikulum = N1(20%) + N2 (40%) + N3 (10%) + N4 (10%) + N5 (10%) + N6 (10%)	Persentase
SS 2	Mengembangkan bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.		
IKSS 2.1	Persentase jumlah bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	Definisi Operasional: 1. BA berbasis digital adalah BA yang dikemas/disajikan dalam format yang memanfaatkan fitur teknologi digital terkini secara optimal dan terintegrasi, seperti teks, gambar, audio, video, animasi, dan simulasi, serta dapat diakses dari mana saja dan kapan saja melalui perangkat elektronik seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone; 2. BA interaktif adalah BA digital yang dapat berinteraksi dengan pengguna, seperti memicu pengguna untuk berpikir melalui pemberian pertanyaan, mengisi quiz, mengerjakan tugas, dan berdiskusi;	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		3. BA inklusif adalah bahan ajar yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna tanpa memandang kemampuan, bahasa, budaya, jenis kelamin, usia, atau kondisi fisik. BA inklusif bertujuan untuk menciptakan lingkungan pembelajaran yang adil, setara, dan menyenangkan bagi semua pengguna; 4. BA inovatif adalah BA yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran yang berubah dan berkembang, dengan menggunakan teknologi, metode, dan pendekatan yang baru dan kreatif. BA inovatif bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, meningkatkan motivasi belajar, dan mempersiapkan pengguna untuk menghadapi tantangan di masa depan; 5. BA personal adalah BA yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan dan kemampuan individu pengguna. BA personal bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan menyajikan materi yang relevan dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna; 6. BA berkualitas adalah BA yang memenuhi standar kualitas yang tinggi dalam hal isi, struktur, dan penyajian. Kriteria: 1. N1: Persentase jumlah bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini. 2. N2: Persentase umur bahan ajar kurang dari atau sama dengan 5 tahun 3. N3: Ketersediaan sistem review pengembangan bahan ajar secara digital 4. N4: Ketersediaan Bahan Ajar dalam bahasa Inggris Formula: Bahan Ajar= N1(25%) + N2(25%) + N3 (25%)+ N4 (25%)	
SS 3	Mengembangkan proses pembelajaran jarak jauh yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini (misal AI dan Learning Analytics) untuk menciptakan pengalaman belajar yang mendukung keterlibatan mahasiswa secara lebih efektif dengan menggunakan platform pembelajaran.		
IKSS 3.1	Persentase mata kuliah yang menggunakan pembelajaran jarak jauh berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini (misal AI dan Learning Analytics)	Definisi Operasional: Pembelajaran jarak jauh yang berbasis digital interaktif (e-learning) adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan teknologi digital untuk mengakses materi pembelajaran dan berinteraksi dengan dosen/tutor/instruktur dan peserta lainnya.	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria: - N1: Layanan pembelajaran program diploma, sarjana, diploma, vokasi, profesi, magister, dan doktoral yang memanfaatkan teknologi digital yang berkualitas dengan teknologi terkini - N2: Tersedianya layanan pembelajaran praktik/praktikum program sarjana dan program vokasi yang memanfaatkan teknologi digital yang berkualitas dengan teknologi terkini. Formula: Mata Kuliah = $N1(50\%) + N2(50\%)$	
SS 4	Mengembangkan sistem asesmen yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.		
IKSS 4.1	Tersedianya sistem asesmen yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.	Definisi Opeasional: Sistem asesmen berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal adalah suatu sistem yang menggunakan teknologi digital untuk mengukur kemajuan pembelajaran peserta secara akurat, efektif, dan efisien. Kriteria: N1: Tersedianya pelaksanaan asesmen tatap muka dan online yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini termasuk sistem remedial. Formula sistem asesmen online (N1): $(\text{Progres kelengkapan/keterselesaian system asesmen online proctoring/Sistem lengkap}) \times 100\%$ Definisi Operasional sistem asesmen inklusif: Layanan asesmen yang dirancang untuk mengakomodasi mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Kriteria: sistem asesmen inklusif Formula sistem asesmen inklusif (N2): $(\text{Progres kelengkapan/keterselesaian asesmen inklusif/Sistem lengkap}) \times 100\%$ Definisi Operasional sistem asesmen online untuk skema ujian esai	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		berbasis AI: Sistem asesmen online yang dikembangkan untuk skema ujian dalam bentuk esai dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) antara lain untuk pemeriksaan ujian esai. Kriteria: sistem asesmen online yang inovatif dan personal berbasis digital Formula (N3): (Progres kelengkapan/keterselesaian fitur asesmen online untuk skema ujian esai berbasis AI / Sistem lengkap) x 100% Definisi Operasional sistem remedial: Sistem Remedial yang buat untuk mahasiswa menuntaskan capaian pembelajarannya Kriteria sistem remedial: sistem remedial yang memungkinkan mahasiswa masih bisa mempelajari materi. Formula sistem remedial (N4): (Progres kelengkapan/keterselesaian fitur Sistem Remedial/Sistem lengkap) x 100% Formula Gabungan: (N1+N2+N3+N4)/4	
SS 5	Menguatkan kolaborasi dengan penyedia teknologi dan pemerintah dalam membangun akses internet untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal).		
IKSS 5.1	Jumlah daerah 3T (Kabupaten) yang dapat mengakses pendidikan tinggi secara online	Definisi Operasional: Daerah 3T (Kabupaten) yang dapat mengakses pendidikan tinggi secara online Kriteria: Daerah 3T (Kabupaten) yang dapat mengakses pendidikan tinggi secara online Formula: (Jumlah daerah 3T / Target Tahunan IKPS 5.1.1.1) X 100%	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
SS 6	Menata ICE Institute sebagai lokapasar (market place) mata kuliah daring dan memperkuat keterlibatan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.		
IKSS 6.1	Tersedianya sistem yang terintegrasi untuk mata kuliah daring dan menambah serta memperkuat keterlibatan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri.	Definisi Operasional: Sistem lokapasar (<i>market place</i>) yang terintegrasi dengan berbagai mata kuliah yang ada di dalam konsorsium ICE-I, penambahan dan penguatan keterlibatan perguruan tinggi di dalam maupun luar negeri melalui kerja sama yang aktif. Kriteria 1. N1: Tersedianya sistem (aplikasi lokapasar) ICE yang terintegrasi 2. N2: Jumlah mata kuliah yang dikelola dalam sistem market place ICE Institute 3. N3: Jumlah perguruan tinggi yang menjadi <i>provider</i> mata kuliah dalam sistem lokapasar (market place) ICE Institute dalam dan luar negeri 4. N4: Jumlah pengguna mata kuliah ICE Institute Formula: $ICE-I = N1(25\%) + N2(25\%) + N3(25\%) + N4(25\%)$	Persentase
SS 7	Menjalin kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pendidikan dengan DUDIKA, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.		
IKSS 7.1	Tersedianya kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pendidikan dengan DUDIKA, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.	Definisi Operasional: Kerja sama program studi dengan program studi nasional, internasional, dan DUDIKA. Kriteria 1. Jumlah kerja sama prodi nasional, prodi internasional, dan DUDIKA Formula: Jumlah kerja sama per target tahunan x 100%	Persentase
SS 8	Mengembangkan riset yang sesuai dengan prioritas UT, nasional dan tren global, seperti inovasi pendidikan digital, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi berbasis teknologi yang diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan global.		
IKSS8.1	Tersedianya riset yang sesuai dengan prioritas UT, nasional dan tren global, seperti inovasi pendidikan digital, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi	Definisi Operasional: Riset yang dikembangkan program studi, riset dalam bidang sistem pembelajaran jarak jauh dan institusi UT, riset yang mendukung hilirisasi, riset yang mendapatkan pendanaan eksternal dan kolaborasi. Kriteria:	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
	berbasis teknologi yang diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan global.	1. N1: Jumlah riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh program studi, riset sistem pembelajaran jarak jauh dan institusi UT, sesuai dengan kebijakan nasional yang sumber pendanaannya dari UT atau eksternal untuk mendukung hilirisasi pembangunan nasional. 2. N2: Jumlah keluaran penelitian dalam bentuk artikel jurnal internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi/HKI/ Paten. Formula: Riset = $N1(50\%) + N2(50\%)$	
SS 9	Menguatkan penelitian multidisiplin yang melibatkan Teknologi Pendidikan dan <i>Science Technology Engineering Arts Mathematics</i> (STEAM).		
IKSS 9.1	Tersedianya penelitian berbasis STEAM dan Teknologi Pendidikan	Definisi operasional: Penelitian multidisiplin berbasis STEAM dan teknologi Pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan institusi pendidikan. Kriteria: Penelitian berbasis STEAM dan teknologi pendidikan yang dilakukan oleh dosen UT Formula: (Jumlah riset/Target per tahun pada IKPS 9.1.1.1) x 100%	Persentase
SS 10	Mengembangkan riset dengan memanfaatkan data besar (big data) dari platform digital UT untuk mengambil kebijakan pendidikan dan pengembangan strategi pembelajaran UT yang tepat.		
IKSS 10.1	Tersedianya riset yang memanfaatkan big data dari platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UT	Definisi operasional: Penelitian yang memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Kriteria: Penelitian yang menggunakan <i>big data</i> dari platform digital Formula: (Jumlah riset/Target per tahun pada IKPS 10.1.1.1) X 100 %	Persentase
SS 11	Menjalin kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas penelitian dengan dudika, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi		

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKSS 11.1	Tersedianya kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi	Definisi operasional: Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama sumber daya (<i>resource sharing</i>) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian Kriteria: Kerjasama dibuktikan dengan MoU/PKS/IA dan dokumen penunjang (<i>in kind</i> atau <i>with cost</i>) Formula: Jumlah kerja sama/target tahunan pada IKPS 11.1.1.1	Persentase
SS 12	Memanfaatkan hasil penelitian, dan program MOOCs sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital praktis, kewirausahaan digital, literasi keuangan, praktik keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.		
IKSS 12.1	Tersedianya hasil penelitian, dan program MOOCs sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital praktis, kewirausahaan digital, literasi keuangan, praktik keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat	Definisi Operasional: Memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan hasil penelitian dari UT atau luar UT. Membantu memecahkan masalah yang dihadapi oleh masyarakat dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang dikembangkan dan hasil penelitian dari UT atau luar UT. Kriteria: 1. N1: Jumlah program Pengabdian kepada Masyarakat termasuk PkM MOOCs, Dosen, Nasional, Internasional dan kewirausahaan Mahasiswa 2. N2: Jumlah peserta yang memanfaatkan program MOOCs Formula: $N1(50\%) + N2(50\%)$	Persentase
SS 13	Memperkuat kolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga pemerintah daerah, sektor industri, LSM nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur dalam hal berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas pengabdian masyarakat sebagai strategi untuk peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.		
IKSS 13.1	Tersedianya kolaborasi dengan komunitas lokal, lembaga pemerintah daerah, sektor industri, LSM nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur dalam hal berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas	Definisi operasional: Kolaborasi dilakukan melalui pemanfaatan bersama sumber daya (<i>resource sharing</i>) dan merupakan hilirisasi produk penelitian Kriteria: Kolaborasi dibuktikan dengan MoU/PKS/IA Formula: Jumlah kerja sama/target tahunan	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
	pengabdian masyarakat sebagai strategi untuk peningkatan kualitas pemberdayaan masyarakat.		
Tata Kelola dan SDM			
SS 14	Penguatan konsolidasi antar organ menuju <i>Good University Governance</i> .		
IKSS 14.1	Terlaksananya konsolidasi antar organ secara terencana.	Definisi Operasional: Penguatan konsolidasi antar organ menuju <i>Good University Governance (GUG)</i> adalah persentase ketersediaan dokumen formal yang mengatur mekanisme koordinasi, kolaborasi, dan sinergi antar tiga organ utama universitas (MWA, Rektor, dan SAU), termasuk regulasi yang memuat aspek rewiu, <i>check and balance</i>, kewenangan, ketentuan revisi, serta kompetensi, kualifikasi, sikap, dan pengalaman SDM yang relevan. Nilai dihitung berdasarkan kelengkapan instrumen kelembagaan yang mendukung tata kelola universitas yang baik. Kriteria: 1. Tersedianya dokumen antar organ yang disepakati Bersama oleh 3 organ 2. Terimplementasinya mekanisme/peraturan organisasi yang mengatur hubungan kerja antar organ. 3. Tersedianya sistem yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, mengolah dan mendistribusikan serta monitoring dan evaluasi hasil koordinasi antar organ Formula: N1: hasil IKPS 14.1.1.1 N2: hasil IKPS 14.1.1.2 N3: hasil IKPS 14.1.1.3 Total: $(N1+N2+N3)/3$	Persentase
SS 15	Menguatkan tata kelola yang <i>agile</i> dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan kewajaran, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, dan nirlaba		
IKSS 15.1	Tersedianya sistem terintegrasi yang mendukung tata kelola UT yang <i>agile</i>	Definisi Operasional: Ketersediaan sistem terintegrasi yang mendukung penguatan tata kelola UT Kriteria: Tersedianya:	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. Regulasi=20% Regulasi mencakup mekanisme <i>check and balance</i> serta ketentuan terkait pihak-pihak yang berwenang dalam membuat keputusan, kewenangan dalam rapat konsolidasi 2. Kelembagaan = 20% Kelembagaan meliputi pembentukan organ-organ (SOTK), review regulasi dan kelembagaan, ketentuan revisi SOTK dan penguatan kelembagaan organ 3. SDM = 20% SDM meliputi pengelolaan dan pengembangan SDM Organ, termasuk memiliki standar minimum kualifikasi SDM. Aspek SDM juga mencakup ketercukupan kualitas dan kuantitas SDM dalam menopang SOTK 4. Sistem Informasi =20% Sistem Informasi yang mendukung tata Kelola yang <i>agile</i> 5. Penerapan Zona Integritas=20% Formula: 1. $N1 = \text{Regulasi: (jumlah regulasi yang tersedia/regulasi yang dibutuhkan)} \times 0.20$ 2. $N2 = \text{Kelembagaan: (jumlah dokumen kelembagaan/SOTK yang tersedia : jumlah dokumen)} \times 0.20$ 3. $N3 = \text{Tersedianya standar minimum kualifikasi SDM: (kesesuaian posisi jabatan/jumlah posisi)} \times 0.20$ 4. $N4 = (\text{Tersedianya system informasi}) \times 0.20$ 5. $N5 = (\text{Jumlah Unit yang menjalankan Zona Integritas /Jumlah Target}) \times 100\% \times 0.20$ $N = N1 + N2 + N3 + N4 + N5$	
SS 16	Menguatkan sistem manajemen strategik untuk peningkatan kinerja		
IKSS 16.1	Peningkatan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)	Definisi Operasional: Persentase ketercapaian IKU UT yang dimandatkan ke unit terkait dan tingkat kepuasan stakeholders Kriteria: 1. N1: Pencapaian IKU unit pada masing-masing unit yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja antara Pimpinan unit dengan Rektor 2. N2: Tingkat kepuasan mitra kerja sama (IKMT), tutor dan pegawai (IKP). Indeks kepuasan dihitung dengan ketentuan sesuai SK Rektor Formula:	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		$((N1+N2)/2)*100\%$	
SS 17	Menguatkan peran UT sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembuatan kebijakan.		
IKSS 17.1	Partisipasi UT dalam forum kebijakan pada badan pengambilan keputusan pemerintah pusat dan daerah.	Definisi Operasional: Kontribusi UT dalam mendukung pemerintah dalam bentuk gagasan/hasil riset. Kriteria: Kegiatan seminar/webinar dan hasil penelitian terkait kebijakan pemerintah. Formula: Jumlah seminar/webinar dan hasil penelitian yang terkait kebijakan pemerintah	kegiatan
SS 18	Menguatkan SDM unggul melalui <i>Human Capital Management</i> berbasis teknologi mutakhir		
IKSS 18.1	Meningkatnya kualitas SDM UT berdasarkan <i>grand design Human Capital Management</i> (HCM) UT	Definisi Operasional: Human Capital Management (HCM) adalah pendekatan strategis untuk mengelola sumber daya manusianya (karyawan). HCM mencakup serangkaian praktik yaitu (1) merencanakan, (2) merekrut, (3) melatih, (4) membentuk budaya kerja dan organisasi, (5) mengelola kinerja, (6) mengembangkan talenta dan karir, (7) mengembangkan kompetensi, (8) memberikan penghargaan dan pengakuan, dan (9) melaksanakan pemensiunan untuk mencapai tujuan organisasi. Kriteria Perencanaan dan Pelaksanaan: 1. Tersedianya Grand Design Manajemen SDM yang terupdate. 2. Terlaksananya implementasi, monitoring, dan evaluasi Grand Design Manajemen SDM. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara sistematis terhadap pelaksanaan program-program dalam Grand Design Manajemen SDM, mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, capaian output/outcome, kendala, serta rekomendasi perbaikan. Kegiatan monitoring dan evaluasi mencakup pelaporan, review dokumen, pengumpulan data, serta evaluasi atas indikator kinerja tiap program SDM. 3. Salah satu indikator peningkatan Kualitas dosen dari Jumlah dosen yang mengikuti kegiatan tridharma di luar PT, bekerja sebagai praktisi di dunia industri, atau membimbing mahasiswa berkegiatan di luar program studi. Kriteria Monev: • Tersedianya laporan hasil monitoring dan evaluasi secara periodik (minimal 2 kali per tahun). • Monitoring dan evaluasi mencakup minimal 80% program dalam Grand Design SDM.	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: Pencapaian target diukur dari akumulasi pencapaian masing-masing IKPS (IKPS 18.1.1.1-18.1.1.8) 1. N1= Terlaksananya Perencanaan, rekrutmen dan penempatan yang sesuai dengan grand design HCM 2. N2= Terlaksananya program pengembangan SDM dalam berbagai modus dengan jumlah jam pelatihan yang memadai, termasuk talent pool 3. N3= Terlaksananya program dan kegiatan penguatan budaya kerja KIIARA pada seluruh pegawai UT 4. N4= Terlaksananya program pemberian penghargaan, imbalan, dan pengakuan berdasarkan merit system, termasuk program persiapan pensiun. 5. N5= Guru Besar dan Lektor Kepala 6. N6= Dosen bergelar doktor dan tendik bergelar magister 7. N7= Pegawai (dosen dan tendik) yang memiliki sertifikat pendidik, sertifikasi nasional kompetensi, teknis (TIK, keuangan, Barjas), dan/atau profesi 8. N8= Tersedia database dan aplikasi Human Capital Management (HCM) yang meliputi fungsi-fungsi HCM sesuai kebutuhan Ngabungan=(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7+N8)/8	
SS 19	Menguatkan budaya kerja yang mendukung ekosistem pembelajaran digital UT		
IKSS 19.1	Tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital oleh dosen dan mahasiswa dan budaya kerja yang mendukung ekosistem pembelajaran digital UT.	Definisi Operasional: Tingkat adopsi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran digital oleh dosen dan mahasiswa diukur berdasarkan: N1: Sistem kerja digital dan <i>agile</i> yang didukung dengan tersedianya regulasi, prosedur/SOP yang mendukung penerapan system kerja digital dan <i>agile</i> (Capaian IKPS 19.1.1) N2: Skor Indeks Budaya Pembelajaran Digital (Capaian IKPS 19.1.2) Kriteria: Semakin tinggi angka adopsi dan pemanfaatan, semakin kuat dukungan budaya kerja terhadap ekosistem digital. Formula: $(N1 \times 40 \%) + (N2 \times 60 \%)$	Skor

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Skor 90–100 Sangat Tinggi 80–89 Tinggi 70–79 Cukup 60–69 Rendah <60 Sangat Rendah	
Perencanaan dan Keuangan			
SS 20	Mengembangkan sumber pendapatan dari selain biaya pendidikan.		
IKSS 20.1	Meningkatnya sumber pendapatan dari selain pendapatan layanan akademik	Definisi Operasional: Peningkatan sumber pendapatan dari selain pendapatan layanan akademik diukur dari persentase capaian target jumlah profit bersih, persentase proporsi BOPO unit usaha, proporsi jumlah pendapatan unit usaha dibandingkan jumlah total pendapatan UT, jumlah unit usaha UT menjadi BUM UT dan anak usaha BUM UT, jumlah dividen BUM UT, pertumbuhan dana abadi PTNBH, dan pengelolaan hasil pengembangan investasi PTNBH UT. Ketercapaian sasaran diukur berdasarkan ketercapaian masing-masing IKPS: N1: (Capaian Jumlah profit bersih yang bersumber dari <i>revenue generating activities</i> (RGAs) selain pendapatan layanan akademik/target jumlah profit bersih)*100 N2: (Capaian persentase BOPO/target persentase proporsi biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) unit usaha)*100 N3: (Capaian proporsi jumlah pendapatan unit usaha dibandingkan jumlah total pendapatan UT/target proporsi jumlah pendapatan unit usaha dibandingkan jumlah total pendapatan UT)*100 N4: (Capaian jumlah unit usaha UT menjadi Badan Usaha Milik UT dan anak usaha Badan Usaha Milik UT/target jumlah unit usaha UT menjadi Badan Usaha Milik UT dan anak usaha Badan Usaha Milik UT)*100 N5: (Capaian Jumlah dividen Badan Usaha Milik UT/Target Jumlah dividen Badan Usaha Milik UT)*100 N6: (Capaian Pertumbuhan Dana Abadi PTNBH/Target Pertumbuhan Dana Abadi PTNBH)*100 N7: (Capaian Pengelolaan hasil pengembangan Investasi PTNBH UT/Target Pengelolaan hasil pengembangan Investasi PTNBH UT)*100 Formula: $N=(N1+N2+N3+N4+N5+N6+N7)/7$	Persentase
SS 21	Mengembangkan sistem pengelolaan keuangan digital terintegrasi yang transparan dan akuntabel.		

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKSS 21.1	Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip <i>good university governance</i> yang berkelanjutan	Definisi Operasional: Akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip <i>good university governance</i> merupakan kompilasi penjumlahan hasil dari program sebagai berikut: 1. Persentase integrasi tata kelola pengelolaan dana. 2. Akuntabilitas pengelolaan dana Universitas. 3. Nilai Kinerja Anggaran. 4. Predikat Sistem Akuntabilitas Kinerja I instansi Pemerintah. Kriteria: 1. Nilai integrasi pengelolaan dana keuangan (N1) (bobot= 25%) 2. Akuntabilitas pengelolaan dana Universitas (N2) (bobot = 25%) 3. Nilai kinerja anggaran (N3) (bobot 25%) 4. Predikat SAKIP (N4) (25%) Formula: Nilai akuntabilitas pengelolaan keuangan dengan prinsip <i>good university governance</i> yang berkelanjutan = N1 (25%) + N2 (25%) + N3 (25%) + N4 (25%)	Persentase
TIK, Sarana, dan Prasarana			
SS 22	Mengembangkan tata kelola TIK dan platform online yang andal, mudah diakses bagi seluruh stakeholder, serta ramah bagi mahasiswa berkebutuhan khusus		
IKSS 22.1	Tersedianya layanan digital yang dapat diakses secara stabil dan konsisten	Definisi Operasional: Layanan digital UT meliputi seluruh aplikasi, sistem, dan platform daring yang digunakan untuk proses akademik, administrasi, dan layanan mahasiswa (misalnya: SIA, portal, e-learning, repository digital, layanan administrasi daring). Stabil dan konsisten didefinisikan sebagai ketersediaan layanan (availability) yang dapat diakses tanpa gangguan besar dalam periode operasional yang ditentukan (24 jam x 7 hari). Standar acuan: -minimal 99% uptime dalam 1 bulan dianggap memenuhi kriteria stabil dan konsisten. -meminimalisasi eror pada sistem layanan digital UT Kriteria: Uptime $\geq$ 99% : Sangat Baik Uptime 98% - 98,9% : Baik Uptime 95% - 97,9% : Cukup Uptime < 95% : Kurang	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: $\text{Persentase layanan stabil} = \left(1 - \frac{\text{Total downtime (menit)}}{\text{Total waktu observasi (menit)}} \right) \times 100\%$ Pengukuran dilakukan dengan monitoring sistem (<i>network & server monitoring tools</i>) yang mencatat downtime total dalam periode waktu yang ditetapkan (harian, mingguan, bulanan).	
SS 23	Mengembangkan infrastruktur TIK di seluruh wilayah UT untuk mendukung ekosistem pembelajaran digital		
IKSS 23.1	Tersedianya infrastruktur TIK yang sesuai standar pada unit UT	Definisi Operasional: Proporsi infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang memenuhi kriteria untuk mendukung pembelajaran digital. Kriteria: 1. Jumlah dan kualitas perangkat keras seperti komputer, tablet, dan perangkat jaringan yang tersedia dan berfungsi dengan baik. 2. Aplikasi dan platform pembelajaran digital yang sesuai dengan standar pendidikan dan dapat diakses oleh mahasiswa dan tutor. 3. Kecepatan dan stabilitas koneksi internet yang memadai untuk mendukung aktivitas pembelajaran online. 4. Sistem keamanan yang melindungi data dan privasi pengguna dari ancaman siber Formula: (Jumlah infrastruktur yang memenuhi standar/Total jumlah infrastruktur) X 100%	Persentase
SS 24	Menguatkan implementasi UT Green University dalam pengelolaan sarana dan prasarana secara efektif dan efisien		
IKSS 24.1	Tersedianya sarana dan prasarana berbasis digital yang ramah lingkungan	Definisi Operasional: proporsi kualitas sarana dan prasarana berbasis digital untuk mendukung UT ramah lingkungan Kriteria: 1. Persentase tersedianya sarana dan prasarana berbasis digital untuk mendukung UT ramah lingkungan 2. Jumlah sarana dan prasarana digital UT yang memperhatikan teknologi ramah lingkungan 3. Jumlah status sarana dan prasarana dengan status baik	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		4. Tersedianya sistem yang menunjang proses manajemen sarana dan prasarana Formula: (Jumlah sarana dan prasarana digital yang tersedia dan berfungsi sesuai standar/Jumlah total sarana dan prasarana digital yang direncanakan) X 100%	
Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko			
SS 25	Mengintegrasikan Simintas UT dengan SN Dikti, Standar Internasional, dan peraturan perundang-undangan terkini yang sesuai dengan karakter UT.		
IKSS 25.1	Tersedianya Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan SN Dikti dan Standar Pendidikan Tinggi (SPT), sesuai dengan Karakteristik UT (Simintas 2024) di setiap unit yang meliputi Kebijakan, Pedoman, prosedur, Petunjuk Kerja dan Rekaman.	Definisi operasional: Sistem Penjaminan Mutu adalah keseluruhan mekanisme yang digunakan oleh perguruan tinggi untuk menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berkelanjutan, sehingga memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) dan standar tambahan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi itu sendiri. Universitas Terbuka mengembangkan sistem penjaminan mutu internal melalui platform SIMINTAS (Sistem Informasi Manajemen Mutu Terintegrasi dan Terkendali), yang mendukung PPEPP secara digital, terstandar, dan terdokumentasi untuk seluruh unit kerja dan program studi. Simintas UT merupakan sistem penjaminan kualitas internal (<i>internal quality assurance system</i>) UT yang memuat rangkaian unsur dan proses terkait kualitas pendidikan UT sebagai PTJJ yang saling berkaitan dan tersusun secara teratur dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan UT secara berencana dan berkelanjutan (SIMINTAS UT 2024). Perangkat SPMI UT: 1. Kebijakan SPMI 2. Pedoman Implementasi 3. Standar Dikti 4. Tata Cara Pendokumentasian SPMI Struktur Dokumen SPMI UT: 1. Kebijakan 2. Pedoman 3. Prosedur 4. Petunjuk Kerja (PK) 5. Rekaman	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria: Penjaminan mutu internal mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP) standar pendidikan tinggi yang terdiri dari standar akademik dan non akademik. Standar akademik mencakup Tridharma meliputi - Standar Pendidikan, - Standar Penelitian, - Standar Pengabdian kepada Masyarakat Standar Non Akademik meliputi - organisasi - keuangan - kemahasiswaan - ketenagaan - sarana prasarana (Permendikbudristekdikti No 53/2023). Formula: Persentase tersedianya Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menggabungkan bobot dari standar pendidikan tinggi dan data kuantitatif. Rumus yang digunakan adalah: Indeks Kualitas Sistem Penjaminan Mutu (IKSPM) = $(PSP \times \text{Bobot Standar Pendidikan}) + (PSPN \times \text{Bobot Standar Penelitian}) + (PSPM \times \text{Bobot Standar Pengabdian kepada Masyarakat}) + (PSPNA \times \text{Bobot Standar Non-akademik})$ Bobot Setiap Komponen: - Standar Pendidikan: 30% - Standar Penelitian: 25% - Standar Pengabdian kepada Masyarakat: 20% - Standar Non-akademik: 25% Keterangan (2024): PSP = Pencapaian Standar Pendidikan (persentase dari total dokumen yang disediakan)	

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		PSPN = Pencapaian Standar Penelitian (persentase dari total dokumen yang disediakan) PSPM = Pencapaian Standar Pengabdian kepada Masyarakat (persentase dari total dokumen yang disediakan) PSPNA = Pencapaian Standar Non-akademik (persentase dari total dokumen yang disediakan)	
IKSS 25.2	Proporsi unit kerja di UT yang telah memanfaatkan Simintas yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini dalam operasionalnya.	Definisi Operasional Jumlah unit kerja UT (Pusat dan Daerah) yang mengimplementasikan SPMI dan Simintas UT Kriteria - Implementasi simintas UT mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan (PPEPP). - Unit kerja UT yang memanfaatkan Simintas UT. Formula Persentase unit yang mengimplementasikan SPMI dan Simintas dibandingkan jumlah seluruh unit di UT (Pusat dan Daerah) X 100% Catatan (2024): Jumlah unit di UT Pusat: 32 Jumlah UT Daerah: 39	Persentase
IKSS 25.3	Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan Standar Internasional (AAOU Framework) di unit	Definisi Operasional: AAOU Framework adalah kerangka kerja penjaminan mutu yang dikembangkan oleh Asian Association of Open Universities (AAOU) untuk membantu universitas terbuka dan jarak jauh di Asia dalam menjamin dan meningkatkan mutu pendidikan secara konsisten. AAOU Quality Assurance Framework adalah kerangka mutu yang dirancang untuk: - Membantu perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh (Open and Distance Learning/ODL) dalam merancang, melaksanakan, mengevaluasi, dan meningkatkan sistem penjaminan mutu internal mereka. - Menjadi acuan standar regional yang kontekstual dengan karakteristik pendidikan terbuka dan jarak jauh (PTJJ), termasuk fleksibilitas, akses luas, dan penggunaan teknologi. Komponen AAOU Framework meliputi beberapa domain mutu utama, antara lain: <i>Governance and Management</i>	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		2. <i>Curriculum Design and Development</i> 3. <i>Learning and Teaching</i> 4. <i>Assessment of Student Learning</i> 5. <i>Student Support</i> 6. <i>Learning Resources</i> 7. <i>Human Resources</i> 8. <i>Research and Community Engagement</i> 9. <i>Learning Environment and Infrastructure</i> 10. <i>Quality Assurance System and Processes</i> Masing-masing domain dilengkapi dengan indikator mutu, praktik baik (<i>best practices</i>), dan mekanisme evaluasi. Kriteria: Unit-unit di UT yang melaksanakan sistem penjaminan mutu yang terintegrasi dengan standar internasional (AAOU Framework). Formula: (Jumlah unit pelaksana/Jumlah unit di UT) X 100% Catatan (2024): Jumlah unit di UT Pusat: 32 Jumlah UT Daerah: 39	
SS 26	Memperkuat audit/Asesmen mutu secara berkala yang terintegrasi dengan ekosistem pembelajaran digital dalam rangka mencapai dan mempertahankan peringkat akreditasi/sertifikasi dari lembaga nasional dan internasional yang diakui oleh pemerintah.		
IKSS 26.1	Terlaksananya Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis elektronik (SPBE)	Definisi Operasional: Audit Mutu Internal (AMI) merupakan prosedur untuk melakukan tes dan mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk layanan di organisasi. AMI dilakukan untuk mengevaluasi penerapan dan capaian standar UT (SIMINTAS 2024). Persentase Implementasi Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis teknologi adalah proporsi dari total asesmen atau audit mutu internal yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Kriteria:	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria audit adalah kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi. (Permendikbudristekdikti No 53/2023). **) Asesmen/Audit AMI baru bisa dilaksanakan jika Instrumennya telah siap. Untuk baseline tahun 2024, instrumen yang sudah siap adalah AMI UT Daerah. Formula: Indeks AMI berbasis Teknologi (IAMIBT) diperoleh secara komposit dari jumlah nilai: $x = \frac{\text{Total Skor Implementasi AMI berbasis teknologi}}{\text{Total Maksimal Skor Potensial}} \times 100$ Catatan (2024): AMI juga akan dilakukan terhadap seluruh unit operasional yang ada di UT, tidak hanya berfokus di Prodi. Unit operasional termasuk diantaranya: Direktorat Administrasi, Akademik, dan Kemahasiswaan; Direktorat Sistem Informasi, Pusat Bantuan Belajar, Pusat Pengujian, Pusat Layanan Bahan Ajar, Pusat Pengembangan Bahan Ajar Multimedia, Pusat Perpustakaan dan Kearsipan.	
IKSS 26.2	Unit kerja yang telah menindaklanjuti hasil Asesmen/Audit Mutu Eksternal (AAOU)	Definisi Operasional: Persentase unit kerja yang telah menindaklanjuti hasil Asesmen/Audit Mutu Eksternal, yang mengacu pada hasil temuan. Asesmen ini mencakup evaluasi terhadap sistem, proses, dan hasil kinerja unit kerja untuk memastikan kesesuaian dengan standar nasional maupun internasional. Kriteria: Untuk menganggap bahwa suatu unit kerja telah mengimplementasikan Asesmen/Audit Mutu Eksternal, perlu memenuhi kriteria berikut: Dokumen Bukti Audit: Terdapat laporan resmi hasil audit yang disusun oleh asesor eksternal yang kredibel (misalnya, BAN-PT, LAM, atau lembaga internasional akreditasi). Rencana Tindak Lanjut: Unit kerja telah menyusun dan mulai melaksanakan rencana tindak lanjut berdasarkan hasil asesmen/audit. Periode Pelaksanaan: Asesmen/audit dilakukan dalam periode tertentu. Standar Acuan: Asesmen/audit dilakukan berdasarkan standar mutu yang relevan (nasional/internasional). Formula:	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Jumlah unit kerja yang telah Implementasi Asesmen/Audit Mutu Eksternal dihitung dengan formula: $\frac{\text{jumlah unit kerja yang telah mengimplementasikan Asesmen / audit mutu eksternal}}{\text{total unit}} \times 100\%$ Catatan (2024): Variabel jumlah unit di UT yang relevan dengan framework AAOU ditentukan berdasarkan hasil asesmen AAOU.	
IKSS 26.3	Program studi dengan akreditasi Unggul dan Internasional	Definisi Operasional: Akreditasi Program studi adalah proses penilaian dan pengakuan terhadap kualitas program studi oleh Lembaga Akreditasi Masyarakat (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kriteria: Untuk sebuah program studi mendapatkan akreditasi 'Unggul', harus memenuhi beberapa kriteria utama, antara lain: 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi: Program studi harus memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas dan terukur. 2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama: Struktur tata kelola yang baik dan kerjasama dengan berbagai pihak. 3. Mahasiswa dan Lulusan: Kualitas input mahasiswa dan capaian lulusan. 4. Sumber Daya Manusia: Kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan. 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana: Ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung. 6. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat: Kualitas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Lulusan dan Capaian Tridharma: Hasil dan dampak dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kriteria-kriteria tersebut akan menyesuaikan dengan yang ditetapkan oleh LAM dan BAN-PT sesuai peraturan yang berlaku pada tahun berjalan.	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: Formula untuk menghitung persentase program studi dengan akreditasi 'Unggul' dan internasional adalah sebagai berikut. $N1 = (\text{Jumlah Prodi dengan akreditasi "Unggul"}) / (\text{Jumlah Program Studi}) \times 100$ $N2 = (\text{Jumlah Prodi dengan akreditasi "Internasional"}) / (\text{Jumlah Program Studi}) \times 100$ $(N1+N2)/2$ Catatan (2024): Jumlah Program Studi di Universitas Terbuka (Profesi, Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana): 49	
IKSS 26.4	PT memperoleh akreditasi/sertifikasi internasional	Definisi Operasional: Predikat PT dengan akreditasi/sertifikasi internasional mengacu pada status resmi yang diperoleh PT PJJ dari lembaga akreditasi internasional yang diakui secara global dan oleh pemerintah. Akreditasi ini mencerminkan bahwa institusi telah memenuhi standar kualitas yang tinggi dalam berbagai aspek, seperti kurikulum, sumber daya manusia, fasilitas, teknologi pembelajaran, serta capaian mahasiswa. Dalam konteks PT PJJ, akreditasi/sertifikasi internasional juga menunjukkan kemampuan institusi untuk beradaptasi dengan ekosistem pembelajaran digital dan memenuhi kebutuhan pendidikan jarak jauh sesuai dengan standar global. Kriteria: Untuk mengukur keberhasilan indikator ini, kriteria berikut harus dipenuhi: - Lembaga Akreditasi yang Diakui:- Akreditasi diberikan oleh lembaga internasional yang memiliki reputasi tinggi, seperti AACSB, ABET, atau lembaga akreditasi pendidikan jarak jauh lainnya yang diakui oleh pemerintah. - Status Akreditasi:- Institusi telah mendapatkan predikat akreditasi tingkat "baik sekali" atau setara di skala internasional. - Sertifikat akreditasi atau laporan hasil evaluasi dari lembaga akreditasi tersedia. - Cakupan Akreditasi:- Akreditasi mencakup program studi utama yang mewakili fokus PT PJJ, misalnya program studi berbasis teknologi, pendidikan, atau ekonomi. - Evaluasi lembaga menunjukkan kinerja dan mutu pembelajaran jarak jauh yang sesuai standar. - Relevansi Global:- Akreditasi mencerminkan daya saing internasional dan relevansi institusi dalam mendukung kebutuhan pendidikan jarak jauh yang inovatif. Formula: Terakreditasi / tersertifikasi internasional = 100% Tidak Terakreditasi / tersertifikasi internasional = 0%	Terakreditasi/Tersertifikasi

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
SS 27	Memperkuat peran pengelola manajemen mutu berbasis risiko pada tingkat universitas dan unit yang adaptif.		
IKSS 27.1	Unit kerja yang telah mengimplementasikan sistem manajemen risiko sesuai dengan pedoman universitas. (tingkat implementasi manajemen risiko pada unit kerja).	Definisi operasional: Manajemen Risiko merupakan proses identifikasi peristiwa yang berpotensi dapat mempengaruhi satuan kerja, mengelola risiko agar berada dalam batas toleransi risiko (<i>risk appetite</i>), dan menyediakan penjaminan memadai terkait pencapaian tujuan satuan kerja. Manajemen Risiko wajib diimplementasikan oleh setiap unit kerja/instansi untuk menghindari kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran unit kerja/instansi (Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008) Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu berbasis risiko sesuai dengan pedoman universitas mengacu pada proporsi unit kerja di UT yang telah mengadopsi dan menjalankan sistem manajemen mutu berbasis risiko sebagaimana ditetapkan dalam pedoman atau kebijakan universitas. Sistem ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan mutu institusi. Kriteria: Implementasi sistem manajemen risiko berdasarkan ISO 31000: 2018 terdiri dari: 1. Penetapan scope, konteks, dan kriteria yang akan dikelola risikonya 2. Identifikasi risiko 3. Analisa risiko 4. Evaluasi risiko 5. Penanganan risiko 6. Pencatatan dan pelaporan Implementasi sistem manajemen risiko oleh unit kerja dituangkan dalam profil risiko. Formula: Persentase unit kerja yang telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu berbasis risiko melalui penyusunan profil risiko dibagi dengan jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka. Rumus yang digunakan adalah: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah unit kerja yang telah mengimplementasikan sistem manajemen mutu berbasis risiko melalui penyusunan profil risiko.	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		t = jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka Catatan (2024): Jumlah unit di UT Pusat: 32 Jumlah UT Daerah: 39 Keseluruhan jumlah unit di UT: 71	
IKSS 27.2	Tingkat kepatuhan pelaporan risiko unit sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan.	Definisi operasional: Laporan Manajemen Mutu berbasis Risiko unit kerja disampaikan kepada Rektor melalui unit pengelola risiko untuk dievaluasi guna perbaikan berkelanjutan. Proses evaluasi terhadap laporan manajemen risiko mencakup penilaian mengenai kesesuaian implementasi manajemen risiko dengan visi dan misi serta tujuan Universitas Terbuka. Kriteria: Laporan manajemen risiko oleh unit kerja harus dapat menunjukkan efektivitas dan efisiensi metode penanganan risiko yang telah dilakukann, sehingga probabilitas dan dampak yang ditimbulkan atas suatu risiko dapat diturunkan ke arah yang lebih ditolerir (<i>risk tolerance</i>). Formula: Persentase unit yang menyampaikan laporan manajemen mutu berbasis risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah unit kerja yang telah menyampaikan laporan manajemen risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. t = jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka Catatan (2024): Jumlah unit di UT Pusat: 32 Jumlah UT Daerah: 39 Keseluruhan jumlah unit di UT: 71	Persentase
IKSS 27.3	Pelaksanaan Audit Manajemen risiko yang dilakukan pada tingkat universitas dan unit kerja	Definisi operasional: Audit berbasis risiko merupakan pendekatan yang memungkinkan unit pengawas internal untuk memfokuskan perhatian dan sumber daya pada area atau proses bisnis yang dianggap memiliki risiko tertinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Universitas.	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
	setiap tahun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.	Hasil proses Manajemen mutu berbasis Risiko yang disusun oleh unit kerja dan unit pengelola risiko diserahkan kepada unit pengawas internal untuk kemudian dijadikan dasar dalam penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kriteria: Audit Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan PKPT yang telah mempertimbangkan risiko tertinggi Obyek Audit berbasis risiko merupakan unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka atau area proses bisnis yang memiliki risiko tinggi Formula: Persentase pelaksanaan Audit Berbasis Risiko yang dilakukan pada tingkat universitas dan unit kerja setiap tahun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Rumus yang digunakan adalah: $\frac{n}{t} \times 100$ n = jumlah realisasi pelaksanaan audit berbasis risiko di tingkat universitas dan unit kerja t = jumlah tugas audit berbasis risiko di tingkat universitas dan unit kerja yang tercantum dalam PKPT Catatan (2024): Persentase audit berbasis risiko dilakukan pada unit yang telah melaporkan hasil implementasi manajemen berbasis risiko (IKSS 27.2).	
IKSS 27.4	Pengembangan dashboard digital untuk manajemen risiko yang berfungsi sebagai alat mitigasi dan monitoring risiko.	Definisi operasional: Pengembangan dashboard risiko berbasis digital untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam memonitor pengendalian risiko, sehingga dapat melakukan mitigasi serta penanganan risiko yang lebih efektif dan lebih efisien. Persentase pengembangan dashboard digital untuk manajemen mutu berbasis risiko mengacu pada tingkat kemajuan pengembangan sebuah sistem dashboard berbasis digital yang dirancang untuk mendukung manajemen mutu berbasis risiko. Dashboard ini berfungsi sebagai alat bantu dalam mengidentifikasi, memitigasi, dan memantau risiko di seluruh unit kerja Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PT PJJ). Dashboard digital tersebut mencakup:	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. Pengolahan data berbasis teknologi untuk mengidentifikasi risiko secara otomatis. 2. Fitur untuk membantu proses mitigasi risiko secara terstruktur. 3. Kemampuan monitoring real-time untuk memastikan keberlanjutan sistem manajemen mutu berbasis risiko. Kriteria: Dashboard risiko berbasis digital: 1. Tingkat pelaksana: Memudahkan pelaksana tugas untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan benar dan sesuai ketentuan. (Gugus Pengendali Mutu) 2. Tingkat operasional: Memudahkan pimpinan unit kerja secara berkala melakukan monitoring dan reviu terhadap proses yang berlangsung, risiko yang mungkin terjadi, dan efektivitas dan efisiensi pengendalian risiko. (Pimpinan Unit) 3. Tingkat organisasi: Memudahkan pihak yang independen untuk melakukan monitoring dan reviu terhadap sistem manajemen risiko Universitas. (Pimpinan Universitas) Unit kerja dianggap telah berkontribusi pada pengembangan dashboard ini apabila memenuhi kriteria berikut: 1. Perancangan Sistem: Unit kerja telah menyelesaikan tahap desain awal dashboard sesuai dengan kebutuhan spesifik institusi. 2. Adanya template atau prototype dashboard yang sesuai dengan pedoman manajemen mutu berbasis risiko. 3. Implementasi Teknologi: Dashboard terintegrasi dengan sistem manajemen mutu dan data risiko yang ada di universitas. 4. Memanfaatkan teknologi yang sesuai, seperti pemrograman berbasis web atau aplikasi. 5. Uji Coba Dashboard: Dashboard telah diujicoba untuk mengidentifikasi, memitigasi, dan memonitor risiko sesuai dengan standar manajemen mutu berbasis risiko. 6. Dokumentasi dan Pelaporan: Terdapat dokumentasi lengkap yang mencatat progres pengembangan dashboard pada setiap tahap. 7. Tingkat Penyelesaian: Pengembangan dashboard memenuhi milestone atau tahapan yang ditentukan.	

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: Persentase pengembangan dashboard risiko berbasis digital untuk mitigasi dan monitoring risiko. Rumus yang digunakan adalah: $a.K1 + b.K2 + c.K3$ a = Dashboard risiko di tingkat pelaksana (60 %) b = Dashboard risiko di tingkat operasional (20 %) c = Dashboard risiko di tingkat organisasi (20%) k = konstanta bobot Perhitungan dilakukan berdasarkan IKSS 27.2: Persentase unit yang menyampaikan laporan manajemen risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan	
SS 28	Perumusan peta dan pedoman manajemen mutu berbasis risiko terbaru sesuai dengan kebijakan dan hasil evaluasi di tingkat universitas dan unit.		
IKSS 28.1	Tersedianya peta analisis risiko di tingkat universitas dan unit kerja yang telah dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan aktual serta hasil monitoring yang dilakukan.	Definisi operasional: Definisi Risiko: Suatu kondisi ketidakpastian yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap pencapaian tujuan, yang ditandai dengan kemungkinan terjadinya peristiwa atau keadaan yang dapat memengaruhi individu, organisasi, atau sistem. Risiko juga mencakup berbagai aspek, termasuk teknologi, akademik, operasional, kepatuhan, dan reputasi. Definisi Peta/Klasifikasi/Tingkat Risiko: Jenis risiko yang dimiliki oleh suatu unit/organisasi dalam upaya mencapai tujuannya, dengan menyeimbangkan potensi manfaat terhadap potensi kerugian, serta berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Definisi Unit Kerja: Satuan kelompok kerja yang ada di Universitas Terbuka yang ketentuannya sudah ditetapkan pada PerTor UT mengenai Organisasi Tata Kelola (OTK). Kriteria: Pada peta/analisis risiko harus memiliki lima komponen yang sesuai dengan kaidah penjaminan mutu, yakni:	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. Risiko: kegagalan/hambatan yang berpotensi/dapat dialami ketika melaksanakan program (untuk mencapai sasaran). 2. Sebab: penyebab kegagalan yang mungkin terjadi ketika menjalankan program. 3. Dampak: dampak kegagalan bagi organisasi dan pemangku kepentingan. 4. Probabilitas: kemungkinan kegagalan terjadi akibat sebab yang terkait. 5. Tingkat Risiko: besarnya dampak yang dapat terjadi apabila risiko tersebut tidak ditangani dengan baik. 6. Mitigasi: tindakan/pengendalian untuk mengurangi probabilitas dan/atau dampak risiko. Formula: Persentase peta/analisis risiko di tingkat unit kerja: $\left(\frac{\text{Jumlah peta atau analisis risiko di unit kerja}}{\text{unit kerja}} \times 100\% \right)$ Catatan 2024: Disesuaikan dengan IKSS 25.1; dikarenakan peta risiko baru bisa dibentuk apabila peta proses bisnis sudah selesai. Pada 2024, terdapat 12 area kualitas berdasarkan SIMINTAS UT. Selanjutnya, unit akan membuat peta analisis risiko berdasarkan area kualitas yang relevan dengan unit masing-masing.	
Kemahasiswaan			
SS 29	Memperkuat titik akses UT hingga tingkat kabupaten dan kota di Indonesia.		
IKSS 29.1	Meningkatnya kualitas layanan prima pada Sentra Layanan UT (SALUT)	Definisi Operasional: Peningkatan jumlah SALUT yang memenuhi standar layanan prima Kriteria: SALUT yang memenuhi kriteria sesuai dengan Peraturan Rektor tentang Sentra Layanan UT dengan jumlah mahasiswa yang dikelola minimal 100 mahasiswa Formula: $\frac{\text{Jumlah Salut yang memenuhi kriteria standar layanan prima}}{\text{Jumlah Salut}}$	Persentase
SS 30	Memperkuat <i>brand awareness</i> terhadap UT kepada seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.		

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKSS 30.1	Peningkatan Jumlah Mahasiswa Universitas Terbuka	Definisi Operasional: Jumlah mahasiswa registrasi Universitas Terbuka secara tahunan, mencakup seluruh program studi dan jenjang pendidikan, baik mahasiswa baru maupun yang melakukan registrasi ulang. Kriteria: Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah dihitung dengan metode headcount Formula: Jumlah mahasiswa dalam satu tahun dengan metode Headcount	Jumlah Mahasiswa Registrasi
SS 31	Memperkuat sistem pendukung untuk kesuksesan mahasiswa dalam pembelajaran jarak jauh.		
IKSS 31.1	Jumlah Program Pendukung Kesuksesan Belajar Jarak Jauh	Definisi operasional: Jumlah total program atau kegiatan yang secara khusus dirancang untuk mendukung keberhasilan pembelajaran jarak jauh di UT Kriteria: 1. Tersedianya program Orientasi Studi Mahasiswa Baru (OSMB) di UT daerah; 2. Tersedianya program Distance Learning Skill Workshop (Pelatihan Keterampilan Belajar Jarak Jauh - PKBJJ) di UT Daerah; 3. Tersedianya program <i>Assignment Workshop</i> (Workshop Tugas) di UT Daerah; 4. Tersedianya program <i>Examination Clinic</i> (Klinik Ujian) di UT daerah. Formula: Total jenis program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh	Program
SS 32	Menguatkan pembinaan minat dan bakat mahasiswa yang komprehensif yang berorientasi prestasi.		
IKSS 32.1	Mahasiswa yang mengikuti program pembinaan minat bakat	Definisi Operasional: Mahasiswa aktif yang mengikuti program pembinaan minat dan bakat dalam bidang akademik maupun non-akademik, dan program persiapan karier selama satu tahun akademik. Kriteria: Mahasiswa tercatat mengikuti, kegiatan sebagai berikut, namun tidak terbatas pada: 1. Kegiatan pembinaan minat dan bakat dalam bidang akademik, seperti: lomba karya tulis ilmiah, debat ilmiah, olimpiade, dll.	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		2. Kegiatan pembinaan minat dan bakat dalam bidang non-akademik, seperti: seni, olahraga, organisasi kemahasiswaan, dan kegiatan sosial. 3. Program persiapan karier, seperti: pelatihan soft skills, seminar karier, magang, pelatihan wirausaha, dan career fair. Formula: $\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pembinaan minat bakat}}{\text{Jumlah total mahasiswa}} \times 100\%$	
SS 33	Menguatkan program kesejahteraan mahasiswa.		
IKSS 33.1	Mahasiswa penerima manfaat program kesejahteraan	Definisi Operasional: Mahasiswa aktif yang menerima manfaat dari program kesejahteraan yang disediakan UT, seperti beasiswa, bantuan biaya pendidikan, bantuan layanan kesehatan, atau dukungan lainnya. Kriteria: 1. Bantuan Biaya Pendidikan dapat bersumber pada: a. APBN b. APBD c. Mitra UT lainnya 2. Bantuan layanan kesehatan dapat berupa layanan kesehatan yang diselenggarakan di UT Daerah atau berupa layanan lainnya 3. Dukungan lainnya dapat berupa layanan konseling atau layanan lainnya Formula: $\frac{\text{Jumlah mahasiswa yang mendapatkan layanan kesejahteraan, layanan kesehatan, dan lainnya}}{\text{Jumlah total mahasiswa}} \times 100\%$	Persentase
Alumni dan Kerja Sama			
SS 34	Memberdayakan alumni untuk mendukung visi, misi dan tujuan UT.		
IKSS 34.1	Peningkatan partisipasi alumni untuk mendukung visi, misi dan tujuan UT.	Definisi Operasional: UT mempunyai program pemberdayaan alumni untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa dan jejaring kemitraan untuk mendukung Tridarma PT serta sesuai visi dan misi UT.	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria: Jumlah Alumni yang berkontribusi terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai visi dan misi UT Formula: Jumlah Alumni yang berkontribusi terhadap Tri Dharma Perguruan Tinggi sesuai visi dan misi UT / Jumlah Alumni	
SS 35	Menyediakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) data alumni.		
IKSS 35.1	Tersedianya Sistem Informasi Manajemen (SIM) data alumni.	Definisi Operasional: UT memiliki aplikasi data dan website alumni yang informatif dan mudah diakses oleh stakeholders Kriteria: 1. UT memiliki data alumni dan informasi lain terkait alumni yang terkini (up to date) 2. UT melakukan pemutakhiran data alumni dan informasi lain terkait alumni pada aplikasi dan website 3. UT memiliki aplikasi dan website alumni yang mudah diakses oleh stakeholders Formula: UT Pusat dan Daerah memiliki aplikasi data alumni yang <i>up to date</i> dan UT Pusat memiliki website yang up to date yang memuat data dan informasi lain mengenai alumni dari berbagai UT Daerah	Persentase
IKSS 35.2	Tersedianya data <i>tracer study</i>	Definisi Operasional: Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: 1. memiliki pekerjaan; 2. melanjutkan studi; atau 3. menjadi wiraswasta. Kriteria: Target ini berdasarkan minimal 35% Response Rate dari Lulusan T-1 1. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: a. perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (startup company) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; b. organisasi nirlaba;	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		c. institusi/organisasi multilateral; d. lembaga pemerintah; atau e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 2. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 3. Kriteria kewiraswastaan: Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: a. pendiri (founder) atau pasangan pendiri (co-founder) perusahaan; atau b. pekerja lepas (freelancer). Jumlah Responden minium tracer study yang harus dipenuhi: $n = \frac{N}{Nd^2} + 1$ n=jumlah responden minimum N=jumlah lulusan D=galat (2,5 %) Formula: $\frac{\sum_i n_i k_i}{t} \times 100$ n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dalam mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).	
SS 36	Menyediakan sistem informasi manajemen (SIM) data kerja sama.		

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKSS 36.1	Tersedianya sistem informasi manajemen (SIM) data kerja sama	Definisi Operasional: UT memiliki aplikasi SIM data kerja sama yang terintegrasi, informatif, dan mudah diakses oleh semua <i>stakeholder</i> Kriteria: 1. UT memiliki data dan informasi terkait kerjasama yang terkini (up to date) 2. UT melakukan pemutakhiran data kerjasama dan informasi lain terkait aplikasi tersebut 3. UT memiliki aplikasi kerjasama yang mudah diakses oleh stakeholders Formula: UT memiliki aplikasi kerjasama yang terintegrasi dan up to date untuk memuat data serta informasi lain mengenai kerjasama	Persentase
SS 37	Meningkatkan kerja sama dengan mitra di bidang akademik, non akademik, dan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) terkini yang mengakomodasi perubahan lingkungan dan kebijakan yang dinamis.		
IKSS 37.1	Jumlah kerja sama per program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 pada bidang akademik dan non akademik dengan mitra baik dalam dan luar negeri.	Definisi Operasional: Jumlah kerja sama akademik dan non akademik di bidang tridharma perguruan tinggi dengan institusi negeri dan swasta di dalam dan luar negeri Kriteria: Perjanjian kerja sama berbentuk: 1. Pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (output)pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); 2. menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL) ; 3. menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; 4. menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; 5. mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; 6. menyediakan pelatihan (upskilling dan reskilling) bagi dosen maupun instruktur; 7. menyediakan resource sharing sarana dan prasarana; 8. menyelenggarakan teaching factory (TEFA) di kampus; 9. menyelenggarakan program double degree atau joint degree; dan/atau 10. melakukan kemitraan penelitian Kriteria Mitra: 1. perusahaan multinasional; 2. perusahaan nasional berstandar tinggi, BUMN, dan/BUMD;	Persentase

Kode	Uraian	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		3. perusahaan teknologi global; 4. perusahaan rintisan (startup company) teknologi; 5. Organisasi nirlaba kelas dunia; 6. institusi/organisasi multilateral; 7. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu (QS200 by subject); 8. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 9. rumah sakit; 10. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi. Formula: Capaian IKPS 37.1.1.1/Target Tahunan IKPS 37.1.1.1	

LAMPIRAN 3 DEFINISI OPERASIONAL, KRITERIA, DAN RUMUS PERHITUNGAN IKPS

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
Akademik			
PS 1.1.1	Pengembangan Program Studi yang menerapkan kurikulum yang fleksibel dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif sesuai dengan standar nasional dan internasional dengan memanfaatkan teknologi digital untuk membangun kesadaran awal tentang <i>green industry</i> , <i>green jobs</i> dan <i>green skills</i>		
IKPS 1.1.1.1	Jumlah program studi baru jenjang diploma, vokasi, sarjana, magister, dan doktoral yang menerapkan kurikulum fleksibel, dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif.	Definisi Operasional: Program studi baru jenjang diploma, vokasi, sarjana, magister, dan doktoral yang ditawarkan. Kriteria: 1. Program studi baru 2. Target merupakan angka kumulatif Formula: Jumlah Prodi baru	Prodi
IKPS 1.1.1.2	Jumlah program studi jenjang diploma, vokasi, sarjana, magister, dan doktoral yang menerapkan kurikulum fleksibel, dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif.	Definisi Operasional: Program studi yang menerapkan kurikulum baru (fleksibel, dan adaptif, lebih relevan, aplikatif, dan kompetitif) Kriteria: 1. Program studi yang menerapkan kurikulum baru 2. Target merupakan angka kumulatif Formula: Jumlah Prodi yang menerapkan kurikulum baru	Prodi
IKPS 1.1.1.3	Jumlah program <i>microcredential</i> untuk mendukung asta cita dalam membangun kesadaran awal tentang <i>green industry</i> , <i>green jobs</i> dan <i>green skills</i> .	Definisi Operasional: Jumlah program <i>microcredential</i> untuk mendukung asta cita. Program <i>microcredential</i> adalah program kursus singkat yang disediakan oleh UT untuk melengkapi kualifikasi pendidikan formal dan mengembangkan keterampilan spesifik Kriteria: 1. Program <i>microcredential</i>	Program

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		2. Target merupakan angka kumulatif Formula: Jumlah Program <i>Microcredential</i>	
IKPS 1.1.1.4	Jumlah program studi yang menyediakan layanan untuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Definisi Operasional: Program studi yang memiliki kebijakan tertulis mengatur penerimaan dan layanan bagi mahasiswa berkebutuhan khusus serta layanan akademik keberhasilan studi mahasiswa berkebutuhan khusus. Kriteria: Program studi yang menyediakan layanan mahasiswa berkebutuhan khusus Formula: Jumlah Target Prodi	Prodi
PS 1.1.2	Pengembangan Program Studi Internasional		
IKPS 1.1.2.1	Jumlah Program Studi Internasional (kelas internasional)	Definisi Operasional: Program studi yang menyediakan kelas yang diperuntukan untuk mahasiswa asing dengan penyampaian/ bahasa pengantar berbahasa Inggris. Kriteria: 1. Program studi yang menyediakan kelas internasional dan memiliki akreditasi internasional 2. Target merupakan angka kumulatif Formula: Jumlah Prodi internasional	Prodi
PS 1.1.2.2	Jumlah Mata Kuliah Internasional	Definisi Operasional: Mata kuliah dengan perangkat pembelajaran berbahasa Inggris (administrasi akademik, bahan ajar, tutorial, dan asesmen) Kriteria: mata kuliah internasional Formula: Jumlah mata kuliah internasional	Mata kuliah
PS 2.1.1	Pengembangan bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 2.1.1.1	Bahan ajar yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas termasuk dengan teknologi terkini/multimedia (misalnya: metaverse, game based, AR/VR, dll)	Definisi Operasional: Bahan ajar berbasis teknologi digital multimedia, interaktif, inovatif, inklusif, personal, dan berkualitas serta berbasis teknologi multimedia minimal termasuk (metaverse, game based, dll) Kriteria: 1. Interaktif, Dinamis, Aksesibel, Multimedia 2. Kesetaraan, Diversitas, Fleksibilitas 3. Kreatif, Teknologi, Kolaboratif 4. Menggunakan teknologi dan data yang disesuaikan dengan kebutuhan kemampuan individu pengguna. 5. Akurat, jelas, terstruktur dan sistematis, menggunakan bahasa yang efektif dan mudah dipahami oleh pengguna. Formula: (Jumlah BA yang berbasis teknologi digital multimedia, interaktif, inovatif, inklusif, personal, dan berkualitas dalam berbagai ragam platform, seperti <i>metaverse</i>, <i>game based</i>, dll. / jumlah seluruh bahan ajar) x 100%	persentase
IKPS 2.1.1.2	Bahan ajar berumur kurang dari atau sama dengan 7 tahun	Definisi Operasional: Umur bahan ajar kurang dari atau sama dengan 7 tahun dihitung berdasarkan tahun terbit Kriteria: 1. Bahan Ajar (BA) Ilmu Sosial: maksimal usia BA 5 tahun 2. Bahan Ajar Sains/Eksakta: maksimal usia BA 7 tahun Formula: (Jumlah yang bahan ajar yang berumur kurang dari atau sama dengan 5 tahun / jumlah seluruh bahan ajar) x 100%	persentase
IKPS 2.1.1.3	Ketersediaan sistem revidi pengembangan bahan ajar secara digital	Definisi Operasional: Sistem revidi BA berbasis teknologi digital online Formula:	persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		(Progress pengembangan penyediaan Sistem Reviu BA berbasis teknologi digital online / sistem lengkap) x 100%.	
IKPS 2.1.1.4	Ketersediaan Bahan Ajar dalam berbahasa Inggris	Definisi Operasional: Bahan Ajar cetak dan digital dalam bahasa Inggris. Target merupakan angka kumulatif Formula: (Jumlah bahan ajar yang menggunakan bahasa Inggris / jumlah seluruh bahan ajar) x 100%	persentase
PS 3.1.1	Pengembangan pembelajaran jarak jauh berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini (misal AI dan <i>Learning Analytics</i>)		
IKPS 3.1.1.1	Tersedianya layanan pembelajaran program diploma, sarjana, diploma, vokasi, profesi, magister, dan doctoral yang memanfaatkan teknologi digital yang berkualitas dengan teknologi terkini (pembelajaran berbasis learning companion, pembelajaran kolaboratif, mata kuliah berbasis kasus atau berbasis proyek)	Definisi Operasional: Pembelajaran praktikum/praktikum yang memanfaatkan teknologi digital yang berkualitas dengan teknologi terkini. Kriteria: 1. Praktikal: Mampu memberikan pengalaman praktikal sesuai dengan tujuan pembelajaran. 2. Kolaborasi: dapat memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen/tutor, sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam proses pembelajaran. Formula N1: (Jumlah sks mata kuliah praktik atau praktikum dan berpraktik atau berpraktikum / jumlah mata kuliah dalam kurikulum prodi) x 100% Definisi Operasional <i>Learning Companion</i>: Suatu sistem yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran dengan mengintegrasikan teknologi (AI dan <i>Learning Analytics</i>) dan pendekatan pembelajaran yang berfokus pada kebutuhan individu mahasiswa Kriteria <i>Learning Companion</i>:	Persentase

		1. Pembelajaran Personalisasi: dirancang untuk memahami kebutuhan, minat, dan gaya belajar masing-masing mahasiswa, sehingga dapat menyajikan konten dan aktivitas pembelajaran yang relevan dan efektif. 2. Teknologi Berbasis Data: menggunakan teknologi berbasis data untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data tentang perilaku, kemajuan, dan kebutuhan mahasiswa. 3. Komponen AI (kecerdasan buatan): menggunakan komponen AI untuk melakukan analisis data, membuat rekomendasi, dan memberikan umpan balik kepada mahasiswa. 4. Antarmuka Pengguna: intuitif dan mudah digunakan, sehingga mahasiswa dapat dengan mudah mengakses dan menggunakan sistem. 5. Kolaborasi: dapat memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen/tutor, sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam proses pembelajaran. Formula <i>Learning Companion</i> (N2): (Progres kelengkapan/keterselesaian fitur Sistem administrasi pembelajaran yang berbasis LC / Sistem lengkap) x 100% Definisi Operasional Pembelajaran Kolaboratif: Suatu sistem yang dirancang untuk mendukung proses pembelajaran yang berfokus pada kolaborasi dan kerja sama antara mahasiswa dan dosen/tutor dalam mencapai tujuan pembelajaran. Kriteria Pembelajaran Kolaboratif: 1. Kolaborasi: dirancang untuk memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen/tutor dalam proses pembelajaran. 2. Pembagian Sumber Daya: memungkinkan pembagian sumber daya, seperti materi pembelajaran, alat bantu, dan fasilitas, antara mahasiswa dan dosen/tutor. 3. Komunikasi: memungkinkan komunikasi yang efektif antara mahasiswa, dosen/tutor, dan stakeholder lainnya melalui berbagai saluran, seperti email, forum diskusi, dan chat. 4. Pengelolaan Proyek: memungkinkan pengelolaan proyek pembelajaran yang melibatkan mahasiswa dan dosen/tutor dalam mencapai tujuan pembelajaran. 5. Pengukuran dan Evaluasi: memungkinkan pengukuran dan evaluasi kemajuan mahasiswa dan efektivitas proses pembelajaran.	
--	--	--	--

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula Pembelajaran Kolaboratif (N3): (Progres kelengkapan/keterselesaian fitur Sistem administrasi pembelajaran berbasis kolaboratif / Sistem lengkap) x 100% Definisi Operasional Mata kuliah berbasis kasus: Mata kuliah berbasis kasus (<i>Case-Based Learning</i>) adalah suatu metode pembelajaran yang menggunakan kasus nyata atau hipotetis sebagai dasar untuk mempelajari konsep, teori, dan prinsip-prinsip dalam suatu bidang studi. Mahasiswa diberikan kasus yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari, dan mereka diminta untuk menganalisis, memecahkan masalah, dan membuat keputusan berdasarkan kasus tersebut. Kriteria Mata kuliah berbasis kasus: 1. Kasus nyata atau hipotetis: Kasus yang digunakan dapat berupa kasus nyata yang terjadi dalam industri atau masyarakat, atau kasus hipotetis yang dirancang untuk mempelajari konsep tertentu. 2. Analisis dan pemecahan masalah: mahasiswa diminta untuk menganalisis kasus, mengidentifikasi masalah, dan membuat keputusan berdasarkan analisis tersebut. 3. Pembelajaran aktif: memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, dengan menganalisis kasus, berdiskusi, dan membuat keputusan. 4. Pengembangan keterampilan: membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan seperti analisis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kerja sama tim. Definisi Operasional: Mata kuliah berbasis proyek (<i>Project-Based Learning</i>) adalah suatu metode pembelajaran yang memungkinkan mahasiswa untuk mempelajari konsep, teori, dan keterampilan melalui proyek yang relevan dan bermakna. Mahasiswa diberikan tugas untuk menyelesaikan proyek yang spesifik, yang memerlukan mereka untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah dipelajari dalam mata kuliah tersebut.	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria 1. Proyek yang relevan dan bermakna: proyek yang diberikan kepada mahasiswa harus relevan dengan materi yang sedang dipelajari dan memiliki makna yang jelas. 2. Penerapan pengetahuan dan keterampilan: mahasiswa diminta untuk menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang telah dipelajari dalam mata kuliah tersebut untuk menyelesaikan proyek. 3. Pembelajaran aktif: memungkinkan mahasiswa untuk terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran, dengan mengerjakan proyek, berdiskusi, dan menerima umpan balik. 4. Pengembangan keterampilan: membantu mahasiswa mengembangkan keterampilan seperti manajemen proyek, kerja sama tim, komunikasi, dan pemecahan masalah. Formula (N4): $\frac{\text{Jumlah mata kuliah berbasis kasus atau berbasis proyek}}{\text{n jumlah target mata kuliah berbasis kasus atau berbasis proyek}} \times 100\%$ Formula N Gabungan: $(N1+N2+N3+N4)/4$	
IKPS 3.1.1.2	Tersedianya layanan pembelajaran praktik/praktikum program sarjana dan program vokasi yang memanfaatkan teknologi digital yang berkualitas dengan teknologi terkini.	Definisi Operasional: Suatu sistem yang mendukung proses praktik/praktikum yang memanfaatkan teknologi digital yang berkualitas dengan teknologi terkini. Kriteria: Praktikal: Mampu memberikan pengalaman praktikal sesuai dengan tujuan pembelajaran Kolaborasi: dapat memfasilitasi kolaborasi antara mahasiswa dan dosen/tutor, sehingga dapat meningkatkan komunikasi dan kerja sama dalam proses pembelajaran. Formula:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		(Jumlah sks mata kuliah praktik atau praktikum dan berpraktik atau berpraktikum / jumlah target minimal mata kuliah praktik atau praktikum dan berpraktik atau berpraktikum dalam kurikulum prodi) x 100%	
PS 4.1.1	Pengembangan sistem asesmen yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini.		
IKPS 4.1.1.1	Pelaksanaan asesmen tatap muka dan online yang berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal serta berkualitas dengan teknologi terkini termasuk sistem remedial.	Definisi Operasional: Sistem asesmen tatap muka dan online yang dikembangkan berbasis digital, interaktif, inklusif, inovatif, dan personal. Definisi Operasional sistem asesmen online: Sistem asesmen <i>online proctoring</i> yang dikembangkan untuk berbagai skema ujian. Kriteria sistem asesmen online: sistem asesmen <i>online proctoring</i> yang memungkinkan mahasiswa ujian dimana saja Formula sistem asesmen online (N1): (Progres kelengkapan/keterselesaian system asesmen online proctoring / Sistem lengkap) x 100% Definisi Operasional sistem asesmen inklusif: Layanan asesmen yang dirancang untuk mengakomodasi mahasiswa yang berkebutuhan khusus. Kriteria: Sistem asesmen inklusif Formula sistem asesmen inklusif (N2): (Progres kelengkapan/keterselesaian asesmen inklusif / Sistem lengkap) x 100% Definisi Operasional sistem asesmen online untuk skema ujian esai berbasis AI: Sistem asesmen online yang dikembangkan untuk skema ujian dalam bentuk esai dengan bantuan kecerdasan buatan (AI) antara lain untuk pemeriksaan ujian esai. Kriteria: sistem asesmen online yang inovatif dan personal berbasis digital Formula (N3):	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		(Progres kelengkapan/keterselesaian fitur asesmen online untuk skema ujian esai berbasis AI / Sistem lengkap) x 100% Definisi Operasional sistem remedial: Sistem Remedial yang buat untuk mahasiswa menuntaskan capaian pembelajarannya Kriteria sistem remedial: sistem remedial yang memungkinkan mahasiswa masih bisa mempelajari materi. Formula sistem remedial (N4): (Progres kelengkapan/keterselesaian fitur Sistem Remedial / Sistem lengkap) x 100% Formula Gabungan: (N1+N2+N3+N4)/4	
PS 5.1.1	Penguatan kolaborasi dengan penyedia teknologi dan pemerintah dalam membangun akses internet untuk meningkatkan akses pendidikan di daerah 3T (Terdepan, Terluar dan Tertinggal)		
IKPS 5.1.1.1	Kerja sama dengan daerah 3T yang dapat mengakses pendidikan tinggi secara online	Definisi Operasional: Kerja sama dengan daerah 3T yang dapat mengakses pendidikan tinggi secara online Kriteria: jumlah kerja sama Target angka kumulatif Formula: Jumlah kerja sama	Kerja sama
PS 6.1.1	Pengembangan ICE Institute sebagai lokapasar (<i>market place</i>) mata kuliah daring dan memperkuat keterlibatan perguruan tinggi baik dalam maupun luar negeri		
IKPS 6.1.1.1	Terselenggaranya lokapasar (marketplace) matakuliah daring yang meliputi sistem, program dan kemitraan.	Definisi Operasional: Sistem/aplikasi lokapasar ICE yang terpadu yang dapat memudahkan calon peserta untuk memperoleh informasi terkait mata kuliah, proses registrasi, pelaksanaan program, dan hasil program. Definisi Operasional: mata kuliah yang dikelola oleh ICE Institute Kriteria: mata kuliah ICE-I	persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Target merupakan angka kumulatif Formula: jumlah mata kuliah / target tahunan Kriteria: Perguruan tinggi dalam dan luar negeri Target merupakan angka kumulatif Definisi Operasional: perguruan tinggi dalam dan luar negeri yang menjalin kerja sama dengan ICE Institute dan menjadi anggota konsorsium Kriteria: perguruan tinggi dalam dan luar negeri Target merupakan angka kumulatif Formula N1: (Progres kelengkapan/keterselesaian system ICE/ Sistem lengkap) x 100 N2: (Jumlah mata kuliah yang dikelola ICE/jumlah MK yang ditargetkan ICE) x 100 N3: (Jumlah PT yang kerja sama/ jumlah PT yang ditargetkan kerjasama) x 100 N=N1+N2+N3	
IKPS 6.1.1.2	Jumlah pengguna mata kuliah ICE Institute	Definisi Operasional: Pengguna mata/user yang memanfaatkan mata kuliah di ICE-I Kriteria: Mata kuliah ICE-I Target merupakan angka kumulatif Formula: Jumlah pengguna	pengguna
PS 7.1.1	Pengembangan kerja sama dalam berbagai sumber daya, keahlian, dan fasilitas pendidikan dengan DUDIKA, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pendidikan.		
IKPS 7.1.1.1	Kerja sama dengan program studi nasional, internasional, dan DUDIKA	Definisi Operasional kerja sama tingkat nasional: Jumlah implementasi kerja sama yang dilakukan oleh prodi dengan program studi di tingkat nasional.	Kerja sama

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria kerja sama tingkat nasional: Jumlah implementasi kerja sama yang dilakukan dengan prodi nasional Formula (N1): Jumlah kerja sama nasional Bobot = 20% Definisi Operasional kerja sama tingkat internasional: Jumlah implementasi kerja sama yang dilakukan oleh prodi dengan program studi di tingkat internasional. Kriteria kerja sama tingkat internasional: Jumlah implementasi kerja sama baru dengan prodi internasional Formula (N2): Jumlah kerja sama internasional Bobot = 40% Definisi Operasional kerja sama DUDIKA: Jumlah implementasi kerja sama yang dilakukan oleh prodi dengan DUDIKA Kriteria kerja sama DUDIKA: Jumlah implementasi kerja sama baru dengan DUDIKA Formula (N3): Jumlah kerja sama dengan DUDIKA Bobot = 40% Formula Gabungan: (N1x20%)+(N2x40%)+(N3x40%)	
PS 8.1.1	Pengembangan riset yang sesuai dengan prioritas UT, nasional dan tren global, seperti inovasi pendidikan digital, keberlanjutan lingkungan, serta transformasi ekonomi berbasis teknologi yang diarahkan pada hilirisasi untuk meningkatkan daya saing penelitian di tingkat nasional dan global.		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 8.1.1.1	Jumlah riset untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh program studi, riset sistem pembelajaran jarak jauh dan institusi UT, sesuai dengan kebijakan nasional yang sumber pendanaannya dari UT atau eksternal untuk mendukung hilirisasi pembangunan nasional.	Definisi operasional penelitian bidang ilmu: Penelitian bidang ilmu yang bertujuan untuk menemukan fakta baru, menguji teori yang sudah ada, atau mengembangkan solusi terhadap permasalahan pada bidang tertentu. Kriteria penelitian bidang ilmu: Penelitian bidang ilmu yang sudah diterima untuk didanai pada tahun tertentu, termasuk didalamnya penelitian mahasiswa, penelitian dasar, terapan dan pengembangan. Formula (N1): Jumlah Judul Penelitian Bidang Ilmu Definisi operasional penelitian bidang PTJJ: Penelitian yang bertujuan untuk menemukan fakta baru, menguji teori yang sudah ada, atau mengembangkan solusi terhadap permasalahan pada bidang PTJJ Kriteria penelitian bidang PTJJ : Penelitian bidang PTJJ yang diterima untuk didanai pada tahun tertentu Formula (N2): Jumlah Judul Penelitian Bidang PTJJ Definisi operasional penelitian hilirisasi: Penelitian yang memiliki potensi untuk hilirisasi. Kriteria penelitian hilirisasi: Penelitian yang sudah memiliki potensi dihilirisasikan, termasuk penelitian yang sudah mendapatkan paten atau KI lainnya Formula (N3): Jumlah Judul Penelitian Hilirisasi Definisi operasional penelitian eksternal dan kolaborasi: Penelitian yang dibiayai oleh pendanaan eksternal dan penelitian kolaborasi Kriteria penelitian eksternal dan kolaborasi:	judul

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Penelitian yang lolos dan dibiayai oleh pihak eksternal, termasuk dari DAPT, BIMA, Pemerintah daerah, pendanaan internasional) Formula (N4): Jumlah judul penelitian eksternal dan kolaborasi Formula Gabungan: Gabungan jumlah riset = $N1+N2+N3+N4$	
IKPS 8.1.1.2	Jumlah keluaran penelitian dalam bentuk artikel jurnal internasional bereputasi, artikel jurnal nasional terakreditasi/HKI.	Definisi Operasional: keluaran penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal internasional bereputasi/artikel jurnal nasional terakreditasi/HKI Kriteria: 1. Artikel yang terbit pada jurnal dan prosiding internasional bereputasi Scopus, WoS, Microsoft Academic Search 2. Artikel yang terbit pada jurnal dan prosiding nasional bereputasi SINTA 1-4 3. Produk yang di HKI Formula: Jumlah luaran	Luaran
PS 9.1.1	Pengembangan riset berbasis STEAM dan Teknologi Pendidikan		
IKPS 9.1.1.1	Jumlah penelitian berbasis STEAM dan Teknologi Pendidikan	Definisi operasional: Penelitian multidisiplin berbasis STEAM dan teknologi Pendidikan yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan institusi pendidikan. Kriteria: Jumlah penelitian multidisiplin berbasis STEAM dan teknologi pendidikan yang dilakukan oleh dosen UT Target merupakan angka kumulatif Formula: Jumlah riset STEAM	Riset
PS 10.1.1	Pengembangan yang memanfaatkan big data dari platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UT		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 10.1.1.1	Jumlah riset yang memanfaatkan big data dari platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di UT	Definisi operasional: Penelitian yang memanfaatkan big data dari platform digital untuk meningkatkan kualitas pembelajaran Kriteria: Jumlah penelitian yang menggunakan platform digital . Target merupakan angka kumulatif Formula: Jumlah riset	riset
PS 11.1.1	Penguatan kerja sama dalam berbagi sumber daya, keahlian, dan fasilitas penelitian dengan dudika, lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi.		
IKPS 11.1.1.1	Jumlah kerjasama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas penelitian dan publikasi.	Definisi operasional: Kerja sama akademik yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama sumber daya (<i>resource sharing</i>) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pendidikan dan penelitian Kriteria: Kerjasama dibuktikan dengan MoU/PKS/IA dan dokumen penunjang (<i>in kind</i> atau <i>with cost</i>) Formula: Jumlah dokumen kerjasama yang dimiliki universitas/fakultas/prodi	Kerja sama
PS 12.1.1	Pengembangan hasil penelitian dan program MOOCs sebagai program pengabdian kepada masyarakat yang berfokus pada peningkatan keterampilan digital praktis, kewirausahaan digital, literasi keuangan, praktik keberlanjutan lingkungan, dan pemberdayaan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat		
IKPS 12.1.1.1	Jumlah program Pengabdian kepada masyarakat termasuk PkM MOOCs, Dosen, Nasional, Internasional, dan kewirausahaan mahasiswa	Definisi operasional MOOCs: Model penyampaian konten pembelajaran daring kepada siapa pun yang ingin mengikuti kursus, tanpa batasan jumlah peserta Kriteria MOOCs: Jumlah MOOCs yang dimiliki oleh UT dan ditawarkan secara umum Formula MOOCs (N1): Jumlah MOOCs yang dimiliki oleh UT dan ditawarkan secara umum / target tahunan	Judul

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Definisi operasional program Pengabdian kepada Masyarakat dosen : Program PkM yang dilakukan oleh dosen UT dan bertujuan membantu masyarakat mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Kriteria program Pengabdian kepada Masyarakat dosen: Program PkM dosen yang memenuhi persyaratan dan disetujui pendanaannya Formula program Pengabdian kepada Masyarakat dosen (N2) : Proposal PkM yang didanai Definisi operasional program pengabdian pada masyarakat untuk tingkat nasional: Program PkM nasional yang bertujuan membantu masyarakat mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan mereka pada daerah tertentu dan berkolaborasi dengan fakultas yang berbeda, pada daerah tertentu. Kriteria program pengabdian pada masyarakat untuk tingkat nasional : Program PkM nasional yang memenuhi persyaratan dan disetujui pendanaannya Formula program pengabdian pada masyarakat untuk tingkat nasional (N3): Proposal PkM yang didanai Definisi operasional program kepada masyarakat untuk tingkat internasional : Program PkM internasional yang bertujuan membantu masyarakat mengatasi masalah dan meningkatkan kesejahteraan mereka pada daerah tertentu dan berkolaborasi dengan peserta dari negara lain yang dilaksanakan pada daerah tertentu. Kriteria program kepada masyarakat untuk tingkat internasional : Program PkM internasional yang memenuhi persyaratan dan disetujui pendanaannya Formula program kepada masyarakat untuk tingkat internasional (N4): Proposal PkM yang didanai Definisi operasional program kepada masyarakat berbasis kewirausahaan mahasiswa:	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Program PkM yang dilaksanakan oleh mahasiswa dengan tujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya dibawah bimbingan dosen Kriteria program kepada masyarakat berbasis kewirausahaan mahasiswa : Program PkM kewirausahaan yang memenuhi persyaratan dan disetujui pendanaannya Formula program kepada masyarakat berbasis kewirausahaan mahasiswa (N5): Proposal PkM yang didanai Formula Gabungan: $N1+N2+N3+N4+N5$	
IKPS 12.1.1.2	Jumlah peserta yang memanfaatkan program MOOCs	Definisi operasional: Program yang berisi model penyampaian konten pembelajaran daring kepada siapa pun yang ingin mengikuti kursus, tanpa batasan jumlah peserta Kriteria: Jumlah MOOCs yang sudah dimanfaatkan oleh masyarakat umum Formula: Jumlah peserta (pengguna MOOCs)	Pengguna
PS 13.1.1	Penguatan kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat		
PS 13.1.1.1	Jumlah kerja sama dengan lembaga nasional dan internasional terutama pada wilayah Asia Tenggara dan Eropa Timur sebagai strategi untuk meningkatkan kualitas pemberdayaan masyarakat.	Definisi operasional: Kerja sama PkM yang dilakukan melalui pemanfaatan bersama sumber daya (<i>resource sharing</i>) merupakan kerjasama untuk penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat. Kriteria: Kerjasama dibuktikan dengan MoU/PKS/IA dan dokumen penunjang (<i>in kind</i> atau <i>with cost</i>) Formula: Jumlah dokumen kerjasama yang dimiliki	Kerja sama

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
Non Akademik SDM, Tata Kelola, dan Organisasi			
PS 14.1.1	Penguatan konsolidasi antar organ menuju <i>Good University Governance</i> yang didukung mekanisme dan sistem informasi.		
IKPS 14.1.1.1	Tercapainya <i>Good University Governance</i> melalui konsolidasi antara tiga organ universitas	Definisi Operasional: <i>Good University Governance</i> melalui konsolidasi antara tiga organ universitas dicapai melalui adanya dokumen keputusan bersama, mekanisme/peraturan organisasi yang mengatur hubungan kerja antar organ, dan sistem yang digunakan untuk mencatat, menyimpan, mengolah dan mendistribusikan serta monitoring dan evaluasi hasil koordinasi antar organ N1: Dokumen Keputusan Bersama adalah dokumen formal yang ditandatangani oleh MWA, Rektor, dan SAU, yang secara jelas menetapkan mekanisme pelaksanaan koordinasi antar organ di Universitas Terbuka. Dokumen ini harus mencakup sekurang-kurangnya: 1. Tata cara hubungan kerja antar organ, 2. Frekuensi dan format forum koordinasi, 3. Alur pengambilan keputusan bersama, 4. Ketentuan monitoring dan evaluasi implementasi, 5. Peran kelembagaan dan tanggung jawab antar organ. Dokumen harus tersedia, sah yang diakui tiga organ, dan siap digunakan sebagai acuan pelaksanaan koordinasi. Tiap organ memiliki dokumen yang mengatur tentang regulasi, kelembagaan, dan kualifikasi SDM di lingkungan Universitas Terbuka. Kriteria: 1. Dokumen Keputusan Bersama disusun secara tripartit (MWA, Rektor, SAU). 2. Ditandatangani dan ditetapkan secara formal oleh ketiga organ. 3. Mencakup ketentuan minimal: mekanisme koordinasi, peran organ, dan tata kelola keputusan. 4. Telah disosialisasikan kepada pemangku kepentingan yang relevan.	Dokumen

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		5. Dapat diakses oleh organ yang bersangkutan dan digunakan sebagai dasar koordinasi. Keterangan: Indikator berbasis milestone dokumen, maka: - Skor 1 per tahun menunjukkan bahwa dokumen tersebut tetap berlaku aktif dan relevan. - Skor 1 = 100 % - Jika dilakukan revisi, maka versi terbaru harus tersedia dan memenuhi seluruh kriteria. Formula N1: Jumlah dokumen N2: Tingkat keterlaksanaan keputusan konsolidasi antar organ Kriteria: Persentase keterlaksanaan keputusan konsolidasi antar organ Formula N2: (Jumlah pelaksanaan / jumlah keputusan) X 100% N3: Pelaksanaan hubungan kerja antar organ Universitas yang didasarkan pada dokumen formal seperti SKB, SOP lintas organ, atau peraturan organisasi lainnya yang telah disepakati, disahkan, disosialisasikan, dan digunakan dalam kegiatan lintas organ. Implementasi dinyatakan berhasil apabila memenuhi kriteria keberadaan dokumen, pemahaman, penggunaan, dan evaluasi berkala. Kriteria: - Dokumen mekanisme/peraturan antar organ telah disahkan - Disosialisasikan kepada seluruh organ terkait - Tersedia laporan monitoring dan evaluasi implementasi minimal 1 kali/tahun Sumber data: Dokumen/pedoman antar organ	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Notulensi/berita acara koordinasi Laporan monev Formula N3: (Jumlah kriteria terpenuhi/jumlah total kriteria) x 100 N4: Tersedianya sistem manajemen yang berfungsi secara aktif untuk mendukung proses koordinasi antar organ universitas, yang mencakup: 1. Pencatatan jadwal, agenda, dan notulensi hasil koordinasi, 2. Penyimpanan terstruktur dokumen hasil keputusan bersama, 3. Pengolahan dan distribusi informasi atau rekomendasi hasil koordinasi, 4. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan dan tindak lanjut keputusan. Kriteria: 1. Sistem/aplikasi sudah tersedia dan online. 2. Sistem mencakup fitur pencatatan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, dan monev. 3. Akses pengguna (organ terkait) telah tersedia. 4. Minimal 1 data koordinasi antar organ telah dicatat dan didistribusikan melalui sistem. 5. Tersedia dashboard monitoring dan evaluasi. Formula N4: (Jumlah elemen system yang telah terimplementasi/total elemen wajib) x 100% Misalnya: 5 elemen wajib (pencatatan, penyimpanan, distribusi, monitoring, akses pengguna) $5/5 = 100\%$ (sistem lengkap) $3/5 = 60\%$ (parsial) Formula Total N = (N1+N2+N3+N4)/4	
PS 15.1.1	Pengembangan sistem terintegrasi yang mendukung tata Kelola UT yang <i>agile</i> dan berintegritas		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan																					
IKPS 15.1.1.1	Tersedianya sistem terintegrasi (regulasi, tatanan kelembagaan, sistem informasi dan komunikasi) yang mendukung tata Kelola UT yang <i>agile</i> dan berintegritas	Definisi Operasional Ketersediaan sistem terintegrasi yang terdiri dari: regulasi, tatanan kelembagaan, sistem informasi, dan komunikasi yang mendukung penguatan tata kelola Universitas Terbuka (UT). Kriteria Pengukuran - Regulasi: mencakup mekanisme check and balance serta ketentuan kewenangan dalam pengambilan keputusan dan rapat konsolidasi. - Kelembagaan: pembentukan organ-organ (SOTK), review regulasi dan kelembagaan, revisi SOTK, dan penguatan fungsi kelembagaan. - Tata Kelola SDM: memenuhi prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan kewajaran, penjaminan mutu dan relevansi, efektivitas dan efisiensi, serta nirlaba. - Sistem Informasi dan Komunikasi: mendukung koordinasi antar unit melalui rapat sistemik, aplikasi pencatatan jadwal dan notulensi, penyimpanan dokumen, distribusi informasi hasil koordinasi, monitoring, dan evaluasi. Indikator dan Formula Pengukuran <table><tr><th>Kode</th><th>Komponen</th><th>Formula</th></tr><tr><td>N1</td><td>Regulasi</td><td>(Jumlah regulasi yang tersedia ÷ regulasi yang dibutuhkan) × 100</td></tr><tr><td>N2</td><td>Kelembagaan</td><td>(Jumlah dokumen kelembagaan/SOTK tersedia ÷ dokumen yang dibutuhkan) × 100</td></tr><tr><td>N3</td><td>SER Tata Kelola SDM</td><td>Jika tersedia: 100%; jika tidak tersedia: 0%</td></tr><tr><td>N4</td><td>Zona Integritas</td><td>(Jumlah unit yang menjalankan ZI ÷ jumlah target tahunan) × 100%</td></tr><tr><td>N5</td><td>Sistem Informasi & Komunikasi</td><td>(NA + NB + NC) ÷ 3</td></tr><tr><td>Total N</td><td>Integrasi seluruh N</td><td>(N1+N2+N3+N4+N5) ÷ 5</td></tr></table>	Kode	Komponen	Formula	N1	Regulasi	(Jumlah regulasi yang tersedia ÷ regulasi yang dibutuhkan) × 100	N2	Kelembagaan	(Jumlah dokumen kelembagaan/SOTK tersedia ÷ dokumen yang dibutuhkan) × 100	N3	SER Tata Kelola SDM	Jika tersedia: 100%; jika tidak tersedia: 0%	N4	Zona Integritas	(Jumlah unit yang menjalankan ZI ÷ jumlah target tahunan) × 100%	N5	Sistem Informasi & Komunikasi	(NA + NB + NC) ÷ 3	Total N	Integrasi seluruh N	(N1+N2+N3+N4+N5) ÷ 5	Persentase
Kode	Komponen	Formula																						
N1	Regulasi	(Jumlah regulasi yang tersedia ÷ regulasi yang dibutuhkan) × 100																						
N2	Kelembagaan	(Jumlah dokumen kelembagaan/SOTK tersedia ÷ dokumen yang dibutuhkan) × 100																						
N3	SER Tata Kelola SDM	Jika tersedia: 100%; jika tidak tersedia: 0%																						
N4	Zona Integritas	(Jumlah unit yang menjalankan ZI ÷ jumlah target tahunan) × 100%																						
N5	Sistem Informasi & Komunikasi	(NA + NB + NC) ÷ 3																						
Total N	Integrasi seluruh N	(N1+N2+N3+N4+N5) ÷ 5																						

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Rincian Formula Tambahan N4: Zona Integritas Target Jumlah Unit per Tahun: 1. 2025: Seluruh Fakultas 2. 2026: Fakultas, Lembaga, Direktorat 3. 2027: + UT Daerah 4. 2028: + Pusat di luar lembaga 5. 2029: Seluruh unit UT Formula: $(\text{Jumlah Unit yang menjalankan ZI} \div \text{Jumlah Target}) \times 100\%$ N5: Sistem Informasi dan Komunikasi A. Sistem Pendukung Governansi 1. Sistem tersedia dan online 2. Fitur pencatatan, penyimpanan, pengolahan, distribusi, monev tersedia 3. Akses pengguna tersedia 4. Minimal 1 data koordinasi dicatat dan didistribusikan 5. Tersedia dashboard monitoring dan evaluasi Formula NA: $(\text{Jumlah elemen terimplementasi} \div 5) \times 100\%$ B. Keterbukaan Informasi Publik (PPID) Kategori Skor: 1. < 39: Tidak Informatif 2. 40–59: Kurang Informatif 3. 60–79: Cukup Informatif 4. 80–96: Menuju Informatif 5. 97–100: Informatif Baseline 2024: 83 Formula NB: Skor Indeks PPID C. Komunikasi Organisasi Sistemik	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Definisi: Adanya forum terjadwal (RTM, Rakernas, dll) dengan risalah rapat dan evaluasi berkala. Formula NC: $(\text{Jumlah forum terlaksana} \div \text{jumlah forum yang direncanakan}) \times 100\%$	
PS 16.1.1	Penguatan sistem manajemen strategik untuk peningkatan kinerja.		
IKPS 16.1.1.1	Pencapaian IKU UT	Definisi Operasional: Persentase ketercapaian IKU UT di tiap unit yang dimandatkan ke unit terkait Kriteria: Pencapaian IKU unit pada masing-masing unit yang tertuang dalam Perjanjian kinerja antara Pimpinan unit dengan Rektor, Wakil Rektor dengan unit koordinasi dibawahnya Formula: $(\text{Jumlah IKU Unit yang tercapai dalam Perjanjian Kinerja} / \text{Jumlah total IKU Unit Perjanjian Kinerja}) \times 100\%$	Persentase
IKPS 16.1.1.2	Tingkat Kepuasan <i>Stakeholder</i> (pegawai, mitra, tutor)	Definisi Operasional: Tingkat kepuasan tutor, mitra kerja, dan pegawai. Kumpulan <i>feedback</i> dari <i>stakeholder</i> kunci (karyawan, tutor, mitra) tentang efektivitas sistem manajemen strategik. Kriteria: Tingkat kepuasan mitra (IKM), tutor (IKT) dan pegawai (IKP). Indeks IKM, IKT, dan IKP dihitung sesuai SK Rektor Formula: $((\text{IKM} + \text{IKT} + \text{IKP}) / 3) \times 100\%$ Skor indeks kepuasan diatur oleh SK Rektor Data dan informasi diperoleh melalui survei, wawancara, atau <i>focus group discussion</i>.	Persentase
PS 17.1.1	Penguatan peran UT sebagai mitra strategis pemerintah dan masyarakat dalam pembuatan kebijakan dan pemberdayaan.		
IKPS 17.1.1.1	Jumlah kegiatan yang memberi kontribusi kepada pemerintah dan masyarakat.	Definisi Operasional: Kontribusi UT dalam mendukung pemerintah dalam bentuk gagasan/hasil riset. Kriteria: Jumlah kegiatan seminar/webinar dan hasil penelitian terkait kebijakan pemerintah.	Jumlah

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: Jumlah seminar/webinar dan hasil penelitian yang terkait kebijakan pemerintah	
PS 18.1.1	Pengembangan dan Implementasi Grand Design HCM	untuk mencapai SDM Unggul	
IKPS 18.1.1.1	Terlaksananya Perencanaan, rekrutmen dan penempatan yang sesuai dengan grand design HCM	Definisi Operasional: - Grand Design Human Capital Management (HCM) adalah kerangka strategis yang mengarahkan pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi guna mencapai tujuan jangka panjang. HCM mengintegrasikan teknologi terkini seperti penggunaan sistem informasi sumber daya manusia, analitik data, dan alat kolaborasi digital. - Perencanaan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang sesuai dengan kebutuhan Universitas Terbuka (UT) adalah proses sistematis yang bertujuan untuk menganalisis dan memproyeksikan jumlah serta kualifikasi SDM yang diperlukan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pendidikan UT dalam konteks pembelajaran jarak jauh. - Proses rekrutmen dan penempatan Sumber Daya Manusia (SDM) adalah rangkaian langkah sistematis yang dilakukan oleh organisasi untuk menarik, memilih, dan mendapatkan kandidat yang paling sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan, dengan mempertimbangkan kebutuhan Universitas Terbuka. Kriteria Dokumen Grand Design UT memiliki dokumen grand design HCM sebagai kerangka strategis implementasi HCM yang terupdate dan ditunjang dengan penggunaan sistem informasi. Kriteria Dokumen Perencanaan Adanya dokumen perencanaan kebutuhan SDM yang memuat: - Identifikasi kompetensi yang dibutuhkan. - Pemetaan posisi yang ada. - Evaluasi tren dan kebutuhan pasar pendidikan yang terus berkembang. - Pertimbangan faktor-faktor eksternal seperti perubahan teknologi, kebutuhan mahasiswa, dan dinamika industri pendidikan, perencanaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa UT memiliki SDM yang tepat, dengan keterampilan yang relevan dan dalam jumlah yang memadai.	Dokumen

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria Rekrutmen dan Penempatan: Pelaksanaan rekrutmen dan penempatan dilaksanakan dengan metode assesment center dan juga menggunakan platform daring, media sosial, dan alat analitik data untuk menjangkau calon pelamar yang lebih luas, serta memanfaatkan aplikasi dan sistem manajemen rekrutmen yang memungkinkan pengolahan dan evaluasi kandidat secara cepat dan efektif. Catatan: jumlah kebutuhan SDM total 2025-2029 : 1225 (100 %). Rekrutmen dilakukan sesuai dengan kebutuhan SDM berdasarkan jumlah mahasiswa, jumlah SDM pensiun, dan pembukaan prodi baru. Formula: N1= Tersedia dokumen grand design (tersedia=100, belum tersedia=0) N2= (kriteria dokumen perencanaan SDM yang terpenuhi/total kriteria)*100 N3= (Jumlah SDM yang direkrut/ jumlah kebutuhan SDM) X 100. N gabungan= (N1+N2+N3)/3	
IKPS 18.1.1.2	Terlaksananya program pengembangan SDM dalam berbagai modus dengan jumlah jam pelatihan yang memadai, termasuk <i>talent pool</i>	Definisi Operasional: 1. Program pengembangan SDM untuk meningkatkan kompetensi dosen dan tenaga kependidikan melalui pelatihan yang mencakup aspek akademik, teknis (termasuk penguasaan digital), manajerial, dan sosio-kultural) 2. Program pengembangan talenta dan karir Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pendidikan jarak jauh adalah inisiatif yang dirancang untuk mengidentifikasi, memfasilitasi, dan memaksimalkan potensi serta keterampilan individu Kriteria Program Pengembangan SDM: 1. Pelatihan akademik bertujuan untuk mengembangkan pemahaman materi dan metode pengajaran yang efektif. 2. Pelatihan teknis memberikan keterampilan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang diperlukan untuk mendukung pembelajaran daring. 3. Pelatihan manajerial fokus pada pengembangan kemampuan kepemimpinan, pengelolaan tim, dan perencanaan strategis dalam konteks pendidikan jarak jauh.	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		4. Pelatihan sosio-kultural menekankan pemahaman keragaman budaya dan keterampilan interpersonal yang penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif. Kriteria Talent Pool: Tersedia talenta sebanyak dua kali jumlah jabatan. Jumlah jabatan di UT Pusat (140) dan UT Daerah (160) : 300; talent yang dibutuhkan : 600 Formula: $N1 = ((\text{Jumlah JP terlaksana} / \text{Jumlah JP wajib (20 JP)}) \times \text{total orang}) \times 100\%$ $N2 = (\text{Jumlah peserta yang direkrut dalam program manajemen talent} / \text{Jumlah Peserta talent}) \times 100\%$ $\text{Ngabungan} = (N1 + N2) / 2$	
IKPS 18.1.1.3	Terlaksananya program dan kegiatan penguatan budaya kerja KIIARA pada seluruh pegawai UT	Definisi Operasional: Penguatan budaya kerja dalam pendidikan jarak jauh yang didasarkan pada nilai-nilai dasar Kualitas Unggul, Integritas, Inovatif, Aksesibel, Relevan, dan Akuntabel (KIIARA) adalah proses yang bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang mendukung pencapaian tujuan pendidikan secara efektif dan berkelanjutan. Kriteria: 1. Nilai Kualitas Unggul mendorong seluruh anggota organisasi untuk selalu meningkatkan standar akademik dan operasional. 2. Integritas menekankan pentingnya kejujuran dan etika dalam semua tindakan, membangun kepercayaan di antara staf, pengajaran, dan peserta didik. 3. Inovatif mendorong pengembangan metode baru dan solusi kreatif dalam menghadapi tantangan pendidikan jarak jauh. 4. Aksesibel memastikan bahwa semua pendidikan dan sumber belajar dapat dijangkau oleh seluruh peserta, tanpa terkecuali. 5. Relevan menekankan pentingnya konten dan metode belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan dunia serta tuntutan pasar kerja. 6. Akuntabel mengharuskan semua pihak untuk bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang diambil, serta transparansi dalam proses evaluasi. Formula: Jumlah kegiatan pengembangan budaya kerja.	Kegiatan/ Unit

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Jenis kegiatan pengembangan budaya kerja: 1. <i>Capacity building</i> 2. Agen perubahan/integritas 3. Gugus Penjaminan Mutu 4. Sosialisasi disiplin kerja 5. Sosialisasi praktik ramah lingkungan dan hemat energi	
IKPS 18.1.1.4	Terlaksananya program pemberian penghargaan, imbalan, dan pengakuan berdasarkan <i>merit system</i> , termasuk program persiapan pensiun.	Definisi Operasional: Program pemberian penghargaan, imbalan, dan pengakuan kepada pegawai bertujuan untuk meningkatkan motivasi, keterlibatan, dan kepuasan kerja. Merit system merupakan Sistem manajemen SDM yang menekankan pada kinerja, kompetensi, dan integritas sebagai dasar utama dalam: 1. promosi jabatan, 2. pemberian penghargaan, 3. penugasan khusus, 4. dan pengembangan karier. Kriteria: 1. Program penghargaan dapat berupa bonus finansial, sertifikat, penghargaan formal, atau bahkan kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan lebih lanjut. 2. Program juga mencakup pengakuan non-moneter, seperti apresiasi publik dalam acara UT, yang bertujuan untuk menciptakan budaya kerja yang positif dan inklusif. Jenis program penghargaan, imbalan, dan pengakuan meliputi : 1. Keikutsertaan dalam seminar 2. Sertifikasi 3. Reward Publikasi 4. Penggantian biaya Publikasi 5. Rector's Award 6. Remunerasi 7. Persiapan pensiun Kriteria Predikat Kinerja:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		110 <x<120 : diatas ekspektasi : predikat sangat baik 90<x<110 : sesuai ekspektasi : predikat baik 70<x<90 : sesuai ekspektasi : predikat cukup 50<x 70 : dibawah ekspektasi: predikat kurang <50 : dibawah ekspektasi: predikat sangat kurang Catatan: Setiap pegawai berpredikat “Baik” atau “Sangat Baik” dapat memperoleh minimal satu dari enam jenis program penghargaan berikut: 1. Keikutsertaan dalam seminar 2. Sertifikasi 3. Reward publikasi 4. Penggantian biaya publikasi 5. Rector’s Award 6. Remunerasi (tunjangan kinerja tambahan) Catatan: unit kerja tidak lagi menjadi syarat wajib memiliki ke-6 program—yang penting pegawainya dapat mengakses minimal satu jenis penghargaan sesuai predikat. • Artinya, apabila di suatu unit hanya ada program “Remunerasi” dan “Penggantian Biaya Publikasi”, selama pegawai “Baik” mendapatkan salah satunya, ia sudah dianggap “menerima penghargaan”. Formula: N1= proporsi pegawai di tiap unit kerja yang berpredikat Baik/Sangat Baik (jumlah pegawai yang mendapat predikat baik/sangat baik/jumlah pegawai di unit kerja) N2= persentase pegawai dengan predikat baik/sangat baik yang benar-benar mendapatkan setidaknya satu program penghargaan, imbalan, pengakuan Y= total pegawai berpredikat Baik/Sangat Baik Z= jumlah pegawai berpredikat baik/sangat baik dan mendapatkan setidaknya satu penghargaan $(Z/Y) \times 100\%$	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		$N \text{ gabungan} = (N1+N2)/2$	
IKPS 18.1.1.5	Guru Besar dan Lektor Kepala	Definisi Operasional: Jumlah dosen guru besar dan lektor kepala Target merupakan target kumulatif Kriteria: Dosen guru besar dan lektor kepala Formula: $N1 = (\text{Jumlah dosen guru besar} / \text{Total dosen}) \times 100$ $N2 = (\text{Jumlah dosen lektor kepala} / \text{total dosen}) \times 100$ $N \text{ gabungan} = (0,16 \times N1) + (0,84 \times N2)$	Persentase
IKPS 18.1.1.6	Dosen bergelar doktor dan tendik bergelar magister	Definisi Operasional: Dosen bergelar doktor adalah tenaga pendidik pada perguruan tinggi yang: - Memiliki ijazah Doktor (S-3), baik dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi maupun luar negeri yang telah memperoleh penyetaraan dari Kementerian yang membidangi pendidikan tinggi; - Diangkat dan dibebani tugas tridharma (pendidikan & pengajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat) sesuai ketentuan perundang-undangan; - Tercatat dalam Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan jabatan fungsional minimal Asisten Ahli atau setara; - Aktif melaksanakan kewajiban akademik dan memiliki beban kerja dosen (BKD) yang tervalidasi. Tenaga kependidikan bergelar magister (S-2) adalah pegawai non-dosen pada perguruan tinggi yang: - Memiliki ijazah Magister (S-2) dari perguruan tinggi terakreditasi atau luar negeri yang sudah disetarakan; - Menyelenggarakan layanan akademik, administrasi, teknis, atau manajerial guna menunjang pelaksanaan tridharma perguruan tinggi;	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan															
		3. Diangkat melalui mekanisme kepegawaian resmi perguruan tinggi dan terdata dalam PDDikti atau sistem kepegawaian internal UT; Kriteria: Dosen doktor dan tendik magister Target merupakan target kumulatif Formula: N1=(Jumlah dosen bergelar doktor / Total dosen) X 100 N2= (Jumlah tendik bergelar magister/total tendik) x 100 N gabungan= (0,85*N1) + (0,15*N2)																
IKPS 18.1.1.7	Pegawai (dosen dan tendik) yang memiliki sertifikat pendidik, sertifikasi nasional kompetensi, teknis (TIK, keuangan, Barjas), dan/atau profesi	Definisi Operasional: Pegawai (dosen dan tendik) yang memiliki sertifikat pendidik, sertifikasi nasional kompetensi, teknis (TIK/Keuangan/Barjas), dan/atau profesi Kriteria: Dosen bersertifikasi nasional (SERDOS) 1. Formula per Kategori: <table><tr><th>Kategori Sertifikasi</th><th>Formula</th><th>Bobot</th></tr><tr><td>N1 = Sertifikasi Dosen (Serdos)</td><td>= (Jumlah dosen bersertifikat pendidik / Jumlah total dosen) × 100%</td><td>40</td></tr><tr><td>N2 = Sertifikasi Kompetensi (dosen/tendik)</td><td>= (Jumlah dosen/tendik bersertifikasi kompetensi / Total dosen/tendik terkait) × 100%</td><td>25</td></tr><tr><td>N3 = Sertifikasi Teknis (TIK/Keuangan/Barjas)</td><td>= (Jumlah tendik bersertifikasi teknis / Jumlah total tendik yang relevan) × 100%</td><td>20</td></tr><tr><td>N4 = Sertifikat Profesi Lainnya</td><td>= (Jumlah pegawai bersertifikat profesi / Jumlah total pegawai) × 100%</td><td>15</td></tr></table> Formula Gabungan: N = (N1x40%)+(N2x25%)+(N3x20%)+(N4x15%)	Kategori Sertifikasi	Formula	Bobot	N1 = Sertifikasi Dosen (Serdos)	= (Jumlah dosen bersertifikat pendidik / Jumlah total dosen) × 100%	40	N2 = Sertifikasi Kompetensi (dosen/tendik)	= (Jumlah dosen/tendik bersertifikasi kompetensi / Total dosen/tendik terkait) × 100%	25	N3 = Sertifikasi Teknis (TIK/Keuangan/Barjas)	= (Jumlah tendik bersertifikasi teknis / Jumlah total tendik yang relevan) × 100%	20	N4 = Sertifikat Profesi Lainnya	= (Jumlah pegawai bersertifikat profesi / Jumlah total pegawai) × 100%	15	Persentase
Kategori Sertifikasi	Formula	Bobot																
N1 = Sertifikasi Dosen (Serdos)	= (Jumlah dosen bersertifikat pendidik / Jumlah total dosen) × 100%	40																
N2 = Sertifikasi Kompetensi (dosen/tendik)	= (Jumlah dosen/tendik bersertifikasi kompetensi / Total dosen/tendik terkait) × 100%	25																
N3 = Sertifikasi Teknis (TIK/Keuangan/Barjas)	= (Jumlah tendik bersertifikasi teknis / Jumlah total tendik yang relevan) × 100%	20																
N4 = Sertifikat Profesi Lainnya	= (Jumlah pegawai bersertifikat profesi / Jumlah total pegawai) × 100%	15																

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 18.1.1.8	Tersedia database dan aplikasi Human Capital Management (HCM) yang meliputi fungsi-fungsi HCM sesuai kebutuhan	Definisi Operasional: Tersedia database dan aplikasi SISMA meliputi database pegawai dan Fungsi-fungsi Human Capital Management (HCM) meliputi OTK Analisis Jabatan Kriteria: Aplikasi SISMA meliputi ketersediaan dan kelengkapan database pegawai serta Fungsi-fungsi Human Capital Management (HCM) meliputi OTK Analisis Jabatan. Aplikasi Sisma meliputi database dan 11 Modul SISMA: 1. Database pegawai 2. Modul Peta jabatan, analisis jabatan, dan analisis beban kerja 3. Modul perencanaan dan rekrutmen 4. Modul peta potensi, peta kompetensi, TNA 5. Modul Pengelolaan pelatihan, studi lanjut, dan magang 6. Modul pengelolaan WFA 7. Modul manajemen karir tendik pelaksana, fungsional dosen dan fungsional non dosen 8. Modul manajemen kinerja terintegrasi (SKP, presentsi, BKD, disiplin, gaji, dan remunerasi) 9. Modul manajemen kesejahteraan dan Kesehatan (wellness) SDM 10. Modul manajemen pension 11. Modul untuk analitik manajemen SDM 12. Modul yang dapat digunakan untuk analitik dan akses Big Data Formula: Tiap komponen mempunyai bobot: 8.33% = komponen yang selesai x bobot	Persentase
PS 19.1.1	Pengembangan Sistem Kerja Digital dan <i>Agile</i>		
IKPS 19.1.1.1	Tersedianya Sistem Kerja Digital dan <i>Agile</i>	Definisi Operasional: Ketersediaan sistem terintegrasi yang mendukung implementasi sistem kerja digital dan <i>agile</i> mencakup penerapan kebijakan dan infrastruktur yang mendukung fleksibilitas	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		kerja, termasuk Work From Anywhere (WFA), melalui penggunaan teknologi, manajemen berbasis output, dan koordinasi daring. Kriteria: Tersedianya: 1. Regulasi (Bobot 25 %) 2. Tata kerja, prosedur, mekanisme, jenis pekerjaan, monev (50 %) 3. Sistem Informasi yang mendukung penerapan WFA (25%) Formula: $N1 = \text{Regulasi (jumlah regulasi yang tersedia/regulasi yang dibutuhkan)} \times 0.25$ $N2 = \text{Tata kerja (jumlah dokumen kelembagaan/SOTK yang tersedia : jumlah dokumen kelembagaan/SOTK yang dibutuhkan)} \times 0.50$ $N3 = \text{Tersedianya sistem informasi} \times 0.25$ $= ((N1 \times 0.25) + (N2 \times 0.50) + (N3 \times 0.25)) / 100$	
PS 19.1.2	Pengembangan Aplikasi fungsi-fungsi <i>Human Capital Management</i> (HCM)		
IKPS 19.1.2.1	Skor Indeks Budaya Pembelajaran Digital	Definisi Operasional: Skor Indeks Budaya Pembelajaran Digital adalah ukuran gabungan (komposit) yang mencerminkan tingkat internalisasi dan praktik budaya digital dalam kegiatan pembelajaran oleh dosen dan mahasiswa. Indeks ini dihitung berdasarkan: 1. Adopsi teknologi oleh dosen 2. Pemanfaatan fitur digital pembelajaran 3. Partisipasi aktif mahasiswa dalam pembelajaran daring 4. Dukungan institusional terhadap pembelajaran digital (misal: kebijakan, infrastruktur, insentif) Kriteria: Indeks dihitung dari 4 komponen utama 1. Persentase dosen yang aktif menggunakan LMS/e-learning (30%) 2. Rata-rata jumlah fitur digital yang digunakan per dosen (25 %) 3. Tingkat partisipasi mahasiswa dalam pembelajaran daring (25 %) 4. Ketersediaan dan pemanfaatan dukungan institusi (20 %) Instrumen dan sumber data 1. Dosen aktif LMS : Log penggunaan LMS	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan												
		2. Fitur yang digunakan: analitik LMS 3. Partisipasi mahasiswa: aktivitas login, pengumpulan tugas, forum diskusi 4. Dukungan institusional: kebijakan, jumlah pelatihan, infrastuktur <table><tr><th>Skor Indeks</th><th>Interpretasi</th></tr><tr><td>90–100</td><td>Sangat Kuat – Budaya pembelajaran digital telah mengakar dan menjadi bagian dari praktik harian</td></tr><tr><td>80–89</td><td>Kuat – Penggunaan teknologi tinggi dan konsisten, namun belum sepenuhnya merata di seluruh unit</td></tr><tr><td>70–79</td><td>Cukup – Teknologi telah digunakan tapi masih terbatas dalam fitur atau keterlibatan mahasiswa</td></tr><tr><td>60–69</td><td>Lemah – Implementasi pembelajaran digital masih minim atau tidak konsisten</td></tr><tr><td>< 60</td><td>Sangat Lemah – Budaya pembelajaran digital belum terbentuk, hanya digunakan karena kewajiban teknis</td></tr></table>	Skor Indeks	Interpretasi	90–100	Sangat Kuat – Budaya pembelajaran digital telah mengakar dan menjadi bagian dari praktik harian	80–89	Kuat – Penggunaan teknologi tinggi dan konsisten, namun belum sepenuhnya merata di seluruh unit	70–79	Cukup – Teknologi telah digunakan tapi masih terbatas dalam fitur atau keterlibatan mahasiswa	60–69	Lemah – Implementasi pembelajaran digital masih minim atau tidak konsisten	< 60	Sangat Lemah – Budaya pembelajaran digital belum terbentuk, hanya digunakan karena kewajiban teknis	
Skor Indeks	Interpretasi														
90–100	Sangat Kuat – Budaya pembelajaran digital telah mengakar dan menjadi bagian dari praktik harian														
80–89	Kuat – Penggunaan teknologi tinggi dan konsisten, namun belum sepenuhnya merata di seluruh unit														
70–79	Cukup – Teknologi telah digunakan tapi masih terbatas dalam fitur atau keterlibatan mahasiswa														
60–69	Lemah – Implementasi pembelajaran digital masih minim atau tidak konsisten														
< 60	Sangat Lemah – Budaya pembelajaran digital belum terbentuk, hanya digunakan karena kewajiban teknis														
Perencanaan dan Keuangan															
PS 20.1.1	Peningkatan profit bersih yang bersumber dari <i>revenue generating activities</i> (RGAs) selain pendapatan layanan akademik														
IKPS 20.1.1.1	Jumlah profit bersih yang bersumber dari <i>revenue generating activities</i> (RGAs) selain pendapatan layanan akademik	Definisi Operasional: Jumlah profit bersih yang bersumber dari revenue generating activities selain layanan akademik adalah selisih antara total pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan yang menghasilkan pendapatan diluar layanan akademik (seperti penyewaan fasilitas, program pelatihan, dan layanan lainnya) dengan total biaya yang dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan tersebut. Profit bersih ini mencerminkan efisiensi dan efektivitas unit dalam mengelola sumber daya untuk menghasilkan pendapatan. Sumber Peraturan tentang Tarif beserta turunannya. Periode Pendapatan dan Belanja berdasarkan data Laporan Keuangan Audited (1 Januari s.d 31 Desember)	Rupiah												

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria: 1. Pendapatan: a. Pendapatan dari kursus/pelatihan/seminar/lokakarya. b. Pendapatan dari konsultasi dan riset. c. Pendapatan dari penerbitan dan percetakan. d. Pendapatan dari sertifikasi. e. Pendapatan dari layanan teknologi informasi. f. Pendapatan dari produksi multimedia. g. Pendapatan dari poliklinik. h. Pendapatan dari penyewaan sarana dan prasarana. i. Pendapatan dari kerjasama dengan industri dan lembaga lain. j. dan pendapatan lainnya di luar layanan akademik. 2. Biaya: a. Biaya operasional (Gaji pegawai, uang makan, lembur, transport, utilitas, pemeliharaan fasilitas, listrik, telepon, internet, PDAM, surat kabar, peralatan kantor, koordinasi pelaksanaan program). b. Biaya pemasaran dan promosi. c. Biaya administrasi yang terkait dengan kegiatan <i>revenue generating</i>. d. Biaya langsung yang terkait dengan penyelenggaraan program atau layanan. Biaya-biaya diatas adalah untuk unit-unit bisnis yang akan dikelola oleh PPBI. 3. Periode Pengukuran: Pengukuran dilakukan secara tahunan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang profitabilitas. Formula: Profit Bersih = Total Pendapatan - Total Biaya Total Pendapatan: Jumlah semua pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan revenue generating setelah dikurangi pajak yang dimiliki oleh UT maupun entitas anak usaha UT.	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Total Biaya: Jumlah semua biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan tersebut setelah dikurangi pajak yang dimiliki oleh UT maupun entitas anak usaha UT	
IKPS 20.1.1.2	Persentase proporsi biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) unit usaha	Definisi Operasional: Persentase proporsi biaya operasional pendapatan operasional (BOPO) unit usaha adalah seluruh biaya diluar biaya investasi yang dilakukan secara tahunan untuk mendapatkan pendapatan unit usaha dengan membandingkan biaya operasional terhadap pendapatan Kriteria: Biaya: Biaya operasional adalah seluruh biaya diluar biaya investasi. Pendapatan: Pendapatan adalah seluruh pendapatan UT pada tahun anggaran berjalan. Pengukuran dilakukan secara setahun dari tanggal 1 Januari s.d 31 Desember tahun anggaran berjalan Audited. Formula: Optimalisasi Biaya = (Total Biaya / Total Pendapatan) X 100%	Persentase
IKPS 20.1.1.3	Proporsi jumlah pendapatan unit usaha dibandingkan jumlah total pendapatan UT	Definisi Operasional: Persentase pendapatan unit usaha terhadap total pendapatan UT Kriteria: Pendapatan unit usaha UT Formula: Persentase pendapatan = (Jumlah Pendapatan Unit Usaha / Total Pendapatan UT) X 100%	Persentase
IKPS 20.1.1.4	Jumlah unit usaha UT menjadi Badan Usaha Milik UT dan anak usaha Badan Usaha Milik UT	Definisi Operasional: Badan Usaha Milik UT adalah unit usaha UT yang secara tata kelola terpisah dari UT Kriteria: Jumlah Badan Usaha Milik UT	Jumlah

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: Jumlah Badan Usaha Milik UT	
IKPS 20.1.1.5	Jumlah dividen Badan Usaha Milik UT	Definisi Operasional: Jumlah dividen yang dihasilkan oleh Badan Usaha Milik UT Kriteria: Jumlah dividen Badan Usaha Milik UT Formula: Jumlah dividen Badan Usaha Milik UT	Rupiah
IKPS 20.1.1.6	Pertumbuhan dana abadi PTNBH	Definisi Operasional: Alokasi dana abadi 2,5% dari surplus UT per tahun Kriteria: Pertumbuhan dana abadi dengan komposisi 1. 60% dari dana UT 2. 30% dari bagi hasil atas investasi dana abadi PTNBH 3. 10% alumni Formula: Alokasi dana abadi 2,5% dari surplus UT per tahun	Persentase
IKPS 20.1.1.7	Pengelolaan hasil pengembangan investasi PTNBH UT (<i>Return On Investment</i>)	Definisi Operasional: Persentase ROI pengelolaan hasil pengembangan investasi PTNBH UT adalah ukuran efisiensi dan efektivitas dalam memperoleh keuntungan dari aktivitas investasi universitas, baik investasi dalam bentuk aset keuangan, properti, maupun pengembangan usaha, yang dikelola untuk mendukung kemandirian keuangan UT. Return on Investment (ROI) dihitung sebagai rasio antara imbal hasil (bersih) yang diperoleh dari hasil investasi terhadap total dana yang diinvestasikan dalam setiap tahunnya. Kriteria: Instrumen:	Persentase ROI

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. Hasil penempatan dana UT pada instrument deposito dan sukuk atau SBSN 2. Hasil penempatan dana pada BUM UT 3. Hasil unit usaha Formula: (Imbal hasil (bersih) investasi / total dana yang diinvestasikan) x 100	
PS 21.1.1	Integrasi pengembangan dan sistem tata kelola pengelolaan dana		
IKPS 21.1.1.1	Persentase integrasi pengembangan sistem tata kelola pengelolaan dana	Definisi Operasional Persentase integrasi sistem tata kelola pengelolaan dana adalah ukuran proporsional yang menunjukkan sejauh mana sistem manajemen keuangan dalam suatu organisasi telah terintegrasi dan berfungsi secara efektif. Ini mencerminkan kemampuan sistem dalam mengelola dan memantau aliran dana. Kriteria 1. Jumlah Modul (N1) (Bobot = 50%) - Jumlah Modul Yang Direncanakan pada aplikasi SIPPP. - Jumlah Modul Yang Sudah Digunakan pada aplikasi SIPPP. 2. Proses Integrasi Sistem (N2) (Bobot = 50%): - Integrasi Sistem: Antar modul sudah terintegrasi. - Implementasi Sistem: Sistem telah diterapkan dalam operasi sehari-hari. - Akurasi Integrasi Sistem: Sistem memberikan informasi akurat. - Pembaruan dan Maintenance: Sistem diperbarui secara berkala untuk menjaga keefektifan. Formula: = N1 (50%) + N2 (50%) Formula Kriteria N1 = (Jumlah modul yang sudah digunakan / Jumlah modul yang direncanakan) X 100%. Formula Kriteria N2 = (Jumlah kriteria yang dipenuhi / Jumlah total kriteria) X 100%.	Persentase
PS 21.1.2	Akuntabilitas pengelolaan dana Universitas		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 21.1.2.1	Persentase opini wajar tanpa pengecualian dan ketepatan waktu pelaporan atas Laporan Keuangan	Definisi Operasional: Sistem pengelolaan keuangan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggung jawaban anggaran yang tertib, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan tepat waktu dalam pelaporan. Kriteria: Laporan keuangan memenuhi syarat WTP (sesuai standar akuntansi pemerintah, efektifitas penilaian unit pengawas internal, kecukupan pengungkapan informasi, dan kepatuhan pada peraturan perundangan) setelah di audit oleh kantor Akuntan Publik. Kriteria yang dinilai oleh KAP adalah sebagai berikut: 1. Penyajian Laporan Keuangan sesuai Standar Akuntansi; 2. Tingkat materialitas salah saji laporan keuangan dibawah 5% (Dilihat dari kompleksitas salah saji penyajian standar akuntansi keuangan); 3. Tingkat pengendalian internal sudah memenuhi kaidah PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (KPI); 4. Progres tindak lanjut temuan terdahulu (KPI). Formula: Penilaian WTP: Memenuhi WTP = 100%; Tidak memenuhi = 0%.	Persentase
IKPS 21.1.2.2	Persentase akuntabilitas pengelolaan dana Unit	Definisi Operasional: Akuntabilitas pengelolaan keuangan unit dengan kriteria sebagai berikut: 1. Pembukuan, Laporan Pertanggungjawaban Kas, dan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Bobot 60%) (N1) 2. Pertanggungjawaban Pelaksanaan Keuangan (Bobot 40%) (N2) Kriteria: Kriteria diatas adalah dokumen akuntabilitas pengelolaan keuangan yang terintegrasi dari E-Expenditure Formula: = N1 (60%) + N2 (40%)	Persentase
PS 21.1.3	Peningkatan nilai kinerja anggaran		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 21.1.3.1	Nilai Kinerja Anggaran (Penilaian Kementerian Keuangan)	Definisi Operasional: Nilai kinerja anggaran dibentuk dari nilai evaluasi kinerja anggaran (EKA) dan nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Kriteria: NKA terdiri proporsi nilai EKA (50%) dan proporsi nilai IKPA (50%) Formula: $EKA = (PxWP) + (KxWK) + (COPxWCOP) + (NExWE)$ Keterangan: P : Penyerapan anggaran WP : Bobot penyerapana anggaran K : Konsistensi penyerapan anggaran WK : Bobot konsistensi penyerapan anggaran COP : Capaian output program WCOP : Bobot capaian output program NE : Nilai efisiensi WE : Bobot efisiensi Bobot masing-masing variabel sebagai berikut: WP : 9,7% WK : 18,2% WCOP : 43,5% WE : Bobot efisiensi $IKPA = \sum (\text{Nilai Indikator} \times \text{Bobot Indikator}) / \text{Total Konversi Bobot}$ Bobot indikator IKPA: Revisi DIPA : 10% Deviasi Hal 3 DIPA : 15% Penyerapan Anggaran : 20% Capaian Output : 25%	Nilai
IKPS 21.1.3.2	Nilai Kinerja Anggaran (Penilaian Universitas)	Definisi Operasional:	Nilai

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Nilai kinerja anggaran unit terdiri dari persentase pengisian kegiatan, capaian output, realisasi anggaran, jumlah revisi DRA-UK, dan deviasi prognosis pada dokumen rincian anggaran unit kerja. Kriteria: 1. Persentase Pengisian Kegiatan (N1) (5%) 2. Capaian Output (N2) (35%) 3. Realisasi Anggaran (N3) (30%) 4. Jumlah Revisi DRA-UK (N4) (15%) 5. Deviasi Prognosis (N5) (15%) Formula: Nilai Kinerja Anggaran Unit = N1 (5%) + N2 (35%) + N3 (30%) + N4 (15%) + N5 (15%)	
PS 21.1.4	Peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah		
IKPS 21.1.4.1	Predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Definisi Operasional: Evaluasi SAKIP (Evaluasi AKIP) adalah evaluasi terhadap pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan setiap tahun oleh Kemendiktisaintek dengan merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil Evaluasi AKIP akan diterbitkan dalam bentuk Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dengan menampilkan Nilai Akuntabilitas Kinerja dan Predikat yang diperoleh. Kriteria: Komponen Penilaian AKIP: 1. Perencanaan Kinerja (30%) 2. Pengukuran Kinerja (30%) 3. Pelaporan Kinerja (15%) 4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%) Kategorisasi predikat hasil evaluasi SAKIP merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor	Predikat

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dapat dilihat pada tabel berikut. Predikat: AA (Nilai > 90 – 100) Interpretasi: Sangat Memuaskan, Telah terwujud Good Governance. Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (Reform). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu. Predikat: A (Nilai > 80 – 90) Interpretasi: Memuaskan, Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator. Predikat: BB (Nilai > 70 – 80) Interpretasi: Sangat Baik, Terdapat gambaran bahwa SAKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Predikat: B (Nilai > 60 – 70) Interpretasi: Terdapat gambaran bahwa SAKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja. Predikat: CC (Nilai > 50 – 60)	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Interpretasi: Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa SAKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja. Predikat: C (Nilai > 30 – 50) Interpretasi: Kurang, Sistem dan tatanan dalam SAKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat. Predikat: D (Nilai > 0 - 30) Interpretasi: Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam SAKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP. Formula: Nilai = a + b + c + d a = Perencanaan Kinerja (Nilai Angka x 30%). b = Pengukuran Kinerja (Nilai Angka x 30%). c = Pelaporan Kinerja (Nilai Angka x 15%). d = Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (Nilai Angka x 25%).	
Sarana dan Prasarana			
PS 22.1.1	Penguatan tata kelola TIK		
IKPS 22.1.1.1	Persentase kebijakan atau prosedur TIK yang terdokumentasi dan diterapkan	Definisi Operasional: <i>Blue print</i> IT, sistem, prosedur, dan aplikasi yang terintegrasi untuk mendukung tata kelola UT Kriteria:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		<i>Blue print</i> = bobot 40% Sistem dan prosedur = 20% Aplikasi = 40% Formula: Persentase Kebijakan dan Prosedur yang Diimplementasikan = $\left(\frac{\text{Jumlah Kebijakan dan Prosedur yang Diimplementasikan}}{\text{Jumlah Total Kebijakan dan Prosedur}} \right) \times 100$	
IKPS 22.1.1.2	Ketersediaan dan penerapan dokumen <i>Blue Print</i> Tata Kelola dan Pengembangan Teknologi Informasi yang terbaru	Definisi Operasional: <i>Blue Print</i> IT UT adalah dokumen resmi institusi yang berisi: Rencana induk pengembangan dan tata kelola TIK UT jangka menengah-panjang Visi, misi, arsitektur sistem informasi, rencana pengembangan infrastruktur, keamanan data, pelayanan digital, serta <i>roadmap</i> implementasi TIK Kriteria: <i>Blue print</i> IT yang selaras dengan visi misi dan memenuhi kebutuhan baru bidang IT yang disahkan dalam Peraturan Rektor tentang <i>blue print</i> IT. Tahapan penyusunan blue print: 1. Reviu/audit <i>blue print</i> saat ini 2. Konsultasi/<i>FGD stakeholders</i> 3. Penyusunan draft 4. Validasi dan finalisasi 5. Pengesahan 6. Sosialisasi Formula:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		(Jumlah tahapan penyusunan blue print yang diselesaikan / Jumlah tahapan yang direncanakan) x 100%	
PS 22.1.2	Penguatan Keamanan dan Ketahanan Siber		
IKPS 22.1.2.1	Penyelesaian insiden keamanan siber per tahun	Definisi Operasional: Ukuran keandalan dan ketersediaan jaringan dengan menghitung persentase waktu di mana jaringan berfungsi normal tanpa mengalami gangguan atau <i>downtime</i> dalam satu tahun. Kriteria: Total Waktu Operasional adalah jumlah total waktu dalam periode yang diukur (misalnya, satu bulan atau satu tahun). Formula: $\text{Uptime (\%)} = \left(\frac{\text{Total Waktu Operasional} - \text{Total Waktu Downtime}}{\text{Total Waktu Operasional}} \right) \times 100\%$	Persentase
PS 22.1.3	Pengembangan <i>Platform</i> Pembelajaran dan asesmen Inklusif dan Aksesibel		
IKPS 22.1.3.1	Jumlah fitur aksesibilitas (<i>text-to-speech</i> , subtitle, kontras tinggi, dsb.) yang tersedia	Definisi operasional: Jumlah fitur yang disediakan pada sistem, aplikasi, website, atau layanan TIK UT, yang dirancang untuk mendukung penggunaan yang inklusif bagi pengguna dengan berbagai kebutuhan khusus atau keterbatasan Kriteria: 1. <i>Text-to-speech</i> (pembacaan teks otomatis), 2. <i>Speech-to-text</i> (input suara menjadi teks), 3. Subtitle atau <i>closed captioning</i>, 4. Deskripsi audio untuk video, 5. Tampilan kontras tinggi, 6. Ukuran teks yang dapat diubah, 7. Navigasi keyboard penuh, 8. <i>Screen reader compatibility</i>, 9. Mode warna ramah buta warna, 10. Pengaturan kecepatan pembacaan atau pemutaran,	Fitur

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		11. Peringatan visual untuk suara, 12. Fitur lainnya yang diakui standar internasional Formula: Jumlah Fitur Aksesibilitas = $\sum$ (Setiap jenis fitur aksesibilitas yang tersedia)	
PS 23.1.1	Pengembangan Infrastruktur TIK Terintegrasi		
IKPS 23.1.1.1	Tersedianya akses jaringan TIK berkualitas di UT Pusat dan UT Daerah	Definisi Operasional: UT Pusat dan UT Daerah memiliki jaringan internet berkecepatan tinggi Kriteria: 1. Kecepatan akses internet stabil, aman dan cepat (internet 100Mbps) 2. Kecepatan rata-rata akses per hari per UT Daerah Formula: Jumlah wilayah UT Pusat dan UT Daerah yang memiliki akses jaringan TIK berkualitas / total wilayah	Persentase
IKPS 23.1.1.2	Tersedianya sarana dan prasarana TIK UT yang sesuai standar di UT Pusat dan UT Daerah	Definisi Operasional: Unit UT yang dilengkapi dengan infrastruktur TIK standar adalah ukuran yang menunjukkan proporsi unit kerja di Universitas Terbuka (UT) yang telah memenuhi standar minimal ketersediaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), sebagaimana ditetapkan dalam pedoman internal organisasi atau acuan nasional/internasional. Kriteria: 1. Perangkat komputer/laptop sesuai kebutuhan pegawai 2. Akses ke sistem aplikasi organisasi 3. Perangkat <i>printer/scanner</i> (jika diperlukan oleh fungsi unit) 4. Keamanan fisik dan sistem (misal: firewall, antivirus, backup data)	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: $\text{Persentase} = \left(\frac{\text{Jumlah unit yang dilengkapi dengan infrastruktur TIK standar}}{\text{Jumlah total unit di UT}} \right) \times 100\%$	
PS 23.1.2	Penguatan Ekosistem Pembelajaran Digital		
IKPS 23.1.2.1	Tingkat Indeks Maturity DLE	Definisi Operasional: Maturitas Ekosistem Pembelajaran Digital adalah ukuran komposit yang mencerminkan kesiapan, kapabilitas, dan keberlanjutan dalam mengelola pembelajaran digital secara holistik. Kriteria: 1. Inisiasi 0-39 (Indeks 1) 2. Terstruktur 40-59 (Indeks 2) 3. Terkelola 60-79 (Indeks 3) 4. Terintegrasi 80-100 (Indeks 4)	Indeks
PS 24.1.1	Penataan dan Infrastruktur		
IKPS 24.1.1.1	Tersedianya sarana prasarana bagi mahasiswa termasuk mahasiswa berkebutuhan khusus	Definisi Operasional: Sarana prasarana di lingkungan kampus yang dirancang untuk memfasilitasi aksesibilitas dan mobilitas mahasiswa termasuk mahasiswa penyandang disabilitas. Kriteria: A. Tersedianya akses jalan untuk kursi roda Spesifikasi: 1. Lebar jalur minimal 90 cm untuk memungkinkan pergerakan kursi roda dengan nyaman 2. Kemiringan maksimal 5% 3. Permukaan jalan non-slip (tidak licin) 4. Dilengkapi pegangan tangan di sisi jalur dengan tinggi 85-95 cm 5. Terhubung langsung ke ruang publik seperti kelas, perpustakaan, kantin, toilet aksesibel, parkir, dan fasilitas penting lainnya 6. Dilengkapi dengan rambu aksesibilitas yang jelas, dengan simbol internasional kursi roda	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		7. Pencahayaan yang memadai, minimal 100 lux B. Tersedianya toilet disabilitas Spesifikasi: 1. Luas minimal 150 cm x 150 cm 2. radius putar minimal 150 cm 3. Lebar pintu minimal 90 cm 4. Pintu terbuka ke luar atau menggunakan sistem geser (sliding door) 5. Pegangan pada pintu harus mudah dijangkau dan dioperasikan 6. Permukaan lantai anti-selip (Bebas dari ambang atau perbedaan ketinggian yang dapat menghambat pergerakan kursi roda) 7. Kloset duduk dengan ketinggian 45-50 cm (Dilengkapi dengan pegangan tangan di sisi kloset dengan tinggi 70-85 cm) dan Jarak pegangan tangan minimal 30 cm dari kloset 8. Sirkulasi udara yang baik (Pencahayaan memadai, minimal 100 lux) 9. Dilengkapi tombol darurat (emergency button) dalam jangkauan kursi roda, maksimal 120 cm dari lantai. C. Ruang Layanan Kesehatan Mahasiswa Gedung baru tahun pertama 7, tahun kedua sampai 8, tahun ketiga 8, tahun keempat 8, tahun kelima 9 Formula: (Jumlah gedung yang sudah tersedia sarana dan prasarana bagi mahasiswa termasuk mahasiswa penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan kriteria / Total Gedung) x 100%	
IKPS 24.1.1.2	Tersedianya sarana prasarana yang hemat energi	Definisi Operasional: Implementasi dan pemanfaatan peralatan listrik serta teknologi yang dirancang untuk mengurangi konsumsi energi tanpa mengorbankan fungsionalitasnya dalam setiap gedung. Kriteria: 1. Menggunakan lampu LED atau lampu hemat energi dengan efisiensi tinggi (misalnya, <i>label Energy Star</i> atau SNI).	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		- Pendingin Ruangan (AC): Memiliki fitur inverter dan berlabel hemat energi dengan EER (<i>Energy Efficiency Ratio</i>) tinggi. - Komputer, printer, dan peralatan lainnya memiliki mode <i>sleep/standby</i> untuk mengurangi konsumsi daya saat tidak digunakan. - Menggunakan sensor gerak atau sensor cahaya untuk mengatur pencahayaan di ruangan yang tidak digunakan. - Sistem pendingin ruangan memiliki pengatur suhu otomatis untuk mencegah pemborosan energi. - Gedung dilengkapi dengan ventilasi dan pencahayaan alami untuk mengurangi ketergantungan pada listrik. - Menggunakan kran air yang memiliki fitur automatic on/off. - Adanya panel surya atau sumber energi terbarukan untuk mendukung operasional gedung. Formula: $= (\text{Jumlah Kriteria yang Terpenuhi} / \text{Total Jumlah Kriteria}) \times 100\%$	
IKPS 24.1.1.3	Tersedianya pengelolaan sampah (<i>waste management system</i>) untuk mendukung <i>Green University</i>	Definisi Operasional: Sistem untuk wasted management system Kriteria: - Pendekatan pengurangan sampah di sumbernya (<i>Zero Waste Approach</i>) Bobot 20% (N1) 3R (<i>Reduce, Reuse, Recycle</i>) Bobot 20% (N2) - Pengembangan sistem informasi manajemen sampah Bobot 20% (N3) - Kerjasama dengan mitra (Pemerintah, LSM, atau Swasta) Bobot 20% (N4) - Pengembangan <i>e-waste</i> Bobot 20% (N5) Formula: $(N1 \times 20\%) + (N2 \times 20\%) + (N3 \times 20\%) + (N4 \times 20\%) + (N5 \times 20\%)$	Persentase
IKPS 24.1.1.4	Penurunan anggaran ATK dan listrik sebagai dampak implementasi sarana prasarana berbasis digital	Definisi Operasional: Penurunan anggaran ATK dan listrik sebagai dampak implementasi sarana dan prasarana berbasis digital dengan tujuan untuk mendukung efisiensi sumber daya,	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		mengurangi dampak lingkungan, dan menciptakan pola hidup yang lebih ramah lingkungan bagi seluruh civitas akademika. Kriteria: Jumlah penurunan anggaran (%) untuk ATK dan listrik dari tahun ke tahun Formula: Persentase penurunan anggaran listrik dan ATK dari tahun ke tahun (<i>year of year</i>).	
PS 24.1.2	Pengembangan infrastruktur		
IKPS 24.1.2.1	Terlaksananya pembangunan fisik infrastruktur kawasan baru sesuai rencana induk (<i>masterplan</i>)	Definisi Operasional: Realisasi pembangunan fisik infrastruktur di kawasan baru Universitas Terbuka telah terlaksana sesuai dengan tahapan dan target yang tercantum dalam dokumen Rencana Induk Pengembangan Infrastruktur (<i>Masterplan</i>), baik secara kuantitatif (volume fisik) maupun kualitatif (standar fungsi dan kelayakan bangunan). Kriteria: Realisasi pembangunan yang dimaksud mencakup: 1. Gedung perkantoran dan perkuliahan, laboratorium (sekolah lab unggulan), pusat layanan mahasiswa, dan fasilitas penunjang tridharma lainnya. 2. Fitur <i>smart building</i>, yaitu bangunan yang mengintegrasikan sistem otomatisasi dan teknologi digital seperti: a. Sistem manajemen gedung terintegrasi (<i>Building Management System/BMS</i>) b. Pengendalian pencahayaan dan suhu otomatis c. Akses digital (<i>smart card/face recognition</i>) d. CCTV dan pemantauan energi berbasis IoT. 3. Aspek ramah lingkungan, meliputi: a. Efisiensi energi (penggunaan panel surya, lampu LED hemat <i>energy</i>) b. Pengelolaan air (<i>rainwater harvesting</i>, sistem daur ulang air) c. Pengelolaan sampah terintegrasi (<i>reduce, reuse, recycle</i>) d. Ruang terbuka hijau (RTH) dan konservasi lanskap lokal.	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Formula: (Realisasi progress pembangunan / Target progress sesuai masterplan) X 100%	
Penjaminan Mutu dan Manajemen Risiko			
PS 25.1.1	Finalisasi dan sosialisasi Dokumen Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan SN Dikti dan sesuai dengan Karakteristik UT (Simintas 2024) di setiap unit yang meliputi Kebijakan, Pedoman, prosedur, Petunjuk Kerja dan Rekaman		
IKPS 25.1.1.1	Tersedianya Dokumen Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan SN Dikti dan sesuai dengan Karakteristik UT (Simintas 2024) di setiap unit yang meliputi Kebijakan, Pedoman, prosedur, Petunjuk Kerja dan Rekaman, serta terselenggaranya sosialisasi dokumen tersebut.	Definisi operasional: Dokumen Penjaminan Mutu UT: Dokumen yang mencakup kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk kerja, dan rekaman yang terintegrasi dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) dan sesuai dengan karakteristik Universitas Terbuka (UT). Kriteria: 1. Kelengkapan Dokumen: Semua unit memiliki dokumen yang mencakup kebijakan, pedoman, prosedur, petunjuk kerja, dan rekaman. 2. Integrasi dengan SN Dikti: Dokumen telah disesuaikan dengan standar nasional pendidikan tinggi. 3. Kesesuaian dengan Karakteristik UT: Dokumen mencerminkan sistem pendidikan terbuka dan jarak jauh yang diterapkan UT. 4. Pelaksanaan Sosialisasi: Terdapat bukti kegiatan sosialisasi kepada seluruh unit terkait. Formula: (Jumlah dokumen Penjaminan Mutu UT)/(Jumlah Total Dokumen) x 100% 1. Target: 100% unit memiliki dokumen lengkap dan telah disosialisasikan. 2. Sumber Data: Laporan unit terkait, hasil audit internal, dan dokumentasi sosialisasi.	Persentase
PS 25.1.2	Penyusunan kebijakan baru Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini (Pertor, Surat Edaran, Pedoman).		
IKPS 25.1.2.1	Tersedia kebijakan baru Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini (Pertor, Surat Edaran, Pedoman).	Definisi Operasional Kebijakan baru SIMINTAS UT adalah dokumen resmi yang disusun dan ditetapkan oleh Universitas Terbuka untuk memperbarui dan/atau memperkuat arah kebijakan Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu (SIMINTAS), sehingga mendukung sistem penjaminan mutu internal UT yang:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. Selaras dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) 2. Mengadopsi praktik baik dan referensi standar mutu internasional (seperti ISO 21001, ESG EHEA, atau lainnya yang relevan) 3. Merujuk pada regulasi dan ketentuan peraturan perundangan terbaru, termasuk Peraturan Rektor (Pertor), Surat Edaran, dan Pedoman internal lainnya Dokumen kebijakan ini harus disusun secara partisipatif, melalui proses validasi dan telaah, kemudian ditetapkan secara formal oleh pimpinan universitas dan disosialisasikan ke seluruh unit kerja terkait. Kriteria IKPS ini dinyatakan tercapai apabila memenuhi seluruh kriteria berikut: 1. Tersusun: Terdapat naskah kebijakan baru SIMINTAS UT yang mengintegrasikan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terbaru. 2. Ditetapkan: Dokumen telah ditandatangani dan ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan Rektor atau dokumen legal sejenis. 3. Terdokumentasi: Dokumen tersedia dan diunggah di SIMINTAS 2024 atau sistem dokumentasi mutu resmi UT. 4. Tersosialisasi: Telah dilakukan sosialisasi kepada pemangku kepentingan internal (minimal unit QA, pimpinan fakultas/UPBJJ, dan pengelola program studi), dibuktikan dengan notulensi atau daftar hadir. Formula: $IKPS = (KT / KH) \times 100\%$ Keterangan: 1. IKPS = Indikator Kinerja Program Strategis (%) 2. KT = Jumlah dokumen kebijakan baru SIMINTAS UT yang telah memenuhi keempat kriteria (tersusun, ditetapkan, terdokumentasi, tersosialisasi) 3. KH = Jumlah target dokumen kebijakan baru SIMINTAS yang direncanakan dalam periode tahun berjalan	
PS 25.1.3	Penyusunan Dokumen Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini di unit		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 25.1.3.1	Tersedia Dokumen Simintas UT yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini di unit.	Definisi Operasional Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik dan berkelanjutan yang dilakukan oleh perguruan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh institusi itu sendiri, agar memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-Dikti) serta standar yang ditetapkan oleh perguruan tinggi. Di UT, melalui SIMINTAS (Sistem Informasi Manajemen Mutu Terintegrasi dan Terkendali), SPMI diimplementasikan sebagai sebuah siklus penjaminan mutu yang mencakup penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu (PPEPP), yang terdokumentasi dan terintegrasi dalam sistem. Dokumen SIMINTAS UT adalah dokumen Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu yang dikembangkan dan diimplementasikan oleh Universitas Terbuka sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dokumen ini harus tersedia di setiap unit dan mencakup elemen-elemen: 1. Kebijakan Mutu 2. Manual/Pedoman Mutu 3. Prosedur Mutu 4. Petunjuk Kerja 5. Rekaman Mutu Agar dokumen dianggap terintegrasi, maka: 1. Mengacu dan sesuai dengan ketentuan SN Dikti (Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023) 2. Selaras dengan standar mutu internasional yang relevan (AAOU Frameworks, ICDE) 3. Mengadaptasi dan menyesuaikan dengan peraturan terkini di UT (Peraturan Rektor, Surat Edaran, atau Pedoman resmi terbaru) Kriteria Satu unit dianggap memiliki dokumen SIMINTAS terintegrasi apabila memenuhi kriteria berikut: 1. Tersedia dokumen lengkap (minimal mencakup Kebijakan, Pedoman, Prosedur, Petunjuk Kerja, dan Rekaman)	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		- Dokumen mengacu secara eksplisit pada SN Dikti dan/atau standar mutu internasional (dinyatakan dalam isi atau daftar acuan) - Dokumen mengacu pada peraturan internal terbaru (misalnya, Pertor/Surat Edaran/Pedoman terbaru) - Dokumen ditetapkan secara formal oleh pimpinan unit (SK/penetapan internal) - Dokumen terdokumentasi secara digital di JDIH UT Formula $\text{IKPS} = (\text{UT}/\text{UH}) \times 100\%$ Keterangan: IKPS = Indikator Kinerja Program Strategis (%) UT = Jumlah unit yang memiliki dokumen SIMINTAS UT sesuai kriteria (1–5) UH = Jumlah total unit yang wajib memiliki dokumen SIMINTAS UT	
PS 25.2.1	Pemanfaatan Simintas yang terintegrasi dengan SN Dikti,	standar internasional, dan peraturan terkini dalam operasionalnya oleh setiap Unit Kerja di UT.	
IKPS 25.2.1.1	Terimplementasi Simintas yang terintegrasi dengan SN Dikti, standar internasional, dan peraturan terkini dalam operasionalnya sesuai dengan proporsi yang ditargetkan.	Definisi Operasional: Implementasi SIMINTAS (Sistem Informasi Manajemen Penjaminan Mutu UT) yang terintegrasi adalah penerapan sistem penjaminan mutu internal secara aktif oleh unit kerja UT dalam pelaksanaan kegiatan operasional sehari-hari. Kriteria: - Unit kerja dikatakan telah mengimplementasikan SIMINTAS secara terintegrasi apabila memenuhi kriteria: - Melaksanakan kegiatan berdasarkan dokumen mutu yang telah ditetapkan - Mengacu pada SN Dikti dan standar mutu internasional (terdokumentasi dalam SOP atau instrumen mutu) - Melibatkan dokumen regulasi internal UT yang terkini - Membuktikan implementasi melalui rekaman atau laporan kegiatan mutu - Terlapor dalam sistem pelaporan mutu UT (SIMINTAS) dan/atau terverifikasi oleh audit mutu internal Formula:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		IKPS = $(UI/(UT) \times 100\%$ Keterangan: IKPS = Indikator Kinerja Program Strategis (%) UI = Jumlah unit yang telah mengimplementasikan SIMINTAS sesuai kriteria UT = Jumlah total unit yang ditargetkan mengimplementasikan SIMINTAS	
PS 25.3.1	Pemanfaatan Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan Standar Internasional (AAOU <i>Framework</i>).		
IKPS 25.3.1.1	Terlaksananya Sistem Penjaminan Mutu UT yang terintegrasi dengan Standar Internasional (AAOU <i>Framework</i>).	Definisi Operasional: Pelaksanaan sistem penjaminan mutu UT yang terintegrasi dengan standar internasional adalah penerapan prinsip, domain, dan indikator mutu yang mengacu pada AAOU <i>Quality Assurance Framework</i> secara nyata dalam pengelolaan akademik, non-akademik, dan layanan pendukung di seluruh jenjang dan unit di Universitas Terbuka. Pelaksanaan dianggap terintegrasi jika prinsip AAOU diadopsi dalam dokumen mutu dan tercermin dalam praktik operasional serta dievaluasi melalui instrumen audit atau evaluasi diri. Kriteria: Sistem penjaminan mutu UT dikatakan telah melaksanakan standar internasional (AAOU <i>Framework</i>) apabila: 1. Terdapat dokumen mutu dan perangkat (pedoman, SOP, instrumen evaluasi) yang mengadopsi domain dan indikator AAOU <i>Framework</i> 2. Dilakukan sosialisasi dan implementasi prinsip-prinsip tersebut dalam unit akademik dan pendukung 3. Unit kerja melakukan evaluasi diri (<i>self-review</i>) berdasarkan AAOU <i>Framework</i> secara berkala 4. Terdapat rekaman pelaksanaan dan hasil evaluasi mutu berbasis AAOU 5. Ada tindak lanjut atau perbaikan berkelanjutan berdasarkan hasil penilaian tersebut Formula: IKPS = $(UI/(UT) \times 100\%$ Keterangan:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. IKPS = Indikator Kinerja Program Strategis (%) 2. UAAOU = Jumlah unit yang telah melaksanakan sistem mutu dengan mengacu pada AAOU <i>Framework</i> 3. UT = Jumlah total unit yang ditargetkan melaksanakan standar AAOU	
PS 26.1.1	Implementasi Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis teknologi (<i>e-Audit</i>)		
IKPS 26.1.1.1	Terlaksananya Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis teknologi	Definisi Operasional: Audit Mutu Internal (AMI) adalah merupakan prosedur untuk melakukan tes dan mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan di UT. AMI dilakukan untuk mengevaluasi penerapan dan capaian standar UT (SIMINTAS 2024). Persentase Implementasi Asesmen/Audit Mutu Internal (AMI) berbasis teknologi adalah proporsi dari total asesmen atau audit mutu internal yang dilakukan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Target: Persentase unit kerja operasional akademik Kriteria: Kriteria audit adalah kebijakan, prosedur atau persyaratan yang digunakan sebagai referensi. (Permendikbudristekdikti No 53/2023). Formula: Indeks AMI berbasis Teknologi (IAMIBT) diperoleh secara komposit dari jumlah nilai: $= (\text{Total skor implementasi AMI berbasis teknologi} / \text{Total maksimal skor potensial}) \times 100\%$	Persentase
PS 26.2.1	Pelaksanaan Asesmen/Audit Mutu Eksternal (AAOU) di unit		
IKPS 26.2.1.1	Diperolehnya status Akreditasi dari AAOU	Definisi Operasional: Asesmen/Audit Mutu Eksternal AAOU adalah kegiatan evaluasi sistematis oleh pihak eksternal atau dengan menggunakan instrumen standar <i>Asian Association of Open Universities</i> (AAOU <i>Quality Assurance Framework</i>) terhadap pelaksanaan penjaminan mutu akademik dan non-akademik di unit kerja Universitas Terbuka (UT). Implementasi asesmen ini ditandai dengan:	Level Akreditasi

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. Terselenggaranya proses asesmen menggunakan instrumen AAOU (<i>self-assessment</i> atau <i>peer review</i>) 2. Adanya dokumentasi hasil asesmen (laporan, temuan, dan rekomendasi) 3. Dilaksanakannya tindak lanjut atas hasil temuan asesmen tersebut. Kriteria: 1. Unit kerja telah mengikuti proses asesmen mutu eksternal dengan standar AAOU. 2. Tersedia dokumen hasil asesmen (laporan atau feedback dari tim asesmen/asesor eksternal). 3. Ada bukti tindak lanjut dan perbaikan dari hasil asesmen. 4. Proses dilaksanakan secara resmi dan terjadwal (minimal 1 kali dalam periode Renstra atau sesuai siklus mutu). Formula: $\text{IKPS} = (\text{UA}/(\text{UT}) \times 100\%$ Keterangan: 1. IKPS = Indikator Kinerja Program Strategis (%) 2. UA = Jumlah unit yang telah melaksanakan Asesmen eksternal AAOU. 3. UT = Jumlah total unit yang ditargetkan melaksanakan Asesmen eksternal AAOU	
PS 26.3.1	Peningkatan jumlah prodi terakreditasi Unggul dan Internasional		
IKPS 26.3.1.1	Program studi akreditasi "Unggul" sesuai target yang ditetapkan	Definisi Operasional: Akreditasi Program studi adalah proses penilaian dan pengakuan terhadap kualitas program studi oleh Lembaga Akreditasi Masyarakat (LAM) atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Kriteria: Untuk sebuah program studi mendapatkan akreditasi 'Unggul', harus memenuhi beberapa kriteria utama, antara lain: 1. Visi, Misi, Tujuan, dan Strategi: Program studi harus memiliki visi, misi, tujuan, dan strategi yang jelas dan terukur.	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		2. Tata Pamong, Tata Kelola, dan Kerjasama: Struktur tata kelola yang baik dan kerjasama dengan berbagai pihak. 3. Mahasiswa dan Lulusan: Kualitas input mahasiswa dan capaian lulusan. 4. Sumber Daya Manusia: Kualifikasi dan kompetensi dosen serta tenaga kependidikan. 5. Keuangan, Sarana, dan Prasarana: Ketersediaan dan kualitas fasilitas pendukung. 6. Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat: Kualitas proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. 7. Luaran dan Capaian Tridharma: Hasil dan dampak dari kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Formula: Formula untuk menghitung persentase program studi dengan akreditasi 'Unggul' adalah sebagai berikut. = (Jumlah prodi dengan akreditasi "Unggul" / Jumlah program studi) X 100%	
IKPS 26.3.1.2	Program studi memperoleh akreditasi internasional sesuai target yang ditetapkan.	Definisi Operasional: Akreditasi internasional adalah pengakuan secara global yang diberikan oleh badan berwenang kepada universitas atau institusi pendidikan, berdasarkan hasil penilaian bahwa institusi tersebut telah memenuhi syarat atau kriteria mutu yang ditetapkan oleh lembaga akreditasi internasional. Akreditasi internasional ini bertujuan untuk mengembangkan, mendorong, dan mengevaluasi sistem serta pelaksanaan penjaminan mutu di perguruan tinggi pada tingkat internasional. Persentase program studi yang memperoleh akreditasi internasional adalah proporsi program studi yang telah mendapatkan pengakuan atau akreditasi dari lembaga akreditasi internasional yang diakui oleh Pemerintah. Kriteria: Untuk sebuah program studi memperoleh akreditasi internasional, harus memenuhi beberapa kriteria utama, antara lain:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. <i>Outcome Based Education (OBE)</i>: Implementasi pendidikan berbasis hasil yang jelas dan terukur. 2. <i>Program Specification</i>: Spesifikasi program yang sesuai dengan standar internasional. 3. <i>Program Structure and Content</i>: Struktur dan konten program yang memenuhi standar internasional. 4. <i>Teaching and Learning Approach</i>: Pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang inovatif dan efektif. 5. <i>Student Assessment</i>: Sistem penilaian mahasiswa yang transparan dan adil. 6. <i>Quality Assurance</i>: Sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan. Formula: Formula untuk menghitung persentase program studi yang memperoleh akreditasi internasional adalah sebagai berikut. = (Jumlah program studi yang memperoleh akreditasi internasional / Jumlah program studi) X 100%	
PS 26.4.1	Pelaksanaan akreditasi/sertifikasi Perguruan Tinggi		
IKPS 26.4.1.1	Predikat PT terakreditasi/tersertifikasi	Definisi Operasional: Predikat Perguruan Tinggi terakreditasi/tersertifikasi adalah status resmi yang diberikan oleh lembaga yang berwenang (nasional atau internasional), seperti Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), atau lembaga sertifikasi mutu internasional seperti ICDE, dan AAOU sebagai pengakuan atas kualitas sistem manajemen institusi, tata kelola, dan mutu akademik. Predikat ini mencakup: 1. Status akreditasi institusi PT (baik akreditasi nasional maupun internasional), 2. Sertifikasi mutu yang diakui secara nasional/internasional, 3. Status "terakreditasi minimal Baik" atau "tersertifikasi aktif" sesuai periode evaluasi. Kriteria: 1. Universitas memperoleh predikat akreditasi institusi dari BAN-PT 2. Universitas memperoleh sertifikasi mutu dari lembaga internasional yang relevan	Peringkat

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		3. Predikat akreditasi/sertifikasi masih berlaku dalam periode evaluasi 4. Dokumen resmi hasil akreditasi atau sertifikasi tersedia dan dapat ditelusuri Formula: $\text{IKPS} = (100\% \text{ jika UT terakreditasi dan/atau tersertifikasi sesuai target, } 0\% \text{ jika tidak})$	
PS 26.4.2	Peningkatan Rekognisi UT dalam skala nasional dan Internasional		
IKPS 26.4.2.1	Tercapainya peringkat UT pada skema WUR THE IMPACT	Definisi Operasional: THE Impact Rankings adalah sebuah pemeringkatan global yang mengukur kontribusi perguruan tinggi terhadap 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Untuk metodologi, THE IMPACT mengukur 4 SDGs, dimana SDGs 17 mandatory, dan sisanya 3 SDGs pilihan. Untuk bobot SDGs 17 (22%) dan sisanya masing-masing 26%. Setiap SDGs memuat 4 indikator yaitu <i>research</i>, <i>stewardship</i>, <i>outreach</i> dan <i>teaching</i>. Data yang disubmit adalah y-1, dan diumumkan y+1. Kriteria: 1. Universitas Terbuka berhasil masuk dalam daftar peringkat THE Impact Rankings tahun berjalan. 2. UT mendapatkan skor dan peringkat secara keseluruhan (overall score) atau peringkat pada SDG tertentu yang diunggulkan. 3. Data dan dokumen pendukung validasi THE Impact (misalnya publikasi, kebijakan, pelibatan masyarakat) terdokumentasi dan dilaporkan sesuai standar THE. Formula: Pemeringkatan THE IMPACT diterbitkan secara berkala tahunan pada laman: https://www.timeshighereducation.com/impactrankings	Peringkat/ ranking internasional
IKPS 26.4.2.2	Tercapainya peringkat UT pada skema WUR UI Greenmetric	Definisi Operasional: UI GreenMetric adalah pemeringkatan tahunan yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia (UI) untuk menilai komitmen perguruan tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan. UI GreenMetric menggunakan berbagai indikator untuk menilai kinerja	Peringkat

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		kampus dalam enam kategori utama, yaitu Tata Letak dan Infrastruktur, Energi dan Perubahan Iklim, Limbah, Air, Transportasi, dan Pendidikan dan Penelitian. Submisi data dilakukan dengan data tahun berjalan. Kriteria: UT berhasil masuk peringkat global pada UI GreenMetric pada tahun berjalan. UT memperoleh skor total dan peringkat secara keseluruhan maupun per indikator. Tersedia dokumen pendukung valid seperti kebijakan, kegiatan, infrastruktur, laporan data energi, limbah, air, transportasi, dan kegiatan pendidikan terkait keberlanjutan. Formula: Pemeringkatan UI GreenMetric diterbitkan secara berkala tahunan pada laman: https://greenmetric.ui.ac.id	
IKPS 26.4.2.3	Tercapainya peringkat UT pada Webometrics	Definisi Operasional: Peringkat Webometrics terhadap institusi pendidikan tinggi di seluruh dunia disusun berdasarkan sistem metrik yang menilai kinerja web institusi serta dampak akademiknya. Dalam sistem pemeringkatan terbaru berfokus pada tiga indikator utama. 1. Indikator pertama adalah Visibility dengan bobot penilaian tertinggi sebesar 50%. Indikator ini mengukur dampak web melalui jumlah jaringan eksternal (subnet) yang terhubung ke laman institusi UT. Data dikumpulkan dari dua platform analitik web, yakni <i>Ahrefs</i> dan <i>Majestic</i>, dan kemudian dilakukan proses analisis <i>big data</i> spesifik yang meningkatkan validitas hasil pemeringkatan. 2. Indikator kedua adalah Transparency (Openness) dengan bobot 10%, yang mengevaluasi keterbukaan akademik institusi berdasarkan jumlah sitasi yang diperoleh oleh 310 penulis teratas di institusi tersebut, dengan pengecualian terhadap 20 penulis yang dianggap <i>outlier</i> untuk menjaga validitas data. Informasi ini bersumber dari <i>Google Scholar Profiles</i> dan menekankan pentingnya profil peneliti yang dapat diakses secara terbuka. 3. Indikator terakhir adalah Excellence (Scholar) dengan kontribusi bobot sebesar 40%. Penilaian ini didasarkan pada jumlah artikel ilmiah institusi yang termasuk dalam 10% teratas paling sering disitasi di 27 bidang disiplin ilmu yang tercakup dalam basis data <i>Scimago</i>. Periode evaluasi yang digunakan adalah selama lima tahun terakhir untuk memastikan bahwa penilaian	Peringkat/ ranking nasional

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		mencerminkan kinerja akademik institusi yang berkelanjutan, bukan hanya prestasi sesaat. Formula: Bobot penilaian: $(Visibility \times 50\%) + (Transparency \times 10\%) + (Excellence \times 40\%)$ Pemeringkatan Webometrics diterbitkan secara berkala tahunan pada laman: https://webometrics.info	
PS 27.1.1	Implementasi sistem manajemen risiko sesuai dengan pedoman universitas oleh unit kerja		
IKPS 27.1.1.1	Unit kerja memiliki peta risiko sesuai pedoman Universitas	Definisi Operasional: Definisi Risiko: Suatu kondisi ketidakpastian yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap pencapaian tujuan, yang ditandai dengan kemungkinan terjadinya peristiwa atau keadaan yang dapat memengaruhi individu, organisasi, atau sistem. Risiko juga mencakup berbagai aspek, termasuk teknologi, akademik, operasional, kepatuhan, dan reputasi. Definisi Peta/Klasifikasi/Tingkat Risiko: Jenis risiko yang dimiliki oleh suatu unit/organisasi dalam upaya mencapai tujuannya, dengan menyeimbangkan potensi manfaat terhadap potensi kerugian, serta berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Definisi Unit Kerja: Satuan kelompok kerja yang ada di Universitas Terbuka yang ketentuannya sudah ditetapkan pada PerTor UT mengenai Organisasi Tata Kelola (OTK). Kriteria: Pada peta/analisis risiko harus memiliki lima komponen yang sesuai dengan kaidah penjaminan mutu, yakni: 1. Risiko: kegagalan/hambatan yang berpotensi/dapat dialami ketika melaksanakan program (untuk mencapai sasaran). 2. Sebab: penyebab kegagalan yang mungkin terjadi ketika menjalankan program. 3. Dampak: dampak kegagalan bagi organisasi dan pemangku kepentingan. 4. Probabilitas: kemungkinan kegagalan terjadi akibat sebab yang terkait.	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		5. Tingkat Risiko: besarnya dampak yang dapat terjadi apabila risiko tersebut tidak ditangani dengan baik. 6. Mitigasi: tindakan/pengendalian untuk mengurangi probabilitas dan/atau dampak risiko. Formula: Persentase peta/analisis risiko di tingkat unit kerja: (Jumlah peta/analisis risiko di unit kerja/unit kerja) x 100%	
PS 27.2.1	Penyediaan laporan manajemen risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan oleh unit kerja.		
IKPS 27.2.1.1	Unit kerja memiliki laporan risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan oleh unit kerja	Definisi operasional: Laporan Manajemen Risiko unit kerja disampaikan kepada Rektor melalui unit pengelola risiko untuk dievaluasi guna perbaikan berkelanjutan. Proses evaluasi terhadap laporan manajemen risiko mencakup penilaian mengenai kesesuaian implementasi manajemen risiko dengan visi dan misi serta tujuan Universitas Terbuka. Kriteria: Laporan manajemen risiko oleh unit kerja harus dapat menunjukkan efektivitas dan efisiensi metode penanganan risiko yang telah dilakukan, sehingga probabilitas dan dampak yang ditimbulkan atas suatu risiko dapat diturunkan ke arah yang lebih ditolerir (risk tolerance). Formula: Persentase unit yang memiliki laporan manajemen risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. Rumus yang digunakan adalah: $= (n/t) \times 100\%$ n = jumlah unit kerja yang telah memiliki laporan manajemen risiko sesuai jadwal dan standar yang ditetapkan. t = jumlah seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka	Persentase
PS 27.3.1	Pelaksanaan Audit Berbasis Risiko berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 27.3.1.1	Tersedia dokumen laporan hasil Audit Berbasis Risiko berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan.	Definisi operasional: Audit berbasis risiko merupakan pendekatan yang memungkinkan unit pengawas internal untuk memfokuskan perhatian dan sumber daya pada area atau proses bisnis yang dianggap memiliki risiko tertinggi yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan Universitas. Hasil proses Manajemen Risiko yang disusun oleh unit kerja dan unit pengelola risiko diserahkan kepada unit pengawas internal untuk kemudian dijadikan dasar dalam penetapan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Kriteria: Audit Berbasis Risiko dilakukan berdasarkan PKPT yang telah mempertimbangkan risiko tertinggi. Obyek Audit berbasis risiko merupakan unit kerja di lingkungan Universitas Terbuka atau area proses bisnis yang memiliki risiko tinggi Formula: Persentase pelaksanaan Audit Berbasis Risiko yang dilakukan pada tingkat universitas dan unit kerja setiap tahun berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan. Rumus yang digunakan adalah: $= (n/t) \times 100\%$ n = jumlah realisasi pelaksanaan audit berbasis risiko di tingkat universitas dan unit kerja t = jumlah tugas audit berbasis risiko di tingkat universitas dan unit kerja yang tercantum dalam PKPT	Persentase Dokumen Laporan Hasil Audit
PS 27.4.1	Pengembangan <i>dashboard</i> digital untuk manajemen risiko yang berfungsi sebagai alat mitigasi dan monitoring risiko.		
IKPS 27.4.1.1	Tersedianya <i>dashboard</i> digital untuk manajemen risiko yang berfungsi sebagai alat mitigasi dan monitoring risiko.	Definisi operasional: Pengembangan <i>dashboard</i> risiko berbasis digital untuk memudahkan pemangku kepentingan dalam memonitor pengendalian risiko, sehingga dapat melakukan mitigasi serta penanganan risiko yang lebih efektif dan lebih efisien. Kriteria: <i>Dashboard</i> risiko berbasis digital:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. Tingkat pelaksana: Memudahkan pelaksana tugas untuk memastikan bahwa apa yang dikerjakan benar dan sesuai ketentuan. 2. Tingkat operasional: Memudahkan pimpinan unit kerja secara berkala melakukan monitoring dan revidi terhadap proses yang berlangsung, risiko yang mungkin terjadi, dan efektivitas dan efisiensi pengendalian risiko. 3. Tingkat organisasi: Memudahkan pihak yang independen untuk melakukan monitoring dan revidi terhadap sistem manajemen risiko Universitas. Formula: Persentase pengembangan dashboard risiko berbasis digital untuk mitigasi dan monitoring risiko. Rumus yang digunakan adalah: $a.K1 + b.K2 + c.K3$ a = Dashboard risiko di tingkat pelaksana b = Dashboard risiko di tingkat operasional c = Dashboard risiko di tingkat organisasi k = konstanta bobot	
PS 28.1.1	Penyediaan peta risiko di tingkat unit kerja yang telah dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan hasil monitoring.		
IKPS 28.1.1.1	Tersedianya peta risiko di tingkat universitas dan unit kerja yang telah dievaluasi dan diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan hasil monitoring.	Definisi Operasional: Definisi Risiko: Suatu kondisi ketidakpastian yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap pencapaian tujuan, yang ditandai dengan kemungkinan terjadinya peristiwa atau keadaan yang dapat memengaruhi individu, organisasi, atau sistem. Risiko juga mencakup berbagai aspek, termasuk teknologi, akademik, operasional, kepatuhan, dan reputasi. Definisi Peta/Klasifikasi/Tingkat Risiko: Jenis risiko yang dimiliki oleh suatu unit/organisasi dalam upaya mencapai tujuannya, dengan menyeimbangkan potensi manfaat terhadap potensi kerugian, serta berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya.	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Definisi Unit Kerja: Satuan kelompok kerja yang ada di Universitas Terbuka yang ketentuannya sudah ditetapkan pada PerTor UT mengenai Organisasi Tata Kelola (OTK). Kriteria: Pada peta/analisis risiko harus memiliki lima komponen yang sesuai dengan kaidah penjaminan mutu, yakni: 1. Risiko: kegagalan/hambatan yang berpotensi/dapat dialami ketika melaksanakan program (untuk mencapai sasaran). 2. Sebab: penyebab kegagalan yang mungkin terjadi ketika menjalankan program. 3. Dampak: dampak kegagalan bagi organisasi dan pemangku kepentingan. 4. Probabilitas: kemungkinan kegagalan terjadi akibat sebab yang terkait. 5. Tingkat Risiko: besarnya dampak yang dapat terjadi apabila risiko tersebut tidak ditangani dengan baik. 6. Mitigasi: tindakan/pengendalian untuk mengurangi probabilitas dan/atau dampak risiko. Formula: Persentase peta/analisis risiko di tingkat unit kerja: $(\text{Jumlah peta/analisis risiko di unit kerja/unit kerja}) \times 100\%$ Definisi operasional (Tingkat Universitas): Definisi Risiko: Suatu kondisi ketidakpastian yang dapat memberikan dampak positif atau negatif terhadap pencapaian tujuan, yang ditandai dengan kemungkinan terjadinya peristiwa atau keadaan yang dapat memengaruhi individu, organisasi, atau sistem. Risiko juga mencakup berbagai aspek, termasuk teknologi, akademik, operasional, kepatuhan, dan reputasi. Definisi Peta/Klasifikasi/Tingkat Risiko: Jenis risiko yang dimiliki oleh suatu unit/organisasi dalam upaya mencapai tujuannya, dengan menyeimbangkan potensi manfaat terhadap potensi kerugian, serta berfungsi sebagai panduan dalam pengambilan keputusan dan alokasi sumber daya. Kriteria (Tingkat Universitas):	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Pada peta/analisis risiko harus memiliki lima komponen yang sesuai dengan kaidah penjaminan mutu, yakni: 1. Risiko: kegagalan/hambatan yang berpotensi/dapat dialami ketika melaksanakan program (untuk mencapai sasaran). 2. Sebab: penyebab kegagalan yang mungkin terjadi ketika menjalankan program. 3. Dampak: dampak kegagalan bagi organisasi dan pemangku kepentingan. 4. Probabilitas: kemungkinan kegagalan terjadi akibat sebab yang terkait. 5. Tingkat Risiko: besarnya dampak yang dapat terjadi apabila risiko tersebut tidak ditangani dengan baik. 6. Mitigasi: tindakan/pengendalian untuk mengurangi probabilitas dan/atau dampak risiko. Formula (Tingkat Universitas): Persentase peta/analisis risiko di tingkat Universitas: Ada = 100% Tidak ada = 0%	
Kemahasiswaan			
PS 29.1.1	Peningkatan Kualitas layanan prima pada SALUT		
IKPS 29.1.1.1	Jumlah SALUT yang memenuhi standar layanan prima	Definisi operasional: SALUT yang dapat melayani mahasiswa dengan standar layanan prima Kriteria: Standar layanan prima: 1. Responsivitas dan Kecepatan Pelayanan 2. Akurasi dan Kelengkapan Informasi 3. Kemudahan Akses dan Ketersediaan 4. Sikap Petugas dan Profesionalisme 5. Penanganan Keluhan dan Umpan Balik Formula: (Jumlah SALUT yang memenuhi standar/jumlah SALUT) x 100%	Persentase
PS 30.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa		

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
IKPS 30.1.1.1	Pencapaian jumlah mahasiswa pertahun berdasarkan target	Definisi Operasional: Jumlah mahasiswa registrasi per tahun, mencakup seluruh program studi dan jenjang pendidikan Kriteria: Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi mata kuliah dihitung dengan metode <i>headcount</i> Formula: Jumlah mahasiswa dalam satu tahun dengan metode <i>headcount</i>	Mahasiswa
PS 30.1.2	Peningkatan retensi mahasiswa		
IKPS 30.1.2.1	Peningkatan jumlah retensi mahasiswa baik di UT Daerah maupun di UT LLN	Definisi operasional: jumlah mahasiswa <i>on going</i> yang melakukan registrasi kembali di semester selanjutnya Kriteria: jumlah mahasiswa <i>on going</i> yang melakukan registrasi kembali Formula: Retensi = (Jumlah mahasiswa <i>on going</i> yang melakukan registrasi di semester N – Jumlah mahasiswa yang melakukan registrasi di semester N-1) x 100%	Persentase
PS 30.1.3	Pemasaran melalui berbagai media untuk meningkatkan <i>brand awareness</i> UT		
IKPS 30.1.3.1	Jumlah program sosialisasi dan edukasi melalui berbagai media di UT Daerah	Definisi Operasional: Kegiatan promosi yang memanfaatkan beragam saluran komunikasi, dengan tujuan menyebarluaskan informasi mengenai Universitas Terbuka secara konsisten dan terukur, sehingga dapat meningkatkan kesadaran (<i>awareness</i>) serta mendorong minat masyarakat menjadi mahasiswa UT. Kegiatan sosialisasi dan edukasi calon mahasiswa di UT Daerah paling tidak harus menyasar calon mahasiswa memiliki potensi akademik tinggi, tetapi kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Jumlah Program

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria: - Kegiatan ini diukur melalui jumlah media yang digunakan dan frekuensi publikasi materi promosi - Kegiatan ini setidaknya juga melibatkan calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik tinggi, calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan diselenggarakan di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Formula: Jumlah program sosialisasi dan edukasi :	
PS 30.1.4	Peningkatan kepuasan mahasiswa dan pengguna lulusan		
IKPS 30.1.4.1	Indeks kepuasan mahasiswa	Definisi Operasional Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) adalah ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik dan non-akademik yang diberikan oleh UT. Kriteria Indeks ini diperoleh dari hasil survei persepsi mahasiswa yang mencakup aspek: - Layanan umum - Layanan registrasi - Layanan tutorial - Layanan praktik/praktikum - Bahan Ajar Formula Berdasarkan perhitungan survey kepuasan mahasiswa yang selama ini diselenggarakan UT	Indeks Kepuasan
IKPS 30.1.4.2	Indeks kepuasan pengguna lulusan	Definisi Operasional	Indeks Kepuasan

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Ukuran kuantitatif yang menunjukkan tingkat kepuasan instansi, perusahaan, atau organisasi pengguna terhadap kualitas lulusan perguruan tinggi. Kepuasan ini diukur berdasarkan penilaian terhadap kompetensi, etika kerja, kemampuan komunikasi, keterampilan teknis, dan potensi pengembangan karir lulusan dalam dunia kerja. Kriteria Penilaian dilakukan oleh atasan langsung atau bagian SDM dari institusi pengguna lulusan, dengan aspek sebagai berikut 1. Kompetensi professional 2. Etika dan integritas 3. Kemampuan berkomunikasi dan bekerja sama 4. Kemampuan teknologi dan adaptasi 5. Kreativitas dan inovasi 6. Kepemimpinan dan Potensi Pengembangan karier Formula survei menggunakan skala Likert (misalnya 1–4 atau 1–5), maka: IKPL $\frac{\text{Jumlah (Skor jawaban pengguna x bobot indikator)}}{\text{Skor maksimum total x jumlah responden}} \times 100\%$ Interpretasi Skor IKPL 85–100 = Sangat Baik 70–84 = Baik 55–69 = Cukup <55 = Kurang	
PS 30.1.5	Peningkatan jumlah mahasiswa WNA		
IKPS 30.1.5.1	Jumlah Mahasiswa WNA	Definisi Operasional: Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang menjadi mahasiswa UT Kriteria:	Mahasiswa

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Mahasiswa Warga Negara Asing (WNA) yang berada di luar negeri dan Indonesia yang terdaftar sebagai mahasiswa UT pada Program Studi, baik yang menggunakan Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris. Formula: Jumlah Mahasiswa WNA	
PS 31.1.1	Penyelenggaraan program pendukung kesuksesan belajar jarak jauh		
IKPS 31.1.1.1	Mahasiswa yang mengikuti program orientasi mahasiswa baru dan persiapan pembelajaran jarak jauh	Definisi Operasional: Jumlah mahasiswa baru yang mengikuti program orientasi dan persiapan pembelajaran jarak jauh Kriteria: Total mahasiswa baru yang hadir mengikuti program orientasi persiapan pembelajaran jarak jauh. Formula: $N1 = (\text{Jumlah Mahasiswa Baru yang Mengikuti OSMB} / \text{Total Mahasiswa Baru Terdaftar}) \times 100\%$ $N2 = (\text{Jumlah Mahasiswa baru yang mengikuti program persiapan pembelajaran jarak jauh} / \text{Total Mahasiswa Baru Terdaftar}) \times 100\%$ $N = (N1 + N2) / 2$	Persentase
IKPS 31.1.1.2	Mahasiswa yang mengikuti program penyelesaian tugas dan persiapan ujian	Definisi Operasional: Mahasiswa yang mengikuti program penyelesaian tugas dan persiapan ujian Kriteria: Total mahasiswa yang hadir yang mengikuti program penyelesaian tugas dan persiapan ujian Formula: $N1 = (\text{Jumlah mahasiswa yang mengikuti program penyelesaian tugas} / \text{Total mahasiswa}) \times 100$	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		$N2 = (\text{Jumlah mahasiswa yang mengikuti program persiapan ujian} / \text{Total jumlah mahasiswa}) \times 100$ $N = (N1 + N2) / 2$	
PS 32.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa berprestasi di berbagai tingkat		
IKPS 32.1.1.1	Mahasiswa yang berprestasi tingkat lokal, wilayah, nasional, dan internasional	Definisi Operasional: Mahasiswa yang mengikuti perlombaan dan meraih juara Kriteria: Mahasiswa S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: - Berprestasi dalam kompetisi atau lomba pada peringkat juara I sampai dengan juara III pada kompetisi - Tingkat internasional; - tingkat nasional; atau - tingkat provinsi. - Memiliki karya yang digunakan dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat. - Mendapatkan sertifikasi kompetensi internasional. Formula: $\frac{\text{Perguruan Tinggi Negeri Akademik} ((cxk) / y) \times 100}{y}$ c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).	Jumlah Prestasi
PS 32.1.2	Peningkatan jumlah mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar program studi		
IKPS 32.1.2.1	Mahasiswa yang mengikuti kegiatan di luar program studi	Definisi Operasional: Jumlah dapat dihitung sebagai rata-rata dari jumlah mahasiswa terdaftar yang telah memperoleh minimal 20 sks dari mata kuliah Kampus Merdeka	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Kriteria kegiatan pembelajaran di luar program studi Mahasiswa S1/D4/D3/D2/D1 yang menghabiskan sampai dengan 20 (dua puluh) sks per semester di luar program studi. Batas minimal yang dapat dihitung adalah paling sedikit 10 (sepuluh) sks untuk mahasiswa S1/D4/D3 dan 5 (lima) sks untuk mahasiswa D1 dan D2. Kegiatan boleh dikombinasikan dan dihitung kumulatif: 1. Magang atau praktik kerja: Kegiatan magang di sebuah perusahaan, organisasi nirlaba, organisasi multilateral, institusi pemerintah, ataupun perusahaan rintisan (<i>startup company</i>). 2. Proyek di desa: Proyek sosial/pengabdian kepada masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat di pedesaan atau daerah terpencil dalam membangun ekonomi rakyat, infrastruktur, dan lain-lain. 3. Mengajar di sekolah: Kegiatan mengajar di sekolah dasar dan menengah. Sekolah dapat berlokasi di kota, desa, ataupun daerah terpencil. 4. Pertukaran pelajar: Mengambil kelas atau semester di perguruan tinggi lain, baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Pertukaran pelajar juga menghitung aktivitas mahasiswa yang dilakukan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama dan mahasiswa <i>inbound</i> yang diterima perguruan tinggi dalam program pertukaran mahasiswa. 5. Penelitian atau riset: Kegiatan riset akademik, baik sains maupun sosial humaniora yang dilakukan di bawah pengawasan dosen atau peneliti. 6. Kegiatan wirausaha: Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 7. Studi atau proyek independen: Mahasiswa dapat mengembangkan sebuah proyek yang diinisiasi secara mandiri (untuk mengikuti lomba tingkat internasional yang relevan dengan keilmuannya, proyek teknologi, maupun rekayasa sosial) yang pengerjaannya dapat dilakukan secara mandiri ataupun bersama-sama dengan mahasiswa lain. 8. Proyek kemanusiaan: Kegiatan sosial/pengabdian kepada masyarakat yang merupakan program perguruan tinggi atau untuk sebuah yayasan atau organisasi kemanusiaan, baik di dalam maupun luar negeri (seperti penanganan bencana alam, pemberdayaan masyarakat, penyelamatan lingkungan, palang merah, <i>peace corps</i>, dan seterusnya).	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		9. Bela negara: Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memberikan pendidikan dan/atau pelatihan kepada mahasiswa guna menumbuhkembangkan sikap dan perilaku serta menanamkan nilai dasar Bela Negara dan cinta tanah air (contoh: Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN), komponen cadalgal, dan seterusnya). Kegiatan diselenggarakan oleh: 1. Perguruan tinggi bekerja sama dengan Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait; dan/atau 2. Kementerian Pertahanan dan/atau kementerian/lembaga lain terkait. 3. Formula: $\text{Perguruan Tinggi Negeri Akademik} \\ (((axk) / x) \times 50) + (((bxk) / x) \times 50))$ a = jumlah mahasiswa yang menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi sesuai kriteria minimal. b = jumlah mahasiswa inbound yang diterima dalam program pertukaran mahasiswa sesuai kriteria minimal. c = jumlah prestasi oleh mahasiswa. x = jumlah mahasiswa yang memenuhi syarat menjalankan kegiatan pembelajaran di luar program studi. y = total jumlah mahasiswa aktif. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan kuantitas konversi sks, tingkat wilayah kompetisi, dan peringkat kejuaraan, dan sebagainya).	
PS 32.1.3	Penyelenggaraan program pengembangan minat, bakat, dan persiapan karier bagi mahasiswa		
IKPS 32.1.3.1	Mahasiswa yang mengikuti program pengembangan minat, bakat, dan persiapan karier bagi mahasiswa	Definisi Operasional: Kegiatan terstruktur yang diinisiasi, difasilitasi, atau disetujui oleh perguruan tinggi/fakultas/unit terkait, yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan potensi mahasiswa Kriteria:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Program bertujuan untuk: Peningkatan kemampuan akademik, keilmuan, dan potensi mahasiswa Pengembangan potensi dan keterampilan mahasiswa di luar ranah akademik Memberikan layanan informasi kesempatan kerja, Layanan penempatan kerja, dan penyelenggaraan bursa kerja Formula: (Jumlah mahasiswa yang mengikuti program pembinaan minat, bakat di bidang akademik dan non akademik, dan persiapan karier yang diikuti mahasiswa/jumlah mahasiswa) x 100%	
PS 32.1.4	Peningkatan Sertifikasi Kompetensi Mahasiswa		
IKPS 32.1.4.1	Jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi pada setiap program studi	Definisi Operasional: Merupakan sebuah prestasi non kompetisi yang diraih mahasiswa berupa jumlah mahasiswa yang memperoleh sertifikat kompetensi Kriteria: Sertifikasi mahasiswa yang dilakukan secara sistematis dan objektif melalui asesmen kompetensi yang mengacu pada standar kompetensi kerja nasional dan internasional Formula: Jumlah mahasiswa yang meraih sertifikat kompetensi per program studi	Jumlah Mahasiswa per prodi
PS 33.1.1	Peningkatan jumlah mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan dari berbagai sumber		
IKPS 33.1.1.1	Jumlah mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan dari berbagai sumber	Definisi Operasional: Jumlah seluruh mahasiswa yang menerima bantuan biaya pendidikan Kriteria: Bantuan Biaya Pendidikan dapat bersumber pada 1. APBN 2. APBD 3. Mitra UT lainnya Formula: Jumlah mahasiswa yang meraih bantuan biaya pendidikan	Jumlah Mahasiswa

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
PS 33.1.2	Penyediaan program bimbingan konseling bagi mahasiswa		
IKPS 33.1.2.1	Program studi yang menyelenggarakan program bimbingan konseling bagi mahasiswa	Definisi Operasional: Serangkaian kegiatan atau layanan terstruktur yang disediakan oleh Program Studi untuk membantu mahasiswa dalam permasalahan akademik dan non-akademik. Kegiatan ini dapat berbentuk bimbingan perorangan (<i>one-on-one advising</i>), bimbingan kelompok (<i>group advising</i>), klinik belajar, lokakarya akademik, atau konsultasi intensif dengan dosen wali/pembimbing akademik. Kriteria: Bentuk bimbingan: 1. bimbingan perorangan (<i>one-on-one advising</i>), 2. bimbingan kelompok (<i>group advising</i>), 3. klinik belajar, 4. lokakarya akademik, atau 5. konsultasi intensif Topik: proses belajar, pemilihan mata kuliah, perencanaan studi, pengembangan kompetensi akademik personal, keluarga, relasi sosial, hingga keluhan terkait kesehatan mental Formula: Jumlah Program Studi yang menyediakan program bimbingan konseling.	Persentase
PS 33.1.3	Penyediaan layanan kesehatan untuk mahasiswa		
IKPS 33.1.3.1	Jumlah UT Daerah yang menyediakan layanan kesehatan untuk mahasiswa	Definisi Operasional Jumlah UT Daerah yang menyediakan atau memfasilitasi akses layanan kesehatan bagi mahasiswa Kriteria Layanan Kesehatan dapat berupa klinik kesehatan yang dibuka secara berkala dan/atau penyediaan asuransi jiwa oleh Universitas Terbuka, atau penyuluhan kesehatan Formula	Jumlah UT Daerah

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Jumlah UT Daerah yang menyediakan layanan kesehatan	
Alumni dan Kerja Sama			
PS 34.1.1	Program pemberdayaan alumni oleh UT Pusat dan Daerah untuk mendukung visi dan misi UT		
IKPS 34.1.1.1	Jumlah Program Pemberdayaan Alumni Oleh UT Pusat dan Daerah.	Definisi Operasional: UT mempunyai program pemberdayaan alumni untuk meningkatkan angka partisipasi mahasiswa dan jejaring kemitraan untuk mendukung Tridarma PT serta sesuai visi dan misi UT. Kriteria: Jumlah program pemberdayaan alumni yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menunjang visi dan misi UT Formula: Jumlah program pemberdayaan alumni yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menunjang visi dan misi UT	Program
PS 35.1.1	Pengembangan aplikasi dan website manajemen alumni yang terintegrasi dan selalu <i>terupdate</i>		
IKPS 35.1.1.1	Tersedianya platform dan website manajemen alumni yang terintegrasi dan <i>terupdate</i>	Definisi Operasional: UT memiliki website alumni yang informatif dan mudah diakses oleh alumni dan stakeholders Kriteria: - UT memiliki data dan informasi mengenai alumni yang terkini (<i>up to date</i>). - UT melakukan pemutakhiran data dan informasi lain terkait alumni pada website. - UT memiliki website alumni yang informatif dan mudah diakses oleh alumni dan <i>stakeholders</i>. Komponen Pengembangan: - Perencanaan dan analisis kebutuhan - Desain UX/UI, arsitektur, dan teknologi - Pengembangan Backend dan frontend	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		4. Migrasi dan pengelolaan data 5. Uji coba 6. Penyempurnaan hasil uji coba 7. Peluncuran 8. Sosialisasi Formula: Komponen pengembangan yang selesai / Total komponen yang direncanakan x 100%	
PS 35.2.1	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan <i>tracer study</i>		
IKPS 35.2.1.1	Lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil memiliki pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta	Definisi Operasional: Kesiapan kerja lulusan: Persentase lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil: 1. memiliki pekerjaan; 2. melanjutkan studi; atau 3. menjadi wiraswasta. Kriteria: 1. Kriteria pekerjaan: Memiliki pekeadaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus di: a. perusahaan swasta, termasuk perusahaan nasional, perusahaan multinasional, perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan lain-lain; b. organisasi nirlaba; c. institusi/organisasi multilateral; d. lembaga pemerintah; atau e. Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). 2. Kriteria kelanjutan studi: Melanjutkan proses pembelajaran di program studi profesi, S1/D4 terapan, S2/S2 terapan, S3/S3 terapan di dalam negeri atau luar negeri dalam rentang waktu kurang dari 12 (dua belas) bulan setelah lulus. 3. Kriteria kewiraswastaan:	Persentase

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Memiliki pekerjaan dalam rentang waktu 12 (dua belas) bulan setelah lulus sebagai: - pendiri (<i>founder</i>) atau pasangan pendiri (<i>co-founder</i>) perusahaan; atau - pekerja lepas (<i>freelancer</i>). Formula: Jumlah Responden minium tracer study yang harus dipenuhi: $n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$ n=jumlah responden minimum N=jumlah lulusan D=galat (2,5 %) Formula: $\frac{\sum_i^i n_i k_i}{t} \times 100$ n = responden yang merupakan lulusan S1 dan D4/D3/D2/D1 yang berhasil mendapat pekerjaan, melanjutkan studi, atau menjadi wiraswasta. t = total jumlah responden lulusan S1 dan D4/D3 /D2/D1 yang berhasil dikumpulkan (terdapat batas minimum persentase responden yang dikumpulkan). k = konstanta bobot (bobot penuh diberikan kepada responden dengan gaji 1,2 (satu koma dua) kali Upah Minimum Provinsi (UMP) tempat lulusan bekerja dalam mendapatkan pekerjaan dengan waktu tunggu kurang dari 6 (enam) bulan).	
IKPS 35.2.1.2	Jumlah alumni T-1 yang berpartisipasi sebagai responden <i>tracer study</i>	Definisi Operasional: Tracer study adalah survei yang dilakukan untuk menelusuri jejak alumni (biasanya 1–5 tahun setelah lulus) guna mengetahui status pekerjaan, relevansi kurikulum, kompetensi, dan kebutuhan pengembangan program studi. Kriteria: Alumni UT T-1 Formula:	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		Jumlah alumni T-1 yang berpartisipasi sebagai responden <i>tracer study</i> / Jumlah Alumni T-1	
PS 36.1.1	Pengembangan aplikasi kerja sama yang baik dan terintegrasi serta dapat di akses oleh <i>stakeholders</i>		
IKPS 36.1.1.1	Tersedianya aplikasi kerja sama yang terintegrasi serta dapat di akses oleh <i>stakeholders</i> .	Definisi Operasional: UT memiliki aplikasi kerja sama yang terintegrasi dan dapat diakses oleh setiap <i>stakeholder</i> Kriteria: Aplikasi Kerja Sama UT memiliki karakteristik sebagai berikut. - Memiliki desain dan fitur yang responsif dan mudah diakses - Memuat layanan informasi tentang prosedur kerja sama - Membuat layanan informasi kerja sama yang memuat informasi seperti jenis kerja sama, jenis mitra, ruang lingkup kerja, pelaksana kerja sama dan waktu kerja sama. Formula: UT mempunyai aplikasi kerja sama yang terintegrasi, komprehensif, dan <i>ter-up date</i>.	Persentase
PS 37.1.1	Peningkatan dan penguatan kerja sama antar institusi dengan berfokus pada akademik dan non-akademik.		
IKPS 37.1.1.1	Pelaksanaan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan institusi negeri dan swasta di dalam dan luar negeri	Definisi Operasional: Jumlah kerja sama akademik di bidang tridharma perguruan tinggi dengan institusi negeri dan swasta di dalam negeri. Kriteria: - Kriteria kemitraan: Perjanjian kerja sama berbentuk: - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); - menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; - menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; - mengisi kegiatan pembelajaran dengan dosen tamu praktisi; - menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur;	IA dan Laporan

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		g. menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; h. menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; i. menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan atau j. melakukan kemitraan penelitian 2. Kriteria mitra: a. perusahaan multinasional; Bobot 0,75 b. perusahaan nasional berstandar tinggi; Bobot 0,5 c. perusahaan teknologi global; Bobot 1 d. perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 0,5 e. organisasi nirlaba kelas dunia; 0,75 f. institusi/organisasi multilateral; 1 g. perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu <i>subject</i>; 1 h. perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 0,5 i. instansi pemerintah; 0,3 j. rumah sakit; Bobot 0,3 k. lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau Bobot 0,3 l. lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi. Bobot 0,3 Formula: $\sum ((n \times k) / t) \times 100$ n = jumlah kerja sama pada program studi. S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).	
IKPS 37.1.1.2	Pelaksanaan kerja sama bidang akademik dan non akademik dengan perguruan tinggi atau lembaga internasional	Definisi Operasional: Jumlah kerja sama akademik di bidang tridharma perguruan tinggi dengan institusi negeri dan swasta di luar negeri. Kriteria:	Implementasi Kerja sama (IA)

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		1. Kriteria kemitraan Perjanjian kerja sama berbentuk: - pengembangan kurikulum bersama (merencanakan hasil (<i>output</i>) pembelajaran, konten, dan metode pembelajaran); - menyediakan kesempatan pembelajaran berbasis project (PBL); - menyediakan program magang paling sedikit 1 (satu) semester penuh; - menyediakan kesempatan kerja bagi lulusan; - mengisi kegiatan pembelajaral dengan dosen tamu praktisi; - menyediakan pelatihan (<i>upskilling dan reskilling</i>) bagi dosen maupun instruktur; - menyediakan <i>resource sharing</i> sarana dan prasarana; - menyelenggarakan <i>teaching factory</i> (TEFA) di kampus; - menyelenggarakan program <i>double degree</i> atau <i>joint degree</i>; dan atau - melakukan kemitraan penelitian 2. Kriteria mitra: - perusahaan multinasional; Bobot 0,75 - perusahaan nasional berstandar tinggi; Bobot 0,5 - perusahaan teknologi global; Bobot 1 - perusahaan rintisan (<i>startup company</i>) teknologi; 0,5 - organisasi nirlaba kelas dunia; 0,75 - institusi/organisasi multilateral; 1 - perguruan tinggi yang masuk dalam daftar QS200 berdasarkan bidang ilmu <i>subject</i>; 1 - perguruan tinggi, fakultas, atau program studi dalam bidang yang relevan; 0,5 - instansi pemerintah; 0,3 - rumah sakit; Bobot 0,3 - lembaga riset pemerintah, swasta, nasional, maupun internasional; atau Bobot 0,3 - lembaga kebudayaan berskala nasional/ bereputasi. Bobot 0,3 Formula: $\sum ((n \times k) / t) \times 100$	

Kode PS dan IKPS	Indikator Kinerja	Definisi Operasional, Kriteria, dan Formula	Satuan
		n = jumlah kerja sama pada program studi S1 dan D4/D3/D2/D1 yang memenuhi kriteria. t = jumlah program studi S1 dan D4/D3/D2/D1. k = konstanta bobot (pembobotan mempertimbangkan reputasi mitra).	

UNIVERSITA

RENSTRA UT RENCANA STRATEGIS UNIVERSITAS TERBUKA 2025-2029

Rencana Strategis Universitas Terbuka (Renstra UT) Tahun 2025-2029 merupakan tahap pertama dalam Rencana Pengembangan Jangka Panjang Universitas Terbuka (RPJP UT) 2025-2045, yang bertujuan untuk mewujudkan visi UT: "Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh (PTJJ) berkualitas dunia."

Sebagai tahap pertama dalam RPJP UT, Renstra UT Tahun 2025-2029 berfokus: Menjadi Perguruan Tinggi Jarak Jauh melalui penguatan ekosistem pembelajaran digital. Strategi ini menjadi fondasi utama dalam menciptakan lingkungan belajar yang inovatif, adaptif, dan berbasis teknologi, guna memastikan kualitas pendidikan yang tinggi dan menghasilkan lulusan berdaya saing global. Dengan komitmen ini, UT berupaya meningkatkan akses pendidikan yang inklusif dan merespons dinamika perkembangan ilmu pengetahuan serta kebutuhan masyarakat di era digital.



UNIVERSITAS TERBUKA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

Penerbit Universitas Terbuka

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang,
Tangerang Selatan - 15437, Banten - Indonesia
Telp. 021-7490941, Faks. 021-7490147
Website. www.ut.ac.id

FOLLOW US ON



@universitasterbuka @univterbuka